



**UNIVERSITAS INDONESIA**

Paramilitary Policing Di Indonesia

**( Studi Aplikasi Konsep Paramilitary Policing  
Sat Sabhara Polres Metro Jakarta Selatan dan Polres Bogor Kota )**

Oleh:

**DODI ABDULROHIM**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM PASCA SARJANA  
DEPOK  
JULI 2011**

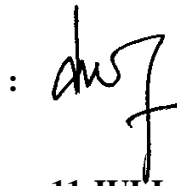
## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri ,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar

**Nama** : **DODI ABDULROHIM**

**NPM** : **0806438982**

**Tanda Tangan** :




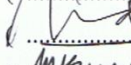


**Tanggal** : **11 JULI 2011**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : DODI ABDULROHIM  
NPM : 0806438982  
Program Studi : Kriminologi  
Judul Tesis : Paramilitary Policing Di Indonesia ( Studi Aplikasi Konsep Paramilitary Policing Sat Sabhara Polres Metro Jakarta Selatan dan Polres Bogor Kota )

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kriminologi pada Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Adrianus Meliala.E,Ph.D, (  ..... )  
Penguji : Prof. Dr. Bambang Widodo Umar (  ..... )  
Ketua Sidang : Dr. M. Kemal Dermawan M.Si. (  ..... )  
Sekretaris Sidang : Kisnu Widagso S.Sos, MTL. (  ..... )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : Juli 2011

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpah rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Adrianus Meliala, MSi, MSc, sebagai dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran dalam proses penyusunan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Widodo Umar, sebagai penguji ahli yang telah memberikan masukan yang konstruktif bagi kemajuan tesis ini.
3. Kedua orang tua saya especially (Alm. Hj. Fatimah) yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya dalam penyelesaian tesis ini untuk diselesaikan tepat waktu.
4. Keluarga saya (Triana, NP, Adit dan Pinot) yang selalu memberi dukungan moril yang sangat berharga.
5. Teman – teman angkatan 2008 dan 2009 yang selalu setia dalam memberikan masukan – masukan dan ide – ide positif dalam penyelesaian tesis ini.
6. Bapak Simon, Mbak Chas, dan Mas cipto sebagai tim dalam riset penelitian hibah UI mengenai Pamil di Polres Jakarta Selatan dan Polres Bogor Kota.

Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuannya selama ini semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal.

Depok, Juli 2011

Penulis

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia , saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DODI ABDULROHIM  
NPM : 0806438982  
Program Studi : Kriminologi  
Departemen : Kriminologi  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan , menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non eksklusif ( Non-exclusive Royalti-Free Right )** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Paramilitary Policing Di Indonesia ( Studi Aplikasi Konsep Paramilitary Policing Sat Sabhara Polres Metro Jakarta Selatan dan Polres Bogor Kota )

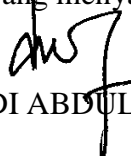
beserta perangkat yang ada ( jika diperlukan ). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan , mengalih media/format-kan mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) , merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat : Depok

Pada tanggal : 11 Juli 2011

Yang menyatakan

  
DODI ABDULROHIM

## Abstrak

NAME : Dodi Abdulrohim  
Study Program : Criminology  
Thesis Title : Paramilitary Policing in Indonesia (Application Study of the Paramilitary Policing Concept of the Sabhara Unit, Metro Police Resort, South Jakarta and Bogor City Police Resort)

The thesis discusses the topic of Paramilitary Policing that occurs at the Sabhara Function of the Metro Police Resort, South Jakarta and Bogor City Police Resort. The study refers to the former study on Paramilitary Policing in the implementation of tasks at the Police Functional Units (The study at the Metro Police Resort, South Jakarta and Bogor City Police Resort) where paramilitary policing is still dominant and inherent at the National Police, in particular related to the sabhara function.

This study applies primary data through in-depth interviews and observation. It clarifies and illustrates why the element of paramilitary policing at the Metro Police Resort of South Jakarta and Bogor City Police Resort is similar whereas these two regions differ in characteristics and culture. The conclusion drawn from the study is that the similarity in military policing is caused by the legal foundations of the Indonesian National Police (Legislation, Government Regulations, Head of INP Regulations, Implementation and Technical Guidelines), besides the similarity in attitude and actions by Police officers, particularly in handling demonstrations as well as their repressive actions/arresting of offenders, show of force, and the utilization of tactical vehicles.

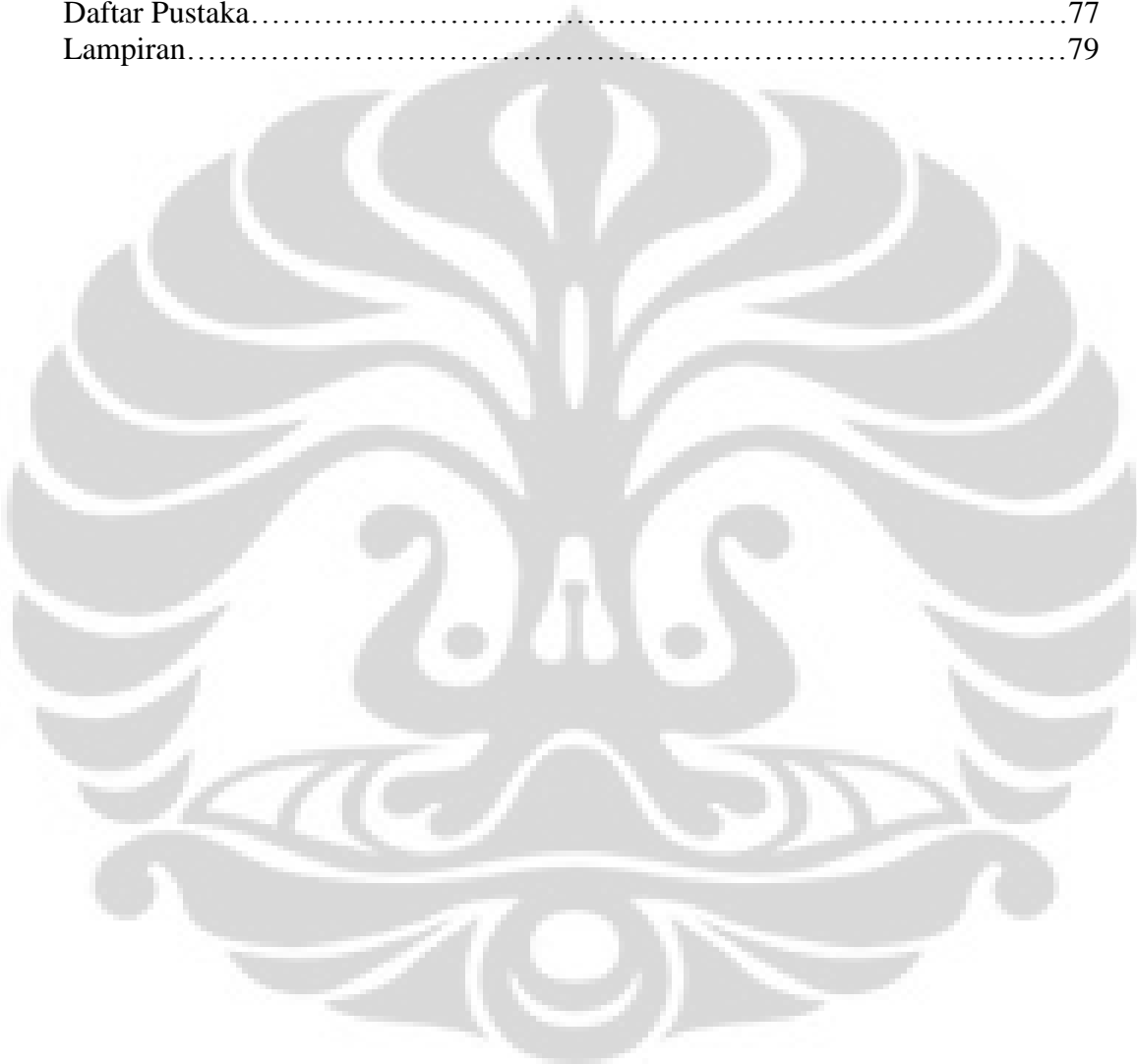
Key words:

Policing, Paramilitary Policing, National Police, Police Resort, Sabhara Unit.

## Daftar Isi

<b>1.</b>	<b>Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
1.1.	Latar Belakang.....	2
1.2.	Permasalahan.....	6
1.3.	Pertanyaan Penelitian.....	7
1.4.	Tujuan Penelitian.....	7
1.5.	Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.6.	signifikansi Penulisan.....	8
<b>2.</b>	<b>Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>10</b>
2.1.	Definisi.....	10
2.1.1.	Polri.....	10
2.1.2.	Pemolisian.....	10
2.1.3.	Paramilitary Policing.....	11
2.1.4.	Sabhara di Tingkat Mabes Polri.....	11
2.1.5.	Sabhara di Tingkat Polda.....	12
2.1.6.	Sabhara di Tingkat Polres.....	12
2.2.	Teori.....	13
2.2.1.	Policing.....	13
2.2.2.	Paramilitary Policing.....	14
2.3.	Kerangka Pemikiran.....	18
2.4.	Pelaksanaan Paramilitary Policing di Indonesia.....	21
<b>3.</b>	<b>Metode Penelitian.....</b>	<b>24</b>
3.1.	Pendekatan dan Metode Penelitian.....	24
3.2.	Sumber Informasi.....	26
3.3.	Tehnik Pengumpulan Data.....	27
3.4.	Tempat riset.....	28
3.5.	Hambatan Penulis.....	29
<b>4.</b>	<b>Karakteristik Polres Bogor Kota dan Polres Metro Jakarta Selatan...30</b>	
4.1.	Polres Bogor Kota.....	30
4.1.1.	Struktur Organisasi.....	31
4.1.2.	Data Gangguan Kamtibmas Polres Bogor Kota.....	32
4.1.3.	Karakteristik Geografis dan Masyarakat Kota Bogor.....	32
4.2.	Polres Metro Jakarta Selatan.....	35
4.2.1.	Struktur Organisasi.....	37
4.2.2.	Data Gangguan Kamtibmas Polres Metro Jakarta Selatan.....	38
4.2.3.	Karakteristik Geografis dan Masyarakat Jakarta Selatan.....	39
<b>5.</b>	<b>Pelaksanaan Paramilitary Policing di Polres Bogor Kota.....</b>	<b>43</b>
5.1.	Satfung Sabhara.....	43
5.2.	Implementasi Tugas: Tata Cara Penanganan Unjuk Rasa.....	43
5.2.1.	Massa HMI Bentok dengan Polisi di Depan Istana Bogor.....	48
5.2.2.	Masjid Ahmadiyah di Bogor di Segel.....	50
<b>6.</b>	<b>Pelaksanaan Paramilitary Policing di Polres Metro Jakarta Selatan...51</b>	
6.1.	Satfung Sabhara.....	51

6.2.	Implementasi Tugas: Tata Cara Penanganan Unjuk Rasa.....	51
6.2.1.	Pengamanan Pelaksanaan Sidang Kasus Abu Bakar Baasyir.....	59
6.2.2.	Pengamanan Pelaksanaan Sidang Bentrok Ampera.....	60
<b>7.</b>	<b>Pembahasan.....</b>	<b>61</b>
<b>8.</b>	<b>Penutup.....</b>	<b>73</b>
8.1.	Kesimpulan.....	73
8.2.	Saran .....	75
	Daftar Pustaka.....	77
	Lampiran.....	79





## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1. 1. Latar Belakang

Polri adalah salah satu aparatur atau alat negara di bidang hukum. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Richardson (1974: ix – x) yang melihat bahwa polisi adalah alat negara atau sebuah departemen pemerintahan yang didirikan untuk memelihara keteraturan sosial dalam masyarakat, menegakkan hukum dan mendeteksi kejahatan serta mencegah terjadinya kejahatan dan memerangi kejahatan. Kemudian di dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Kepolisian RI menyatakan bahwa kepolisian merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pada pasal 13 UU tersebut juga diatur mengenai tugas pokok Kepolisian RI, yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum, dan;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sehingga dalam hal ini Polri lebih berkonsentrasi kepada penanganan masalah-masalah keamanan dalam negeri seperti menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat yang mana intinya untuk memberikan pelayan dan perlindungan dan pengayoman kepada seluruh warga masyarakat.

**Michael Banton (2005; 132)** mengatakan bahwa polisi adalah sebagai agen kontrol sosial dan yang paling utama adalah sebagai aktor utama dalam penegakkan hukum (law

enforcement). Agen kontrol sosial dalam hal ini yaitu sebagai agen yang melakukan kontrol dan pengawasan agar masyarakat bertindak sesuai dengan hukum yang ada dan tidak bertentangan dengan hukum. Sedangkan sebagai agen dalam penegakkan hukum yang mana dalam hal ini polisi dituntut untuk menjaga dan mengawal agar hukum positif yang ada dapat tegak dan dijadikan landasan hidup sehingga keteraturan dan ketertuban masyarakat dapat tetap terjamin.

**Suparlan (1999)** fungsi kepolisian dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegakan hukum, yaitu mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram Dengan kata lain kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan social dari sesuatu masyarakat yang dirasakan sebagai bahan/gangguan yang merugikan para anggota masyarakat tersebut.

Kunarto (1997) mengartikan bahwa tugas pokok Polri yaitu preventif artinya sebagai tugas yang bermakna pembinaan kepada masyarakat agar sadar dan taat pada hukum dan memiliki daya lawan terhadap praktek melanggar hukum atau kejahatan. Pelaksanaan tugas preventif ini dibagi dalam dua kelompok besar:

1. Pencegahan yang bersifat fisik dengan melakukan empat kegiatan pokok, antara lain mengatur, menjaga, mengawal dan patroli.
2. Pencegahan yang bersifat pembinaan dengan melakukan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan, sambung, anjang sana untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah-tangkal atas kejahatan.

Tindakan preventif sebagaimana dikatakan oleh Momo Kelana (2002) , merupakan pelaksanaan fungsi kepolisian yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas. Adapun penanganan secara preventif yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kegiatan kepolisian.

Awaloeddin Jamin (2004) menambahkan satu tipe pencegahan lagi, yakni preemtif. Dalam praktek di lapangan, Polri menyebut istilah preemtif ini sebagai "pembinaan masyarakat" atau "preventif tidak langsung", yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi law abiding citizens (Suparlan, 2004:400) dalam hal ini polisi berbicara tentang penegakan hukum tanpa perlu menyebut hukum dan prosedur penegakan hukum barang sekalipun. Dalam masyarakat sipil yang demokratis, kultur polisi yang tercermin dari fungsinya juga akan sesuai dengan corak masyarakatnya yang sipil dan demokratis. Dengan demikian implementasi dari pelaksanaan fungsi Polri tersebut harus merupakan perwujudan dari sebuah harapan peran yang digantungkan masyarakat kepada polisi untuk menciptakan suasana aman dan menindak kejahatan dan terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja polisi (Meliala, 2006:2).

Dalam pelaksanaannya anggota Polri selain melaksanakan tugas pokoknya seperti yang telah digariskan dalam UU, Polri harus pula memahami dan menghargai nilai-nilai atau budaya-budaya lokal yang masih berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum positif di Indonesia, artinya selama budaya-budaya lokal yang berada di seluruh nusantara ini tidak bertentangan dengan hukum positif Indonesia, maka Polri harus senantiasa menghargai dan memahami budaya tersebut sebagai sebuah keragaman dalam lingkup budaya nasional.

Sebagai konsekuensi dari hal-hal yang diuraikan diatas, maka orientasi polisi untuk menciptakan suatu kondisi keamanan dan ketertiban di masyarakat diperlukan gaya pemolisian yang merupakan hasil adu kekuatan dan kepentingan dalam konteks yang telah direncanakan secara khusus (Findlay, 1993). Masalah pemolisian tersebut merupakan produk dari interaksi antara polisi, corak masyarakat dan kebudayaannya, instansi terkait dan system peradilan pidananya yang saling berkaitan dalam dinamika interaksi yang didorong oleh hubungan kepentingan, kebutuhan dan kekuasaan yang tercermin dalam dominasi gaya pemolisian.

Di negara-negara yang modern dan demokratis saat ini menerapkan community policing sebagai alternative pemolisiannya, yang berorientasi pada masyarakat, dalam memelihara ketertiban, hal ini menjadikan polisi bersama-sama dengan masyarakat sebagai katalisator dan fasilitator untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai masalah didalam masyarakat

berupa mengurangi rasa ketakutan masyarakat akan gangguan kriminalitas, mengedepankan pencegahan kejahatan dan berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (Friedman, 1992).

Model pemolisian yang dikembangkan berupa *community policing* adalah salah satu upaya Polri dalam rangka melakukan reformasi internal dan berupaya menjadi lebih dekat dengan sipil dan meninggalkan ciri militeristik. Namun yang menjadi perdebatan hingga saat ini yaitu apakah model *community policing* yang diklaim sebagai pandangan baru Polri telah terimplemtasi ataukah model *semi military (paramilitary policing)* lebih tampil melekat dan kental dalam tubuh Polri. Perdebatan ini memicu perlunya suatu kajian terhadap keberadaan pemolisian *semi militer (paramilitary policing)* beserta aspek-aspek yang mengikutinya terutama pada tingkat satuan wilayah (Polres). Hal ini terkait dengan masih adanya penangkapan pelaku kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan tindakan kekerasan, kerap terungkap di berbagai media baik media elektronik maupun cetak kemudian senjata yang dimiliki tak jarang digunakan sebagai alat utama melakukan tindakan-tindakan kepolisian. Dalam proses penyidikan masih sering terdengar dan terekspose menggunakan tindakan-tindakan kekerasan dan melanggar hak asasi manusia sehingga terlihat polisi seolah menempatkan pelaku kejahatan sebagai musuh, mengikuti filosofi dan sudut pandang kalangan militer. Selain itu tampak dalam penanganan aksi unjuk rasa , dimana kasus-kasus demonstrasi berakhir dengan kekerasan, baik karena provokasi pelaku demonstrasi maupun karena ketidakmampuan polisi menangani demonstrasi secara persuasif. Hal yang sama terjadi dalam penanganan kasus-kasus seperti terorisme, peredaran narkoba dan berbagai kasus kejahatan lainnya. Keadaan ini diduga akan mengancam implementasi paradigma baru pemolisian, yaitu *community policing*, yang lebih menekankan kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam mengusung prinsip kolaborasi dan konsultasi.

Pelayanan Polri kepada masyarakat seperti dimaksudkan diatas misalnya seperti, penyidikan, pengamanan aksi unjuk rasa , pengungkapan kasus narkoba dan yang lainnya merupakan sebagian dari tugas pokok Polri sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat. Pengamanan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok komponen masyarakat, biasanya dalam pengamanannya dititikberatkan kepada fungsi sabhara dalam hal ini Sat Dalmas.

Fungsi Dalmas dalam pengamanan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa/elemen masyarakat yang mengajukan beberapa tuntutan terhadap subyek sasaran aksi unjuk rasa dilakukan dengan tindakan preventif dan persuasif. Namun apabila kegiatan aksi unjuk rasa sudah menjurus kepada tindakan yang anarkis maka fungsi Dalmas sesuai dengan aturan yang ada diperbolehkan untuk melakukan tindak represif , itu pun harus tetap menghormati hukum yang ada serta menghargai HAM.

Dari data Biro Ops PMJ Subdit Dastik yang ada selama tiga tahun terakhir, aksi unjuk rasa yang paling banyak terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya yaitu terjadi di Polres Metro Jaksel yaitu dengan rincian sebagai berikut:

2008	: 533 aksi unjuk rasa.
2009	: 592 aksi unjuk rasa.
2010	: 880 aksi unjuk rasa.

Ada beberapa kemungkinan kenapa aksi unjuk rasa banyak terjadi di wilayah hukum Polres Metro Jaksel, yaitu diantaranya karena banyaknya objek vital baik kantor pemerintah pusat maupun swasta seperti kedutaan besar orang asing, KPK, Mabes Polri, Kejagung, Kajati, Kajari Jaksel, PLN, BPN, Jamsostek, Telkom, BPH Migas, Menakertrans, Kemenkes, Kedubes Malaysia, Kedubes Australia, Kedubes Suriah , Polda Metro Jaya, Pengadilan Tipikor, Plaza 89, Gedung Parfi, Depkumham dan Telkomsel.serta kediaman para tokoh dan para pejabat yang dijadikan sasaran aksi unjuk rasa yaitu seperti (Arifin C. Panigoro, Nurdin Khalid, Kediaman Duta Besar Malaysia)

Sedangkan Kota Bogor merupakan salah satu daerah penyangga ibu kota negara yang mana implikasi yang terjadi di pusat akan cepat berpengaruh ke daerah seperti Bogor, selain itu bogor merupakan kota wisata dan riset yang tentunya kan semakin menambah heterogenitas jumlah dan komposisi penduduknya . Jumlah aksi unjuk rasa yang terjadi di Bogor tidak sebanyak seperti yang terjadi di Jakarta Selatan, namun aksi unjuk rasa tetap saja ada yang mana biasanya di pusatkan di depan istana bogor dan di depan Kampus IPB, tepatnya di dekat

monumen kujang. Adapun tema yang diangkat biasanya sebagian mengimbangi aksi yang dilakukan di Jakarta.

## 1. 2. Permasalahan

Ketertarikan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu mengacu penelitian sebelumnya mengenai Paramilitary Policing Dalam Pelaksanaan Tugas Satuan-Satuan Fungsi Kepolisian (Studi Di Polres Metro Jakarta Selatan dan Polres Bogor Kota) yang mana hasil telaah konsepsi paramilitary policing dalam penelitian ini mempergunakan 5 unsur paramilitary policing dengan 38 indikator didalamnya. Adapun 5 unsur tersebut adalah atribut-simbol-uniform, sikap dan tindakan, struktur organisasi, peralatan, dan gaya kepemimpinan.

Berdasarkan identifikasi 38 indikator unsur *paramilitary policing* pada Satfung di Polres Bogor Kota, dapat digambarkan bentuk *paramilitary policing* sebagai berikut: Satfung Samapta memiliki 32 indikator, Reskrim memiliki 11 indikator, Bina Mitra memiliki 10 indikator, Narkoba memiliki 9 indikator, Lantas memiliki 19 indikator, dan Intelkam memiliki 7 indikator. Selanjutnya pada Polres Metro Jakarta Selatan dapat digambarkan bentuk *paramilitary policing* sebagai berikut: Satfung Samapta memiliki 32 indikator, Lantas memiliki 19 indikator, Reskrim memiliki 14 indikator, Bina Mitra memiliki 10 indikator, Narkoba memiliki 7 indikator dan Intelkam memiliki 5 indikator.

Bila dibandingkan bentuk *paramilitary policing* dalam pelaksanaan satuan fungsi di Polres Bogor Kota dan Polres Metro Jakarta Selatan, maka dapat dikatakan adanya kesamaan unsur *paramilitary policing* dari satuan Sabhara, berupa unsur-unsur atribut-simbol-uniform, sikap dan tindakan, struktur organisasi, peralatan, dan gaya kepemimpinan padahal karakteristik masyarakat dan budaya di wilayah tersebut berbeda.

### **1. 3. Pertanyaaan Penelitian**

Dari uraian diatas maka pertanyaan penelitian , dalam penelitian ini yaitu :

1. Mengapa terdapat kesamaan unsur paramilitary policing untuk fungsi Sat Sabhara di Polres Metro Jakarta Selatan dan di Polres Bogor Kota ?
2. Apa yang seharusnya dilakukan terkait dengan unsur paramilitary policing di fungsi Sat Sabhara di kedua Polres tersebut ?

### **1. 4. Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hal-hal apa saja yang melatarbelakangi adanya kesamaan unsur paramilitary policing di Polres Metro Jakarta Selatan dengan Polres Bogor Kota khususnya di fungsi sabhara mengingat karakteristik masyarakat dan budaya di wilayah tersebut berbeda.

Fungsi Sabhara adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Fungsi Sabhara bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi kesamaptaan kepolisian/tugas polisi umum dan pengamanan obyek khusus termasuk pengambilan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa dan pemberdayaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Satfung Sabhara terdiri dari urusan administrasi dan ketatausahaan, satuan setingkat kompi atau peleton pengendalian massa, serta sejumlah unit antara lain unit turjawali, unit obvit, dan unit dalmas.

### **1. 5. Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk memudahkan dan menajamkan penelitian ini maka dibutuhkan batasan yang menjadi rambu dalam penelitian agar penelitian dapat lebih terarah dan tepat sasaran.

Diantaranya pembatasan tersebut adalah latar (tempat penelitian berlangsung) dimana dalam hal ini penelitian dilakukan pada yuridiksi Jakarta Selatan dan Kota Bogor.

Pemilihan wilayah Jakarta Selatan mengingat merupakan daerah yang strategis dan memiliki beberapa obyek vital yang sering dijadikan sasaran aksi unjuk rasa, yang mana kegiatan aksi unjuk rasa dalam kegiatan pengamanannya lebih menitikberatkan pada fungsi Sat Sabhara. Sedangkan pemilihan Kota Bogor lebih dilihat pada Kota Bogor sebagai kota penyangga ibu kota negara yang mana kejadian yang muncul di ibu kota negara sudah dipastikan akan berimplikasi kepada wilayah sekitarnya termasuk Bogor. Selain itu Bogor juga termasuk kota wisata dan kota riset yang sudah tentu selain akan menambah heterogenitas jumlah penduduk juga akan memperkaya karakteristik budaya setempat.

#### **1. 6. Signifikansi Penulisan**

Penelitian ini dilakukan mengacu kepada hasil penelitian hibah riset pasca sarjana tahun 2011 mengenai Paramilitary Policing Dalam Pelaksanaan Tugas Satuan-Satuan Fungsi Kepolisian (Studi Di Polres Metro Jakarta Selatan dan Polres Bogor Kota) yang mana hasil telaah konsepsi paramilitary policing dalam penelitian ini mempergunakan 5 unsur paramilitary policing dengan 38 indikator didalamnya. Adapun 5 unsur tersebut adalah atribut-simbol-uniform, sikap dan tindakan, struktur organisasi, peralatan, dan gaya kepemimpinan. Bila dibandingkan bentuk *paramilitary policing* dalam pelaksanaan satuan fungsi di Polres Bogor Kota dan Polres Metro Jakarta Selatan, maka dapat dikatakan adanya kesamaan unsur *paramilitary policing* dari satuan Sabhara, berupa unsur-unsur atribut-simbol-uniform, sikap dan tindakan, struktur organisasi, peralatan, dan gaya kepemimpinan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengapa terdapat kesamaan unsur paramilitary pada satuan fungsi Sabhara yang terjadi di Polres Bogor Kota dan di Polres Metro Jakarta Selatan padahal karakteristik masyarakat dikota tersebut berbeda, selain itu pada



penelitian ini juga akan diberikan ilustrasi kasus bagaimana Polres di 2 (dua) wilayah tersebut menangani aksi unjuk rasa dalam hal penanganannya dilihat dari sikap dan tindakan anggota Polri sebagai bagian dari pelaksanaan paramilitary policing.

Selain itu penelitian ini akan memberikan kontribusi yang konstruktif bagi pemerintah/khususnya Polri, yang mana meskipun ditenggarai bahwa karakteristik wilayah berbeda-beda tetapi aplikasi unsur paramilitary policing yang dilakukan oleh fungsi sabhara khususnya dalam pengamanan aksi unjuk rasa tetap sama.



## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, akan dilakukan tinjauan dari berbagai sumber yang berupa konsep – konsep, teori-teori, dan atau hasil penelitian yang memiliki relevansi atau hubungan dengan permasalahan penelitian yang akan dilaksanakan dengan tujuan untuk dijadikan sebagai acuan, kesamaan, pengertian dan batasan konsep sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian yang ada. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan sebuah hasil penelitian yang cukup representative sehingga dapat dijadikan pedoman atau penambahan wawasan untuk tujuan akademis terutama dalam mengetahui hal-hal yang mendasari terdapatnya kesamaan unsure paramilitary policing pada dua wilayah yang memiliki karekteristik yang berbeda.

#### 2. 1. Definisi

##### 2.1.1 Polri

Polri berdasarkan UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Merupakan perangkat lembaga pemerintah non departemen yang langsung berada dibawah presiden dan dipimpin langsung oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) , bersifat otonom dan mandiri dengan tugas pokok yaitu memberikan pelayanan, perlindungan serta pengayoman terhadap masyarakat dan melakukan penegakkan hukum.

##### 2.1.2 Pemolisian

Menurut **Hale , Chris (2005; 510)**, pemolisian secara umum ditujukan guna menjaga kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, dan moral umum masyarakat, mempertahankan ketertiban sosial dalam komunitas dan melindungi kebebasan sipil

masyarakat. Ruang lingkup pemolisian juga mencakup, menyelesaikan masalah kejahatan, menegakkan peraturan lalu-lintas, narkoba, senjata api, menjalankan patroli rutin dan bekerja sama dengan komunitas dalam mencegah segala bentuk kejahatan.

### **2.1.3 Paramilitary Policing**

Paramilitary policing adalah suatu gaya (style) pemolisian dengan pendekatan kemiliteran terhadap penegakkan hukum dan mempunyai struktur lebih hirarkis dalam mengorganisasi respon polisi. Selain itu gaya pemolisiannya lebih bersifat reaktif dan kental dengan penggunaan kekuatan.

Menurut **Jack R. Greene** dalam *The Encyclopedia of Police Science* (2007;790) pendekatan kemiliteran yang dilakukan oleh pihak kepolisian mengandung 4 (empat) indicator yaitu :

1. Kultur/budaya ( misalnya, dalam bertindak dan sifat serta perbuatan yang terkesan militer).
2. Organisasi ( perintah dan pengawasan yang terpusat)
3. Operasional (aktivitas dan kegiatan dengan pendekatan militer, seperti penggunaan aparat intelijen dan dalam penanganan masalah selalu menekankan resiko yang tinggi).
4. Material (penggunaan senjata dan tehnologi canggih).

### **2.1.4 Sabhara di Tingkat Mabes Polri**

Sabhara di tingkat Pusat atau Mabes Polri di kepalai oleh seorang Direktur Sabhara dengan pangkat Bintang Dua dan langsung bertanggungjawab kepada Kabaharkam yang dijabat oleh seorang Bintang Tiga. Tingkat Mabes pada intinya

hanya memberikan pembinaan terhadap fungsi terkait yaitu fungsi Sabhara di tingkat Polda.

### **2.1.5 Sabhara di Tingkat Polda**

Sedangkan fungsi Sabhara di tingkat Polda dipimpin oleh seorang direktur berpangkat Kombes yang langsung bertanggungjawab terhadap Kapolda, adapun fungsi sabhara di tingkat Polda hamper sama dengan tingkat Mabes yaitu hanya memberikan sebatas pembinaan terhadap fungsi terkait dibawahnya yaitu dalam hal ini tingkat Polres, namun untuk Direktorat Sabhara Polda Metro Jaya berbeda dengan Direktorat Sabahara di Polda- Polda lainnya, mengingat khusus untuk di Polda Metro Jaya Direktorat Sabharanya bersifat operasional.

### **2.1.6 Sabhara di Tingkat Polres**

Fungsi Sabhara adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Fungsi Sabhara bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi kesamaptaan kepolisian/tugas polisi umum dan pengamanan obyek khusus termasuk pengambilan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa, patrol kendaraan bermotor baik dengan roda dua maupun roda empat dan pemberdayaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ditingkat Polres Sat Sabhara dipimpin oleh seorang Kasat Sabhara yang langsung bertanggung jawab kepada Kapolres.

Organisasi Polres disusun sebagai berikut, Kapolres; Wakapolres. Bagops; Bagsumda; Seksi Pengawasan disingkat Siwas; Seksi Pertanggung jawaban Profesi dan Pengamanan Internal disingkat Sipropam; Seksi Keuangan disingkat Sikeu; Seksi Umum, disingkat Sium.: SPKT; Satintelkam; Satreskrim; Satuan Narkoba disingkat

Satnarkoba; Satuan Pembinaan Masyarakat disingkat Satbinmas; Satsabhara; Satlantas; Satuan Pengamanan Obyek Vital disingkat Satpamobvit;

## 2. 2. Teori

### 2.2.1 Policing

Kemampuan atau ketidakmampuan polisi dalam menjalankan tugasnya tergantung gaya kepolisian (policing style) yang dijalankan. Secara umum model pemolisian (policing style) dibagi kedalam 2 (dua) gaya kepolisian universal yaitu model tradisional dan modern.

Seharusnya peran utama yang dilakukan oleh polisi dalam kehidupan modern adalah peran sebagai penjaga kemanan dan ketertiban, penegakkan hukum sekaligus pemicu produktivitas masyarakat. Polisi modern tidak sekedar menjadi stabilisator keamanan dan ketertiban, namun juga sebagai aktor, motivator dan sekaligus katalisator dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Sutanto: 2005).

**Samuel Walker (1996 : 1-18)** menjelaskan ada 3 (tiga) elemen dalam modern policing, yaitu misi, strategi dan struktur organisasi. Misi polisi adalah crime prevention yaitu pencegahan kejahatan dengan menggunakan strategi patroli selektif dan pengaturan ini harus melalui struktur organisasi yang benar. **(David Bailey, 1996: 585-606)** mengatakan bahwa ciri utama dari modern policing yaitu public, specialized and profesional. Public dalam arti mentrasfer tanggung jawab untuk keselamatan publik, specialized yaitu misi polisi dalam law enforcement dan crime prevention sedangkan profesional yaitu bekerja full-time sebagai pekerja yang dibayar (paid employees).

Lebih jelasnya tradisional policing memiliki tekanan utama pada tindakan yang bersifat reaktif (reactive policing), sejenis pemolisian ala pemadam kebakaran dan pemolisian militer (paramilitary policing), sedangkan

modern policing tekanan utama pada penuntasan masalah (problem solving policing), orientasi pada pelayanan publik dan mengandalkan sumber daya publik (resource based policing).

### 2.2.2 Paramilitary Policing

*Summerfield (2006)* menguraikan *paramilitary policing* sering ditempatkan dalam posisi bertolak belakang dengan *community policing*, bahkan model *paramilitary* dengan *community policing* tidak kompatibel (cocok), tidak dapat bersifat komplementer (saling menggantikan). Menurut Summerfield, satu ciri utama yang membuat keduanya bertolak belakang adalah sifat *community policing* yang adaptif terhadap perubahan, dimana *community policing* memerlukan komunikasi intensif dengan pihak-pihak lain di luar organisasi kepolisian, menuntut personil kepolisian mengembangkan kemampuan interpersonal dan interaksi. Sementara sifat ini tidak dimiliki oleh *paramilitary policing*, dalam struktur birokratis paramiliter kepolisian, komunikasi tidak bebas dan terbuka, terlebih untuk berinteraksi dengan pihak-pihak lain di luar organisasi kepolisian.

Sesuai namanya, *paramilitary policing* seringkali disamakan dengan *quasy-military policing* atau pemolisian semi-militer. **Browling dkk , 2004 :** 6) dalam artikel *Policing and Human Rights* menguraikan bahwa polisi adalah satu satu institusi pemerintah yang penting dan *powerful*. Petugas polisi memegang kekuatan koersif kedua setelah pihak militer, tapi sangat kontras dengan tentara (*soldier*). Polisi menampilkan 2 bagian yaitu di satu sisi memperlihatkan manifestasi kekuasaan negara yang nyata, di sisi lain menjadi lembaga yang berinteraksi sehari-hari dengan masyarakat sipil (*civil society*). (**David Bailey, 1998**) menegaskan polisi adalah *to government as the edge is to the knife*.. Polisi bersama tentara dalam beberapa situasi memegang

monopoli penggunaan sanksi negara atas kekerasan terhadap warga negara. Mereka diberi wewenang untuk memegang senjata (*arms*) dan dalam situasi tertentu untuk menembak (membunuh). Petugas polisi secara rutin dibatasi oleh paksaan (*force*), melakukan pencarian orang, rumah dan milik mereka, melakukan pengawasan diam-diam terhadap kehidupan pribadi orang-orang yang dicurigai, terlibat atau bermaksud kriminal.

**Browling, et.al, (2004)** dalam model militer, polisi dilihat sebagai agen sentral atau pemerintah lokal daripada agen hukum. Kontrol sosial didasarkan atas paksaan dibandingkan kesepakatan, dan kekuatan (*force*) siap digunakan, terkadang menjadi alat utama. Kemahiran dan penggunaan persenjataan (senjata api, gas water-canon dan peralatan militer), penggunaan bahasa-bahasa dan simbolisme militer, pemeriksaan rahasia dan tindakan intelejen terhadap komunitas dicurigai, disikapi sebagai musuh. Itu semua menjadi bagian integral dari apa yang disebut *paramilitary police forces* Beberapa kekuatan (*force*) dipisahkan dari populasi lokal dan ditentukan oleh suatu *alien rule* (Brewer: 1994). Polisi dibawah kontrol langsung pemerintah dan partisan dalam menegakkan aturan rejim politik tertentu., termasuk dikelilingi kebijakan-kebijakan diskriminasi.

**O'Connor** mengemukakan bahwa organisasi kepolisian memiliki sifat supra, hirarkis dan birokrasi kuasi-militer (Summerfield, 2006). Antara sifat birokratis dengan sifat kuasi-militer dalam beberapa hal terdapat kesamaan yaitu terdapat pembagian kerja melalui spesialisasi fungsional, hirarki dan otoritas yang terdefinisikan dengan baik, terdapat sistem peraturan tugas-tugas dan hak-hak personil, sistem prosedur untuk situasi pekerjaan, relasi antar manusia yang impersonal, promosi dan seleksi berdasarkan kompetensi. Tetapi model kuasi-militer mempunyai karakteristik unik yaitu struktur komando tersentralisasi, pembedaan yang ketat antar kepangkatan, kesamaan terminologi dengan militer, selalu menggunakan komando dan perintah,

penerapan peraturan dan disiplin yang kuat, pengurangan kreativitas individual, perlawanan sistim terhadap perubahan.

Paramilitary policing dicirikan suatu pendekatan authoritarian atau militeristik terhadap penegakan hukum dan mempunyai struktur lebih hirarkis dalam mengorganisasi respon polisi (*Bull & strata, 1994; 237-249*). Sementara *Waddington (1993)* menambahkan ada koordinasi melalui perintah dan kontrol yang superior. Sedangkan *Jefferson (1990)* memilih menyebutkannya sebagai aplikasi dari pelatihan, peralatan, filosofi dan organisasi kuasi-militer terhadap persoalan-persoalan *policing*. Nilai-nilai dari model policing ini menekankan pentingnya keteraturan publik. Hukum ditegakkan dalam menjaga kehormatannya dan mencegah adanya pelanggaran terhadapnya.

Dalam kaitan pola nilai ini, ada konsep lain yang mengikuti yaitu *militarism*, terdiri dari kepercayaan-kepercayaan yang mendasari kekuasaan, dominasi dan penggunaan kekuatan dimana penyiksaan, kekerasan ekstrajudisial, pembunuhan menjadi sah dan bahkan diperlukan. Seperti suatu kebudayaan, menurut *Mendes (1999)*, menampilkan penghormatan yang rendah bagi institusi-institusi kemasyarakatan dalam menegakkan hukum dan menjalankan proses peradilan pidana secara benar. Kebanyakan literatur sosiologis dari *Mendes* dan juga *Bittner* telah membawa bahaya bahwa polisi menjadi suatu pekerjaan yang ternoda sejak kekuatan polisi yang dimiliterisasi menunjukkan pandangan bahwa mereka yang ditertibkan merupakan musuh yang harus dilawan dan dihadapi seolah dalam peperangan yang nyata.

Ini adalah suatu kecenderungan menggunakan kekerasan, seringkali dalam bentuk maksimum, dalam kaitan kepada pilihan-lembut (soft-option) (*Kraska & Kappeler, 1997 ; 1-18*). Dimata publik kehadiran polisi seperti tentara mendorong provokasi dibandingkan menciptakan situasi yang



bersahabat. Persoalan legitimasi polisi menjadi problematik ketika model *policing* ini menjadi pilihan pimpinan utama pihak kepolisian.

Polri adalah unik saat mana mereka adalah bagian dari militer sebaik perpanjangan tangan pihak pemerintah. Sejak polisi bergabung dengan militer dan menjalankan suatu model *paramilitary policing*, maka Polri dihadapkan pada 3 masalah yaitu 1. kelemahan utama sebagai penegak hukum, 2/ kualitas *policing* yang rendah dan 3. hubungan polisi dan masyarakat yang tidak sehat  
**(Adrianus: 2001)**

*Paramilitary policing* substansinya tidak selamanya buruk karena meningkatkan disiplin dan suatu kesatuan komando pada personel kepolisian dalam menghadapi ketidakstabilan yang terjadi di Indonesia era post-suharto. Diharapkan Polri dapat memperluas kepada pendekatan yang berorientasi komunitas menjawab berbagai sikap negatif yang menghambat kinerja polisi sejauh ini.

**Bayley (1998)** mengatakan kegiatan kepolisian tidak boleh lagi dimaknai sebagai suatu peperangan atau didominasi kekuatan yang direncanakan oleh pangkat senior dan dilakukan oleh tentara yang tugas utamanya adalah patuh. Filosofi yang tertera dalam topik kebesaran POLRI Rastra Sewakottama yang berarti abdi utama dari negara dan bangsa harus benar-benar dicerminkan. Polisi harus netral dan tidak boleh terjerumus menjadi abdi penguasa dan pihak yang kuat.

Tantangan bagi institusi kepolisian adalah bagaimana menyesuaikan struktur pengelolaan kepolisian agar dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Efektifitas struktur organisasi polisi dalam melayani kebutuhan masyarakat telah bergerak dari bentuk birokrasi ke bentuk pasar (market), harga & kompetisi dan jaringan (network), diplomasi, kepercayaan dan resiprositas. Dalam struktur pengelolaan birokrasi organisasi kepolisian berbentuk otoritarian, garis komando para-militer, peraturan organisasi yang

ketat, penekanan pada komunikasi internal dan vertikal, lebih menekankan kepatuhan dibandingkan inisiatif, pengambilan keputusan jarang dilakukan secara partisipatif dalam garis kepangkatan, kurang berorientasi pada pelayanan masyarakat.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Tugas polisi secara universal adalah *to serve and to protect*, Polisi terhadap masyarakat harus memberikan perlindungan, pelayanan dan pengayoman selain itu polisi juga harus dapat menjaga situasi Kamtibmas serta penegakkan hukum. Fungsi polisi tersebut diatas sebenarnya sudah merepresentasikan tugas pokok Polri sebagai mana tertulis didalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri.

Dalam pelaksanaan tugasnya Polri selalu dihadapkan kepada permasalahan-permasalahan yang berada di masyarakat misalnya saja kasus teroris, narkoba, pencurian, demonstrasi yang berujung kerusakan yang bersikap anarkis dan destruktif, pembunuhan, penggelapan dan bahkan korupsi. Sekali lagi mau tidak mau Polri harus bahu membahu untuk menegakkan hukum demi terjaminnya aktivitas masyarakat serta terdapatnya perlindungan sehingga situasi Kamtibmas tetap aman dan terkendali.

Dalam pelaksanaan tugasnya Polres menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. pemberian pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang b. intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian baik sebagai bagian kegiatan satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri, c. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil; d. pembinaan masyarakat, yang meliputi Perpolisian Masyarakat dan pembinaan/pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan

perundang-undangan, e. sabhara kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli, pengaturan, penjagaan dan pengawalan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan obyek vital yang meliputi VIP, pariwisata dan obyek vital lain, dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan Kamtibmas, f. lalulintas kepolisian, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalulintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalulintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas.

Fungsi Sabhara dengan tugas pokok sebagai menyelenggarakan dan membina fungsi kesamaptan kepolisian/tugas polisi umum dan pengamanan obyek khusus termasuk pengambilan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa dan pemberdayaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

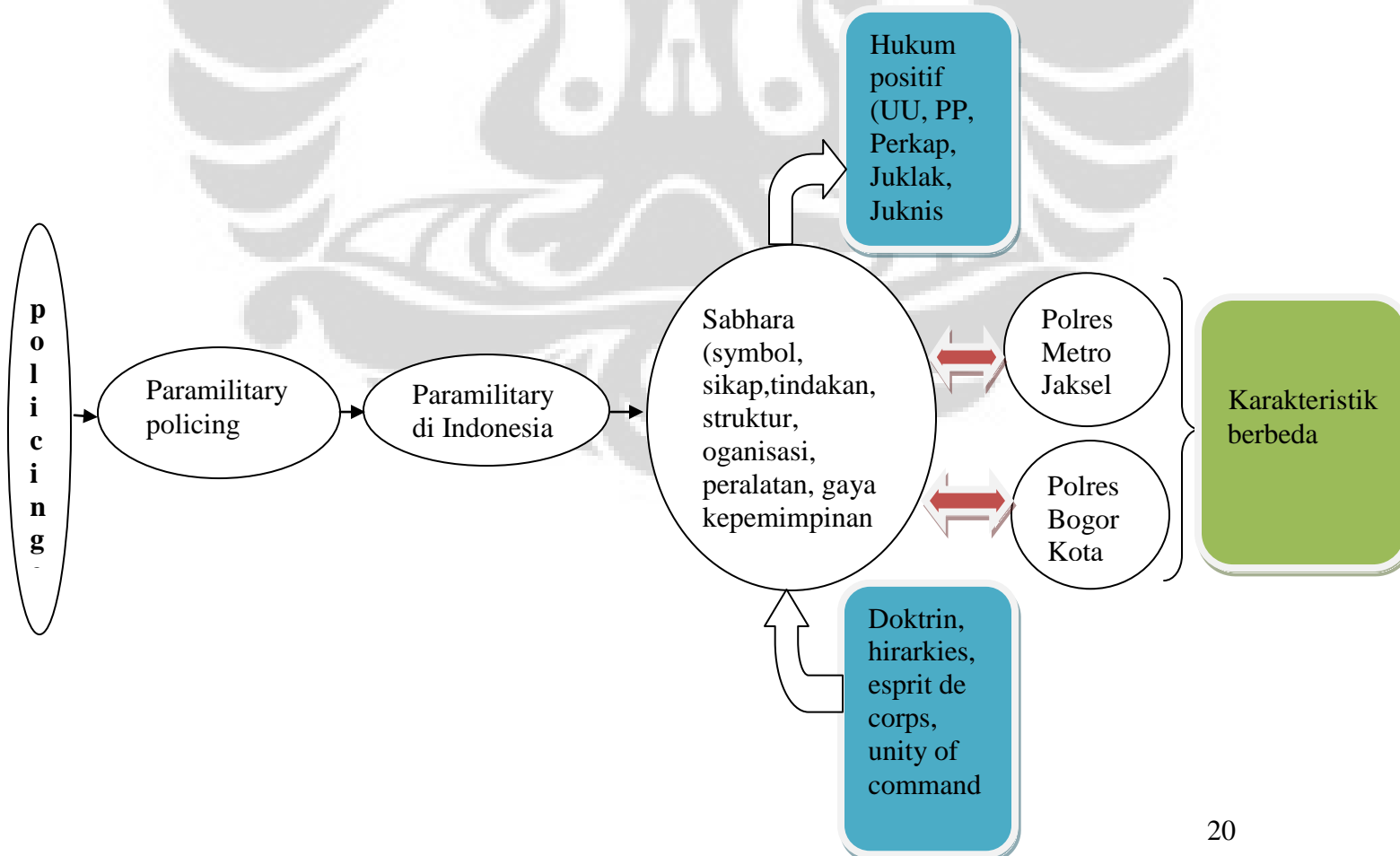
Dalam pelaksanaannya tugas dan fungsi sabhara selalu tidak bebas artinya dalam melakukan kegiaitan ada ada prsosedur dan aturan yang harus dipatuhi, sehingga didalam pelaksanaan tugasnya tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan sendiri-sendiri, misalnya saja pada pelaksanaan dan penanganan aksi unjuk rasa. Pada penanganan aksi unjuk rasa terkadang polisi melakukan tindakan kekerasan seperti memukul, menggunakan peluru karet, gas gun dan water canon. Selain itu polisi dalam menunjang pelaksanaan tugasnya masih menggunakan symbol-simbol militer, seperti penggunaan baret, sepatu laras, penggunaan senjata serta seragam yang penuh dengan atribut.

Selain itu dalam sikap dan tindakan yang memberikan penghormatan dan cara penghormatan kepada atasan dengan memanggil komandan, struktur organisasi yang jelas dan adanya hirarki komando dan kepangkatan, peralatan seperti penggunaan tongkat, senjata, water canon, dan gaya kepemimpinan yang lebih menekankan kepada loyalitas dan satu komando atau unity of command, telah menunjukkan bahwa polisi khususnya sat

sabhara masih menggunakan pendekatan militer (paramilitary policing) dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat.

Kemudian apabila dibandingkan bentuk *paramilitary policing* dalam pelaksanaan satuan fungsi di Polres Bogor Kota dan Polres Metro Jakarta Selatan di penelitian sebelumnya, maka dapat dikatakan adanya kesamaan unsur *paramilitary policing* dari satuan Sabhara, berupa unsur-unsur atribut-simbol-uniform, sikap dan tindakan, struktur organisasi, peralatan, dan gaya kepemimpinan. Padahal diantara ke dua kota tersebut yaitu Jakarta Selatan dan Kota Bogor memiliki karakteristik masyarakat yang berbeda dilihat dari letak geografis, jumlah penduduk serta sumber daya alam dan manusia (Tri Gatra) dan berbeda juga di lihat dari unsur ideologi, politik, ekonomi sosial budaya dan keamanan (Panca Gatra). Oleh karena itu untuk menjawab pertanyaan penelitian diatas, maka penulis akan memberikan suatu gambaran/ berupa glukonah untuk menjawabnya.

Tabel 1.1  
Kerangka pemikiran



## II. 4. Pelaksanaan Paramilitary Policing di Polri

Setiap negara mempunyai sejarah kepolisian yang berbeda-beda begitu pula dengan Indonesia. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa Polri tadinya merupakan bagian dari angkatan bersenjata, sehingga ada konflik nilai diantara kerja polisi dan aktivitas militer terkait dengan perang. Sebagai bagian dari militer, seorang tentara dilatih untuk membunuh mencegah agar tidak terbunuh, tetapi polisi diharuskan menggunakan kekerasan secara minimum karena penggunaan kekerasan yang berlebihan dapat mengarah pada persoalan hukum.

Reformasi polisi yang ideal harus mengacu suatu pada tiga orientasi utama, yaitu prinsip demokrasi, *rule of law*, dan hak asasi manusia. Prinsip *democratic oversight* menegaskan bahwa dalam menjalankan peran dan fungsinya, polisi harus menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsif, kontrol institusi demokratik yang merupakan representasi kepentingan publik, dan membuka partisipasi masyarakat luas. (Senior Police Adviser to the OSCE Secretary General, *Guidebook on Democratic Policing*, OSCE, 2006). Dalam konteks *democratic policing* paling tidak terdiri dari enam pilar yang saling bergantung, yaitu; kontrol internal institusi keamanan (kepolisian) bersangkutan, kontrol pemerintah/eksekutif, pengawasan parlemen, *judicial review*, dan pengawasan masyarakat sipil (*civil society oversight*). (OECD DAC, *OECD DAC Handbook on Security System Reform; Supporting Security and Justice*, 2007). *Democratic policing* ini mengandaikan adanya suatu sistem akuntabilitas polisi berlapis dengan melibatkan aktor-aktor yang beragam (eksekutif, legislatif, yudikatif, komisi-komisi formal independen, media, dan organisasi masyarakat sipil lainnya) sebagai komplemen dari mekanisme internal kepolisian.

Hal ini menjadi salah satu persoalan munculnya sinisme terhadap institusi dan profesi Polri bahwa Polri adalah sayap dari militer. (adrianus: 2001) Saat ini secara formal polisi telah berpisah dengan militer (ABRI) tapi sikap dan tata cara militer masih tampak menonjol dipergunakan, terlepas dari masa historis Polri, secara riil, seringkali terdengar

ulasan media massa, polisi menindak pelanggar (lalu lintas) tanpa memilih alternatif lebih baik, polisi melakukan penindakan lalu mengajak damai, polisi main hakim sendiri, polisi main tembak membabi buta, polisi brutal, polisi pelanggar hukum, polisi pencari kesalahan masyarakat, dan seterusnya. Berbagai gambaran ini, dapat dikatakan kasuistik, tapi sedikitnya menampilkan gaya pemolisian lama, tampaknya Polri masih cenderung menggunakan gaya *tradisional policing* (KIK: 2003)

Masih dijalankannya *traditional policing*, seringkali dikaitkan dengan sejarah Kepolisian Indonesia yang tidak bisa begitu saja lepas dari militer, sehingga ciri *paramilitary policing* masih kuat. Sikap atau perilaku yang berorientasi pada *paramilitary policing* seperti atasan tidak pernah salah, harus selalu mengatakan siap setiap kali di beri perintah, tidak ada keberanian untuk menolak perintah, bawahan harus menjalankan segala perintah walaupun salah bahkan melanggar hukum, bawahan memenuhi perintah karena takut dianggap membangkang dan tak mampu, akibatnya masyarakat menjadi obyek sapi perahan ditakut-takuti jika tidak membantu, *Paramilitary policing* merupakan tampilan gaya *policing* berbau militeristik.

Pada hakekatnya fungsi polisi di dunia dibagi tiga yaitu ketertiban, legalitas dan keadilan. Tugas polisi yang paling dasar inipun sudah mengandung benih konflik. Dalam memerankan fungsinya sebagai penegak hukum atau keadilan, ada kalanya polisi harus menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan. Tetapi tindakan kekerasan dan pemaksaan ini mungkin justru akan mengganggu ketertiban, karena adanya kemungkinan pihak-pihak lain yang tidak terkait dengan kasus itu ikut terlibat atau menjadi korban. Kepolisan dimanapun di dunia ini mempunyai kemiripan dengan angkatan perang (militer), kepolisian harus dijalankan dengan organisasi dan disiplin militer sehingga polisi sama dengan militer dalam arti memakai pakaian seragam, menggunakan tanda pangkat, menerapkan komando militer dan bersenjata, tapi polisi berbeda dengan militer karena polisi: 1. Bertugas melayani masyarakat bukan perang melawan musuh, 2. Melindungi hak-hak masyarakat berdasarkan hukum bukan menyerang dan menghancurkan. 3. Bisa memberi pelayanan atas permintaan perorangan, tidak harus atas

kepentingan negara atau keamanan masyarakat secara luas saja. 4. Bisa bertindak secara perorangan, tidak harus sel;alu beroperasi sebagai kesatuan pasukan. (Sarlito W: 1996).

Kegagalan untuk membedakan tugas kepolisian dari fungsi militer menimbulkan peran konflik yang pada gilirannya akan menyebabkan beban mental pada kepolisian dan citra negatif pada masyarakat. Kritik pada kepolisian yang terlalu menekankan sistem kemiliteran adalah timbulnya moral yang rendah dan sistem kepangkatan yang kaku, padahal kepolisian membutuhkan sikap yang menghargai demokrasi dan partisipasi, baik dari masyarakat maupun teman sejawat.

Dalam praktek sikap ini menimbulkan berbagai perilaku petugas polisi yang melecehkan hak-hak perorangan anggota masyarakat yang pada gilirannya sangat mempengaruhi timbulnya citra negatif pada Polri. Sementara itu Polri harus menghadapi perkembangan dunia yang semakin rumit dan penting antara lain perubahan dari negara bangsa ke jaringan (network), pengaturan oleh pemerintah ke mekanisme pasar, dari desa ke kota besar, dari padat karya ke teknologi tinggi, dari dominasi laki-laki ke kebangkitan perempuan. Anggota-anggota masyarakat yang dilayani pun semakin tinggi taraf pemikirannya dan semakin kritis karena peningkatan pesat teknologi media massa. Informasi-informasi sangat cepat tersebar luas melalui berbagai jalur media massa, sehingga makin banyak anggota masyarakat yang tahu hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang pada gilirannya menyebabkan polisi makin kesulitan untuk melayaninya. (Sarlito W: 1996).

Kekurangmampuan polisi dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat dan dalam memerangi tindak kejahatan disebabkan oleh banyak faktor pertama, resources, (sumber daya) baik sumber daya keuangan maupun sumber daya manusia, dana operasional yang minim, kemampuan penguasaan iptek, kemampuan rekrutmen, penempatan anggota Polri. Pembagian fungsi di kepolisian masih jauh dari seharusnya, Kelima fungsi kepolisian yaitu shabara, bimmas, lintas, intelejen dan reserse, masih belum optimal, padahal spesialisasi dan keahlian polisi menjadi tolak ukur kemampuan professional polisi.

Dari uraian tersebut diatas maka peneliti akan menguraikan hipotesa kerja sebagai berikut bahwa dengan adanya pelaksanaan paramilitary policing di tubuh Polri dapat meningkatkan pelayanan dalam pengamanan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekelompok elemen masyarakat.





## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan mengungkap hal-hal apa saja yang melatarbelakangi adanya kesamaan unsur paramilitary policing di Polres Metro Jakarta Selatan dengan Polres Bogor Kota khususnya di fungsi sabhara padahal dilihat dari karakteristik masyarakat dan budaya di wilayah tersebut berbeda. Karena itu penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, observasi, dan wawancara mendalam

Studi literatur akan dilakukan untuk menggali data-data tentang berbagai kebijakan strategi organisasi dan operasional Polri, dengan cara mengkaji strategi jangka panjang, menengah dan pendek, berbagai juklak dan juknis serta skeep Kapolri dan kebijakan tertulis dibawahnya, serta mengkaji berbagai tindakan kepolisian yang terekam media massa cetak dan elektronik.

#### **3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian**

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan penyajian data bersifat deskriptif guna menjelaskan thesis mengenai mengapa terdapat kesamaan unsur paramilitary policing di Jakarta Selatan dan di Kota Bogor padahal karakteristik dan budayanya berbeda. Pendekatan kualitatif merupakan proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan penciptaan gambaran holistik ‘menyeluruh’ yang dibentuk dengan kata-kata, laporan pandangan informasi secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar alamiah. Creswell juga mengatakan bahwa penelitian kualitatif menginginkan hasil holistik mengenai objek yang diteliti. (John W. Creswell, 2002: 1).

Dalam penelitian kualitatif, penelitian tidak memulai dengan sebuah teori untuk menguji atau membuktikan suatu objek penelitian. Sebaliknya, dalam pendekatan kualitatif sesuai dengan model induktif pemikiran, sebuah teori dapat muncul selama pengumpulan data dan tahap-tahap

analisis penelitian, atau sebuah teori akan digunakan dalam proses penelitian sebagai dasar perbandingan dengan teori lain. (Lexi J. Moeloeng, 2004: 1)

Farouk Muhammad dan Djaali mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian eksploratif yang mempunyai proses yang lain daripada penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif data merupakan sumber teori atau teori berdasarkan data. Kategori-kategori dan konsep-konsep dikembangkan oleh peneliti di lapangan. Data lapangan dapat dimanfaatkan untuk verifikasi teori yang timbul di lapangan, dan terus-menerus disempurnakan selama proses penelitian berlangsung yang dilakukan secara berulang-ulang. (Farouk Muhammad dan Djaali, 2003: 100).

Hal ini sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman (1988) seperti dikutip Tjetjep Rohendi Rohidi, yang menyebutkan bahwa keunggulan data kualitatif adalah :

Pertama, dapat mengikuti alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat. Kedua, dapat membimbing kita memperoleh penemuan-penemuan yang tak terduga sebelumnya. Ketiga, kata-kata yang disusun dalam bentuk cerita atau peristiwa dapat memberikan kesan yang lebih hidup, nyata dan penuh makna, jauh lebih meyakinkan daripada hasil penelitian yang penuh dengan angka-angka. (Tjetjep Rohendi Rohidi, 1992: 2).

Berdasarkan keterangan di atas, pengamatan obyek penelitian dilakukan secara menyeluruh untuk memahami obyek yang diteliti. Dengan demikian penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus atau mengacu penelitian sebelumnya yaitu hasil penelitian hibah riset pasca sarjana tahun 2011 mengenai Paramilitary Policing Dalam Pelaksanaan Tugas Satuan-Satuan Fungsi Kepolisian (Studi Di Polres Metro Jakarta Selatan dan Polres Bogor Kota).

Pengertian metode penelitian sendiri menurut *Sanafiah Faisal* adalah “metode sistematis untuk memperoleh pengetahuan, suatu alat untuk memperoleh pengertian tentang dunia yang masih belum seberapa dipahami dan dimengerti”. (Sanafiah Faisal, 1990: 88). Sementara metode penelitian studi kasus sendiri penulis pilih mengingat dengan metode ini akan didapatkan

gambaran nyata dari obyek penelitian. Selain itu, seperti pendapat yang diajukan oleh Lexi M. Moleong bahwa “studi kasus merupakan metode yang secara epistemologis sesuai dengan pengalaman pembaca dan bagi para peneliti kasus merupakan dasar alamiah untuk generalisasi”.  
(Lexi J. Moeloeng, 2004: 6).

Menurut *Burhan Bungin (2004: 22-23)*, terdapat 3 (tiga) keunggulan penelitian dengan metode penelitian studi kasus. Pertama, studi kasus dapat memberikan informasi penting mengenai hubungan antar variabel-variabel serta proses-proses yang memerlukan penjelasan dan pemahaman yang lebih luas. Kedua, studi kasus memberikan kesempatan untuk memperoleh wawasan mengenai konsep-konsep dasar perilaku manusia yang tidak diduga sebelumnya. Ketiga, studi kasus dapat menyajikan data-data dan temuan-temuan yang sangat berguna sebagai dasar untuk membangun latar permasalahan bagi perencanaan penelitian yang lebih besar dan mendalam dalam rangka pengembangan keilmuan.

### **3.2 Sumber Informasi**

Informasi atau data sebenarnya dapat diperoleh melalui sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.(Sugiyono, 2005: 62), Hal ini sesuai dengan pendapat Lofland dan Lofland (1984), seperti yang dikutip oleh Lexi J. Moleong (2004: 157) bahwa “sumber utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti akan berhadapan langsung dengan obyek yang diteliti sehingga akan terbentang kenyataan-kenyataan yang sebenarnya dan data yang didapat selain dari berbagai sumber juga diperoleh dari sumber-sumber langsung yang mengalami atau mengetahuinya.

Adapun sumber informasi yang akan dijadikan obyek penelitian yaitu diantara sumber utama, sumber pendukung dan tambahan . Sumber utama yaitu : Kapolres Kota Bogor, Kapolres

Metro Jaksel , sumber pendukung yaitu Kasat Sabhara Kota Bogor, Kasat Sabhara Polres Metro Jaksel dan sumber tambahan yaitu 2 (dua) anggota Sabhara Polres Kota Bogor, dan 2 (dua) anggota Sabhara Polres Metro Jakarta Selatan.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menurut M. Iqbal Hasan adalah “pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang dan mendukung penelitian”. (M. Iqbal Hasan, 2002: 83). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan thesis ini adalah sebagai berikut.

**Pertama**, Telaah Dokumen. Menurut Farouk Muhammad dan H. Djaali (2003: 105-106) telaah dokumen adalah “teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen yang ada untuk mempelajari pengetahuan atau fakta yang hendak diteliti”. Telaah dokumen diperlukan untuk memperjelas informasi yang telah diperoleh dan mencari tambahan informasi yang diperlukan melalui sumber lain. Hal tersebut dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik yang bersifat primer maupun sekunder yang berkenaan dengan penelitian yang akan diteliti.

Penulis melakukan telaah dokumen dengan cara mempelajari berbagai dokumen-dokumen yang berhubungan dengan fokus permasalahan penulisan thesis ini , misalnya Paramilitary Policing di Indonesia: Suatu Kajian Strategik (Fisip UI 2008) dan Studi dan Penelitian Paramilitary Policing di Indonesia Dept. Kriminologi FISIP UI 2010.

**Kedua**, Wawancara Mendalam (*in depth interview*). Tehnik wawancara mendalam (*in depth interview*) digunakan untuk menggali data/informasi mengenai pokok permasalahan penelitian. Farouk Muhammad mengartikan bahwa “wawancara sebagai cara pengumpulan data dengan cara bertanya jawab langsung berhadap-hadapan dengan responden, sehingga diperoleh pendapat, keyakinan, motivasi, perasaan dan proyeksi seseorang tentang masa depan”. (Farouk Muhammad & Djaali, 2003: 24). Dengan demikian teknik wawancara/*interview* merupakan

usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula.

Selama melakukan wawancara, penulis menggunakan pedoman wawancara yang bersifat semi terstruktur dan fleksibel yang telah disiapkan sebelumnya untuk menggali informasi yang tidak baku atau informasi tunggal seperti pendapat ahli dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan informasi yang diperlukan. Pengumpulan data serta informasi tersebut penulis lakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang merupakan turunan dari konsep-konsep yang penulis gunakan dan telah terformulasikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang fleksibel. Fleksibel di sini mengisyaratkan bahwa formulasi pertanyaan-pertanyaan tersebut suatu waktu dapat berubah formatnya sesuai kondisi namun tidak menghilangkan substansi dari informasi yang diinginkan diperoleh.

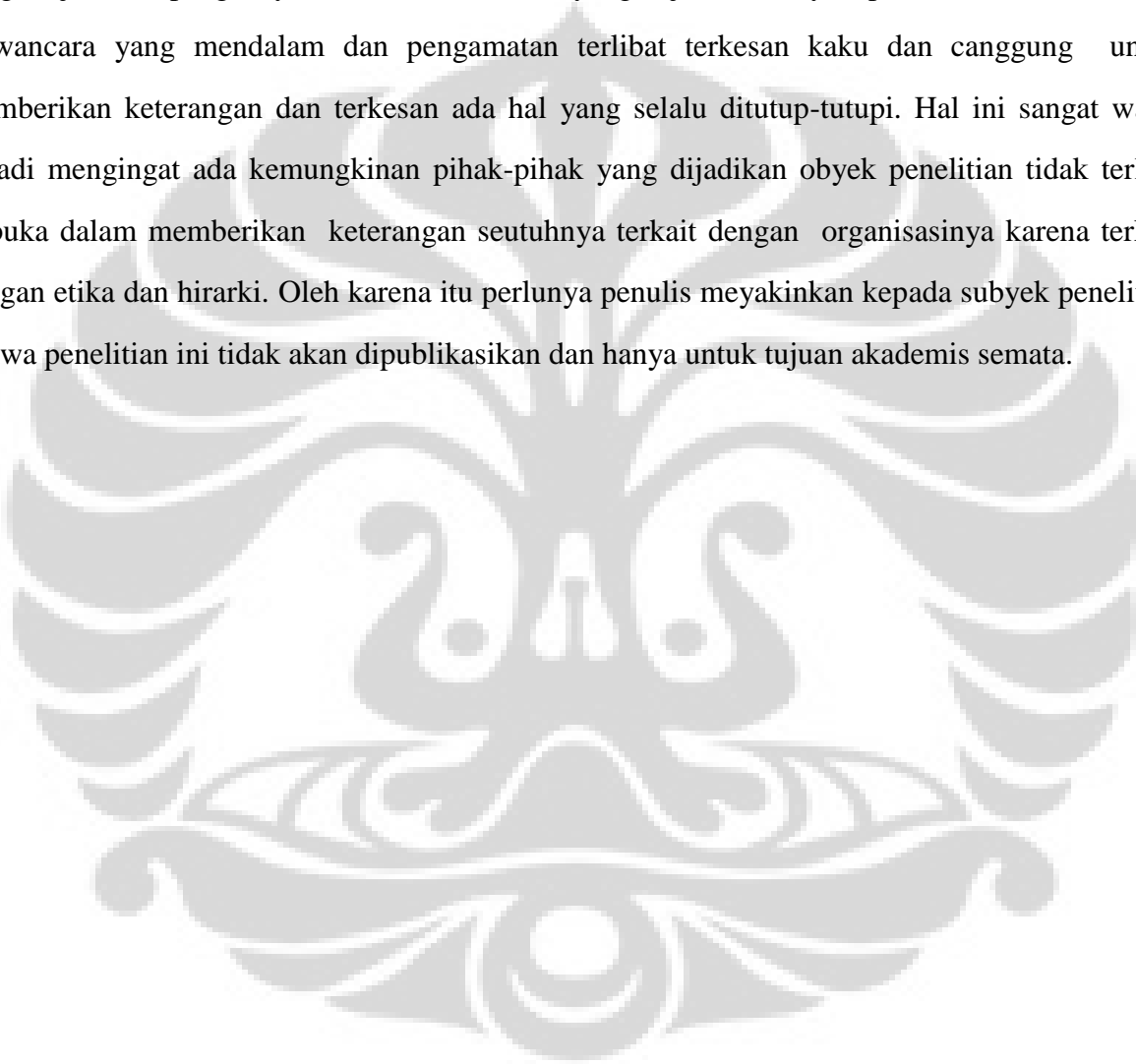
### **3.4 Tempat Riset**

Lokasi penelitian dilakukan yaitu di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan dan Polres Bogor Kota . Polres adalah Kesatuan Operasional Dasar (KOD) yang merupakan perwujudan implementasi kebijakan kepolisian. Pemilihan Polres Metro Jakarta Selatan karena secara teoritik merupakan pusat ibu kota dan memiliki beberapa obyek vital. Sedangkan pemilihan Polres Bogor Kota mengingat wilayah nya merupakan daerahnya penyangga ibu kota (buffer state) dan secara karekteristik memiliki perbedaan dengan masyarakat di wilayah Jakarta Selatan.

Akses kelapangan atau masuk lokasi penelitian mempunyai kesulitan tinggi karena berada dalam area yang memerlukan ijin institusional, administrasi, kesekretariatan secara kelembagaan serta pendekatan personal agar tidak menimbulkan kecurigaan saat berhadapan dengan informan sebagai penegak hukum. Satuan fungsi di lingkup Polres Metro Jakarta Selatan dan Polres Bogor Kota yang menjadi sasaran penelitian, yaitu fungsi Sat Sabhara.

### 3.5 Hambatan Penulis

Hambatan penulisan yaitu dimungkinkan terjadinya bias penelitian mengingat penulis dan anggota yang diwawancarai adalah sama-sama anggota kepolisian yang masih aktif sehingga yang terjadi dilapangan yaitu sumber- sumber yang dijadikan obyek penelitian dalam bentuk wawancara yang mendalam dan pengamatan terlibat terkesan kaku dan canggung untuk memberikan keterangan dan terkesan ada hal yang selalu ditutup-tutupi. Hal ini sangat wajar terjadi mengingat ada kemungkinan pihak-pihak yang dijadikan obyek penelitian tidak terlalu terbuka dalam memberikan keterangan seutuhnya terkait dengan organisasinya karena terkait dengan etika dan hirarki. Oleh karena itu perlunya penulis meyakinkan kepada subyek penelitian bahwa penelitian ini tidak akan dipublikasikan dan hanya untuk tujuan akademis semata.



## **BAB 4**

### **KARAKTERISTIK POLRES BOGOR KOTA DAN POLRES METRO JAKARTA SELATAN**

Dalam bab ini di bahas mengenai visi misi, struktur organisasi, data kriminalitas, data kecelakaan lalu-lintas, karakteristik dan letak geografis, serta jumlah penduduk di Polres Bogor Kota dan Polres Metro Jakarta Selatan.

#### **4.1 Polres Bogor Kota**

Visi Polres Bogor Kota adalah “Kepolisian Resor Bogor Kota dan jajaran dapat mewujudkan stabilitas keamanan wilayah hukum Polres Bogor Kota dengan membangun kemitraan (partnership building) dengan lembaga, instansi terkait baik negeri ataupun swasta”.

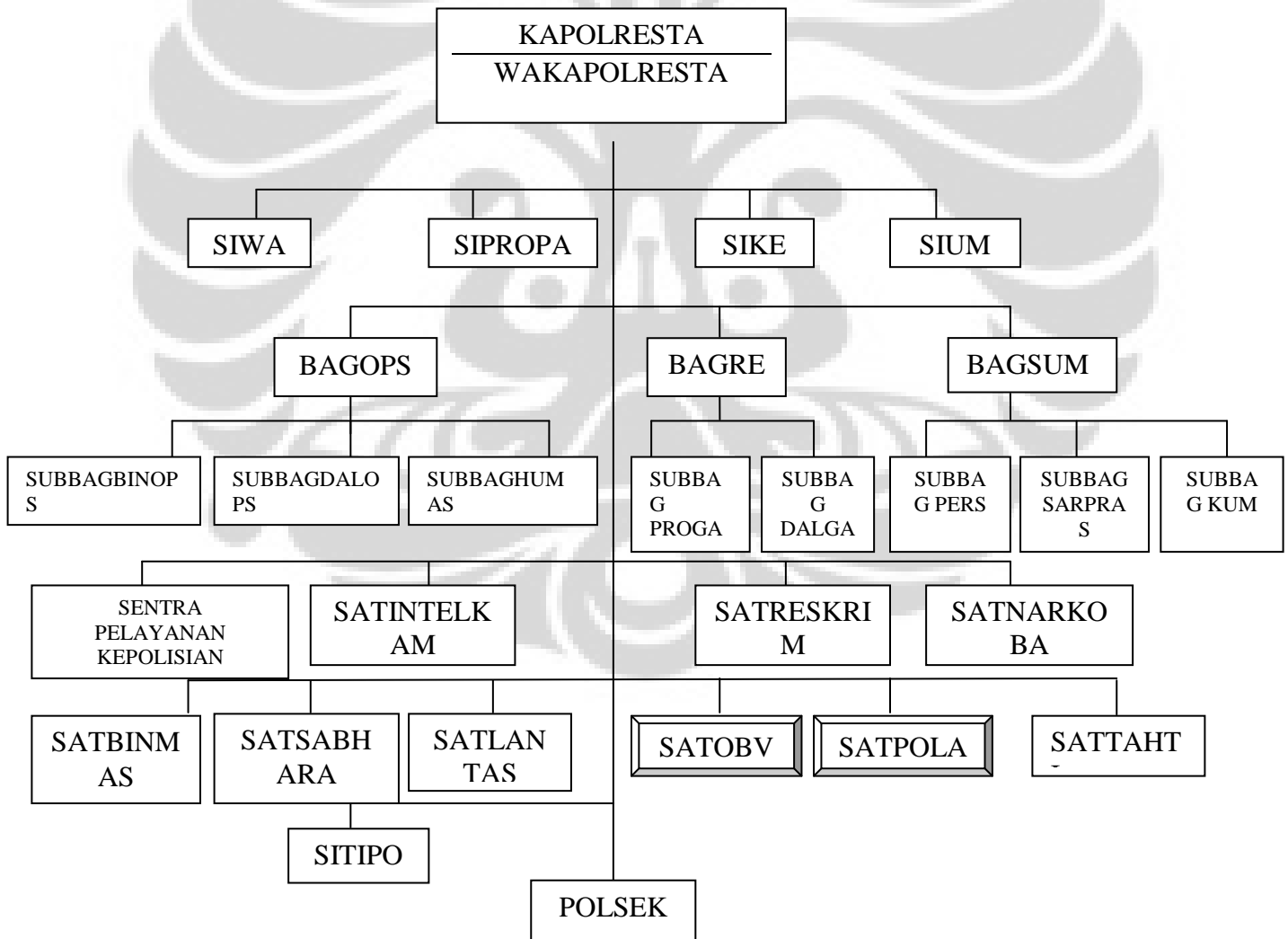
Misi Polres Kota Bogor :

- Mengelola secara professional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya personil Polres Kota Bogor guna mendukung tugas Polri.
- Membangun budaya organisasi Polres Kota Bogor dalam meningkatkan kinerja.
- Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih handal.
- Meningkatkan kemampuan deteksi dini dan peringatan melalui kegiatan/operasi lidik, pengamanan dan penggalangan yang diemban oleh fungsi Intelkam Polres Kota Bogor.
- Mengembangkan pemolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum di wilayah Polres Kota Bogor.
- Meningkatkan kerjasama dengan instansi lembaga instansi baik negeri maupun swasta dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri.
- Meningkatkan perlindungan, penganyoman, dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif, terhadap setiap masyarakat Kota Bogor khususnya dan umumnya pendatang yang berkunjung ke Kota Bogor.

- Memantapkan Kamtibcarlantas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang di wilayah hukum Polres Kota Bogor.
- Menegakan hukum secara professional, objektif, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan untuk masyarakat Kota Bogor.
- Meningkatkan fungsi pengawasan dalam mewujudkan kinerja personil Polres Kota Bogor yang bersih, berwibawa dan terpercaya.

#### 4.1.1 Struktur Organisasi

Tabel 4.1  
Struktur Organisasi Polres Bogor Kota





#### 4.1.2 Data Gangguan Kamtibmas Polres Bogor Kota

Tabel 4.2

Data Kriminalitas ( Januari s/d Juni 2010)

### DATA KRIMINALITAS (JAN s/d JUNI 2010)

No	JENIS KEJ	BULAN (TH. 2010)												JUMLAH			KET
		JAN		FEB		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JTP	PTP	%	
		JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP				
1	CURAT	14	3	18	2	17	3	14	5	14	5	13	11	90	29	32%	
2	CURAS	2	6	2	1	0	0	2	0	2	0	0	0	8	7	88%	
3	CURANMOR R.2	25	19	10	4	14	0	20	6	10	1	12	0	91	30	33%	
4	CURANMOR R.4	4	0	3	0	3	0	6	1	4	0	6	1	26	2	8%	
5	PENIPUAN	11	5	14	7	16	2	26	11	17	7	9	6	93	38	41%	
6	PENGGELAPAN	3	1	4	1	3	3	3	1	7	1	4	8	24	15	63%	
7	PENGANIAYAAN	5	5	6	4	6	7	8	5	7	6	2	2	34	29	85%	
8	ANIRAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
9	PEMBUNUHAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	100%	
10	NARKOBA	8	8	7	7	9	9	8	8	11	11	9	9	52	52	100%	
11	CURI BIASA	6	2	11	2	6	6	4	3	3	0	4	4	34	17	50%	
12	CABUL	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	2	67%	
13	PERKOSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
14	KEROYOK	4	3	2	2	3	3	3	2	2	2	2	1	16	13	81%	
15	PENGRUSAKAN	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4	0	6	0	0%	
16	PEMALSUAN	2	2	1	0	0	0	1	1	2	1	3	1	9	5	56%	
17	PERJUDIAN	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2	3	3	100%	
18	BAWA LR PEREMP	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	0	0%	
19	PERB TDK SENANG	0	0	0	1	4	2	1	0	0	0	2	1	7	4	57%	
20	CAMRAS	0	0	1	0	1	1	1	1	3	2	0	0	6	4	67%	
21	UPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
22	UU DRT SJM/ SENPI	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
23	UU PERLIND ANAK	5	1	4	2	5	0	3	2	3	3	3	0	23	8	35%	
24	UU KDRT	4	1	4	2	9	2	3	3	3	2	6	2	29	12	41%	
25	UU MIGAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	50%	
26	UU FIDUSIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0%	
27	UU ITE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0%	
28	UU PERDGN ORANG	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0%	
29	PORNOGRAFI	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	1	50%	
30	PENGHINAAN	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0%	
31	FITNAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0%	
32	ZINAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100%	
33	PEMBAKARAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0%	
33	BENCANA ALAM	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
34	TEMU MAYAT	1	1	2	1	1	0	0	0	1	1	3	3	8	6	75%	
35	KEBAKARAN	2	2	0	0	0	0	1	1	1	1	2	0	6	4	67%	
36	LAIN-LAIN	1	0	1	0	2	1	4	1	0	0	0	0	8	2	25%	
<b>JUMLAH</b>		<b>100</b>	<b>60</b>	<b>93</b>	<b>37</b>	<b>103</b>	<b>40</b>	<b>112</b>	<b>53</b>	<b>92</b>	<b>45</b>	<b>94</b>	<b>53</b>	<b>594</b>	<b>288</b>		
<b>PERSENTASE</b>		<b>60.00%</b>		<b>39.78%</b>		<b>38.83%</b>		<b>47.32%</b>		<b>48.91%</b>		<b>56.38%</b>		<b>48.48%</b>			

Ket: JTP = jumlah tindak pidana, PTP=penyelesaian tindak pidana

Sumber: Polres Bogor Kota

Jumlah tindak pidana yang menonjol tahun 2010 di Polres Bogor Kota adalah curat, curanmor roda 2, penipuan, penganiayaan, narkoba dan pencurian.

#### 4.1.3 Karakteristik Geografis & Masyarakat Kota Bogor

Secara geografis Kota Bogor terletak di antara 106' 48' BT dan 6' 26' LS. Kedudukan geografis Kota Bogor di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya sangat dekat dengan Ibukota Negara. Merupakan potensi strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi,

dan pariwisata. Kota Bogor mempunyai rata-rata ketinggian minimum 190 m dan maksimum 330 m dari permukaan laut. Kondisi iklim di Kota Bogor suhu rata-rata tiap bulan 26' C dengan suhu terendah 21,8' C dan suhu tertinggi 30,4' C. Wilayah Kota Bogor terdiri 6 kecamatan dan 68 kelurahan.

Secara Administratif kota Bogor terdiri dari 6 wilayah kecamatan, 31 kelurahan dan 37 desa (lima diantaranya termasuk desa tertinggal yaitu desa Pamoyanan, Genteng, Balungbangjaya, Mekarwangi dan Sindangrasa), 210 dusun, 623 RW, 2.712 RT dan dikelilingi oleh Wilayah Kabupaten Bogor. Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Kemang, Bojong Gede, dan Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor, sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Sukaraja dan Kec. Ciawi, Kabupaten Bogor, sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Darmaga dan Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor, sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Cijeruk dan Kec. Caringin, Kabupaten Bogor.

Gambar 4.1  
Denah Geografis Kota Bogor



Sumber: Data Polres Kota Bogor, 2010

Luas wilayah Kota Bogor tercatat 11.850 Ha atau 0,27% dari luas propinsi Jawa Barat. Kota Bogor terdiri dari 6 Kecamatan, yaitu Kecamatan Bogor Selatan, Bogor Utara, Bogor Timur, Bogor Barat, Bogor Tengah dan Tanah Sareal, meliputi 68 Kelurahan.

Kota Bogor berpenduduk 820.707 jiwa dengan komposisi 419.252 Laki- laki dan perempuan 401.455 jiwa, dikenal dengan sebutan Kota Hujan karena memiliki curah hujan yang tinggi yaitu berkisar 3.500 – 4.000 milimeter pertahunnya. Jumlah penduduk per kecamatan dapat digambarkan sebagai berikut:

Table 4.3

Jumlah Penduduk Kota Bogor

**JUMLAH PENDUDUK KOTA BOGOR PER KECAMATAN  
MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2006**

<b>Kecamatan</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
Bogor Selatan	77.254	73.881	151.135
Bogor Timur	38.307	38.958	77.265
Bogor Utara	64.148	61.710	125.858
Bogor Barat	86.496	84.148	170.644
Bogor Tengah	46.235	46.620	92.855
Tanah Sareal	67.006	65.487	132.493
<b>Jumlah</b>	<b>379.446</b>	<b>370.804</b>	<b>750.250</b>

Sumber Polres Bogor Kota

Tingkat pendidikan masyarakat Kota Bogor sebagai berikut: Perguruan Tinggi = 11.046 orang, SLTA = 21.983 orang, SLTP = 12.425 orang, SD = 49.327 orang, TK = 4.012 orang, Pindah dari daerah lain = 66.237 orang, sedangkan Tingkat Kepadatan penduduk Rata – rata = 126/hektar. Kepadatan tertinggi = 190/ hektar (TK Kec / Bogor Tengah), Kepadatan tertinggi = 292/ hektar (TK Kel/Babakan Pasar). Pertambahan Penduduk = 2,79 % pertahun. Untuk Pekerjaan, TNI/ POLRI/Peg.Neg = 29,40 %,, Buruh = 29,84 %,, Pedagang Kecil = 27,57 %, Pensiunan dll = 9,78 %, Pengusaha = 1,50 %, Petani = 0,91 %.

Secara spesifik karakteristik kota bogor dapat dijelaskan sebagai berikut , antara lain :

- 1) Perkembangan kebutuhan kehidupan masyarakat Kota Bogor cukup dinamis tingkat perkembangan ekonomi cukup tinggi.
- 2) Kota Bogor terkenal sebagai kota pariwisata dan kota Pendidikan, memiliki berbagai lembaga penelitian dan Pengembangan dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.
- 3) Dari jumlah penduduk yang ada mayoritas suku Sunda, namun berbagai sukupun ada di Kota Bogor.
- 4) Adat Istiadat Sunda, rasa kekeluargaan tinggi, namun di sisi lain adanya sikap keikutsertaan adat lain.
- 5) Kondisi kerawanan Kota Bogor antara lain kerawanan kegiatan mahasiswa, Politik agama dan Sara.
- 6) Banyaknya Kesatuan TNI / POLRI Kota Bogor dan sekitarnya diantaranya adalah Sat. II Pelopor Brimob Kedung Halang, Lanud Atang Sanjaya di Semplak, Yon 315 di Gunung Batu, Pusdikzi di Jl. Sudirman, Pomad di Ciluar, Polwil Bogor, Polresta & 6 Polsekta, Korem, Kodim dan 5 Koramil. Internal Security TNI Polri yang belum mantap masih sangat rawan terhadap penyalahgunaan wewenang dilapangan.
- 7) Kerawanan bidang Kamtibmas
  - a) Unjuk Rasa, Pawai dan Orasi banyak terjadi di wilayah hokum Polres Kota Bogor khususnya permasalahan yang berhubungan dengan BBM, perburuhan, penanganan masalah korupsi, transparansi pemerintahan serta permasalahan social lainnya.
  - b) Penganiayaan dan perkelahian antar kelompok banyak terjadi di perkampungan yang padat penduduk dikarenakan maraknya premanisme dan sebagai dampak banyaknya pengangguran di Kota Bogor sebagai akibat kesulitan ekonomi.
  - c) Penganiayaan dan perkelahian antar kelompok banyak terjadi di perkampungan yang padat penduduk dikarenakan maraknya premanisme dan

sebagai dampak banyaknya pengangguran di kota Bogor sebagai akibat kesulitan ekonomi.

- d) Penipuan masih sangat dominan terjadi di kota Bogor dengan modus operandi bergaya lama seperti Hipnotis, uang Brazil dan SMS tetapi akan berkembang dengan gaya pejabat atau penipuan melalui telephon, rekening Bank dan Kejahatan Multilevel.
- e) Pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan Kekerasan banyak terjadi bila kurang diantisipasi, hal tersebut dikarenakan semakin rendahnya kesadaran masyarakat akan manfaat pola pengamanan swakarsa yang juga disebabkan oleh terjadinya pergeseran status dari pedesaan menjadi perkotaan dan yang menjadi sasaran dari kejahatan tersebut adalah pinggiran kota dan tempat-tempat yang sunyi.
- f) Pencurian kendaraan bermotor R2 maupun R4 terjadi di kota Bogor dengan TKP tempat-tempat dan pemukiman keramaian karena pengamanan baik yang dilakukan oleh pemilik kendaraan maupun oleh pengelola tempat keramaian tersebut kurang memperhatikan masalah keamanan dan pelaku bukan saja dari kota Bogor tetapi juga dari kota-kota lain untuk bertukar sasaran sebagai upaya untuk mengelabui petugas.
- g) Selain Premanisme yang ada di dalam negeri, Mafia-mafia luar negeri khususnya kejahatan narkoba yang berpeluang masuk ke dalam negeri dan beroperasi di Jakarta serta tidak menutup kemungkinan beraksi juga di kota Bogor karena kondisi Geografis sangat mendukung .
- h) Kejahatan Narkoba dan Obat terlarang semakin banyak berkembang sampai ke pelosok-pelosok untuk mencari korban-korban pencandu yang baru hal tersebut dikarenakan banyaknya pintu gerbang kota Bogor dari Jakarta, sedangkan jalur yang paling aman selama ini bagi pelaku pengedar melalui jalur kereta api dari Jakarta yang hampir tidak pernah terkontrol oleh Petugas.
- i) Selain kejahatan-kejahatan tersebut diatas, permasalahan sosial budaya juga akan timbul seperti SARA apabila tidak ditangani dari awal, hal

tersebut sudah mulai ada tanda-tanda pada tahun 2001 antara Batak dengan Orang Sunda.

- j) Demikian pula kejahatan-kejahatan Ekonomi seperti Penimbunan Sembako, Pemalsuan, Pembajakan hasil industri orang lain, Kejahatan tentang Merk, Hak Paten dan Perbankan.

### **Sumberdaya Alam.**

- 1) Obyek Wisata
  - a) Kebun Raya Bogor, Jl.Ir.H. Juanda Bogor
  - b) Istana Negara Bogor, Jl.Ir.H.Juanda.
  - c) Prasasti Batutulis, Jl.Batutulis Bogor
  - d) Musium Zoologi, Jl.Ir.H.Juanda Bogor
  - e) Musium Herbarium, Jl.Ir.H.Juanda Bogor
  - f) Musium Perjoeangan, Jl.Merdeka Bogor
  - g) Istana Batutulis, Jl. Batutulis Bogor
  - h) Taman Main Anak The Jungle BNR Rancamaya Bogor
- 2) Industri
  - PT. Good Year /Ban Jln Pemuda
  - PT. Olympic /Meubel Jln Kedung Halang
  - PT. Delima Jaya / Karoseri Jln Kedung Halang
  - PT. Mickey Busana /Konveksi Jln Kdg Halang
  - PT. Tulus Rejo /Paku Jln raya Tajur
  - PT. Rhoce Paulince /Farmasi Jln Lw Gintung
  - PT. Bostinco /Lemari baja Jln Pahlawan
  - PT. Budi Mas /Mesin Jln Siliwangi
  - PT. Supindo Perdana /Superator Jln Siliwangi
  - PT. Jaya Tunggal /Karoseri Jln Batutulis
  - PT. Mutu Mas /Ban Jln Siliwangi
  - PT. Vapegas /Gelas Jln Pahlawan
  - PT. Unitex /Textil Jln raya Tajur

- PT. Rahayu Sentosa /Karoseri Jln Sukasari
- NV. Sidik /Tube Jln Batutulis

### **Idiologi dan Politik.**

Pada Era Reformasi Kredibilitas Pancasila sebagai azas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dirongrong kembali dengan munculnya berbagai upaya individu/ kelompok/ golongan masyarakat yang menghendaki perubahan untuk menggantikan Pancasila dengan Idiologi lain, hal ini dapat diidentikan dengan :

- 1) Dengan adanya kebebasan dan beberapa macam perubahan Undang-Undang termasuk UUD 1945 akan mengalami beberapa perubahan maka Pancasila sebagai Dasar Negara dan *Way Of Life* Bansa mulai dirongrong oleh idiologi lain seperti Komunisme bergaya baru, sedangkan dari kelompok-kelompok Ormas Islam mengangkat agenda pemberlakuan Syariat Islam dan bahkan ingin memberlakukan Hukum Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti dari kelompok HTI (Hitbut Tahrir Indonesia).

- 2) Aliran Komunisme.

Pada hari Senin tanggal 17 April 2006 sekitar pukul 08.00 Wib di Jalan Masuk dan Keluar Lapangan Sempur Jl. Jalak Harupat Kec. Kota Bogor Tengah telah ditemukan Gambar "PALU dan ARIT" (Lambang Partai Komunis Indonesia) sebanyak 5 (lima) buah gambar : 2 (dua) buah gambar berada di bak sampah, 1 (satu) gambar di jalan masuk, 1 (satu) buah gambar di jalan keluar, 1 (satu) buah gambar di tengah keluar. Gambar tersebut dibuat oleh orang tidak dikenal dengan menggunakan Cat Semprot Pylox warna Perak dengan ukuran diameter gambar 50 cm serta disalah satu Gambar terdapat Tulisan "C.C.C.P".

- 3) Negara Islam Indonesia (NII) dan NKA.

Kalau dilihat dari Modus Operandinya maka NII dan NKA adalah merupakan satu rumpun yang mempromosikan Negara Islam tetapi di Kota Bogor sumbernya berbeda yaitu NII dari Bandung sedangkan NKA dari Depok, tetapi pada dasarnya merupakan Aliran Sesat yang mengatasnamakan Agama untuk kepentingan materi dengan jalan Infaq, Shodaqoh dan Zakat Mal Dari jama'ah

sendiri dengan dalih INFAQ dan SODAQOH sedangkan sumber lain belum diketahui, tidak menutup kemungkinan ada bantuan dari Luar Negeri, Sebagian dari korban dikenakan Infak sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), akomodasi Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dll, sehingga jumlah semua berjumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemungkinan akan menyusun kekuatan untuk melakukan perlawanan dengan negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kantong-kantong penyebarannya adalah :

- (a) Kecamatan Bogor Timur adalah di Bantar Kemang.
  - (b) Kecamatan Bogor Barat adalah di kel. Semplak dan Kel. Dramaga.
  - (c) Kecamatan Tanah Sareal di Tanah Sareal Kelurahan Cimanggu
- 4) Kerajaan Sunda Nusantara.

Negara Sunda Nusantara dipimpin oleh Rusli Supriadi atas nama Kaisar Almisri II dengan Staff Umum Majelis Agung Sunda Archipelago disingkat MASA adalah Drs. Muhammad Husen, Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Sunda Nusantara Drs. Ahmad Sudjai dan anggota Negara Sunda Nusantara adalah Durahman dan Rahmat Kurniawan. Pemerintahan Negara Sunda Nusantara atau Negara Sunda Archipelago belum terbentuk tetapi pimpinan negara sudah ada yaitu Rusli Supriadi atas nama Kaisar Almisri II, pusat pemerintahan belum ada tetapi sebagai pusat kegiatan kenegaraan berada di Jl. Malabar Gg. Pendidikan III No. 15 Kel. Babakan Kec. Bogor Tengah Kota Bogor dan susunan pemerintahan sudah ada namun belum ada orang-orangnya yang mengisi. Adanya bukti-bukti pendukung tentang Negara Sunda Nusantara seperti lembaran kertas berisi Struktur Pemerintahan untuk wilayah Jawa, figura Bendera Negara Sunda Nusantara, 58 ID Card, buku AD / ART Negara Sunda Nusantara, jam dinding bergambar bendera Sunda Nusantara, keping VCD dan 76 KTA Sunda Nusantara yang telah ditandatangani Ketua Umum merupakan indikasi adanya suatu bentuk perlawanan terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipersiapkan oleh Drs. Muhammad Husen, Durahman dan Rachmat Kurniawan.



- 5) Kegiatan Politik pada Pasca peralihan Orde Baru, serta semangat reformasi dari berbagai lapisan masyarakat (Buruh, Mahasiswa, Cendekiawan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pemuda) terutama Mahasiswa menuntut berbagai lembaga pemerintah untuk melaksanakan perubahan di bidang Politik, Ekonomi dan Hukum. Hal ini ditandai dengan maraknya tuntutan masyarakat terhadap proses Pemilihan Kades, sampai dengan tingkat pencalonan Walikota Bogor, dengan menggelar berbagai aksi.
- 6) Dibidang aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa saat ini belum dapat di wujudkan sepenuhnya sehingga masih terdapat aparat yang melakukan KKN, akibatnya mendorong kelompok yang berkepentingan menuntut mundur pejabat pemerintah yang KKN.
- 7) Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum tahun 2009 di Kota Bogor sebagai berikut :

(a) Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu tahun 2009.

No	NAMA PARPOL	PEROLEHAN SUARA	KET
1	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	14982	
2	Partai Karya Peduli Bangsa	5584	
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	0	
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	1550	
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	16438	
6	Partai Barisan Nasional	3080	
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1882	
8	Partai Keadilan Sejahtera	62698	
9	Partai Amanat Nasional	18906	
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	0	
11	Partai Kedaulatan	781	
12	Partai Persatuan Daerah	975	
13	Partai Kebangkitan Bangsa	7771	
14	Partai Pemuda Indonesia	836	
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	546	

16	Partai Demokrasi Pembaharuan	3524	
17	Partai Karya Perjuangan	1420	
18	Partai Matahari Bangsa	5126	
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	308	
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	870	
21	Partai Republika Nusantara	1242	
22	Partai Pelopor	0	
23	Partai Golongan Karya	52263	
24	Partai Persatuan Pembangunan	19971	
25	Partai Damai Sejahtera	7153	
26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Ind	324	
27	Partai Bulan Bintang	17227	
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	44605	
29	Partai Bintang Reformasi	1103	
30	Partai Patriot	5531	
31	Partai Demokrat	130278	
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	2172	
33	Partai Indonesia Sejahtera	474	
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	1689	
41	Partai Hati Merdeka	427	
42	Partai Nahdatul Ummah Indonesia	269	
43	Partai Sarikat Indonesia	103	
44	Partai Buruh	377	

(c) Perolehan Kursi DPRD TK. II Kota Bogor Hasil Pemilu Legislatif 2009.

No	NAMA PARPOL	JUMLAH KURSI	KET
1	Partai Demokrat	15	
2	Partai Keadilan Sejahtera	7	
3	Partai Golongan Karya	6	

/ 4. Partai....

4	Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia	6	
5	Partai Persatuan Pembangunan	3	
6	Partai Gerinda	3	
7	Partai Amanat Nasional	2	
8	Partai Hanura	2	
9	Partai Bulan Bintang	1	
<b>JUMLAH</b>		<b>45</b>	

- 9) Elite Politik Formal dan Informal setelah kartu kebebasan dibuka terlihat ketidakdewasaan pernyataan politik dan pemberitaan mass media membuat masyarakat bingung dan frustrasi terhadap perkembangan politik dan ekonomi.
- 10) Organisasi kemasyarakatan di Kota Bogor sampai saat ini tercatat 115 Organisasi, sedangkan organisasi ilegal sampai saat ini tidak ada.
- 11) Aliran kepercayaan yang ada di Kota Bogor ada 3 (tiga ) yaitu paguyuban Ngesti Tunggal, aliran theosofi Indonesia dan Sapta Dharma.

#### **Mata Pencaharian Masyarakat.**

- a) Sebagian masyarakat Kota Bogor sebagai karyawan, buruh, pedagang kecil dan pengusaha.
- b) Manfaatkan perusahaan yang ada di sekitar Kota Bogor dan Kabupaten TK II Bogor.
- c) Sedangkan yang sebagian lagi berprofesi sebagai pegawai negeri, TNI/POLRI dan swasta di Wilayah Kota Bogor, Kabupaten TK II Bogor dan ke Jakarta.

#### **Sosial Budaya**

1) Lembaga Pendidikan.

a)	Taman Kanak – kanak	=	57 gedung
b)	Sekolah Dasar	=	169 gedung
c)	Sekolah Menengah Pertama	=	51 gedung
d)	Sekolah Menengah Atas	=	31 gedung
e)	Madrasah	=	7 gedung
f)	Pesantren	=	9 gedung

g)	Perguruan Tinggi	=	5	gedung
h)	Akademi	=	3	gedung
i)	Kursus - Kursus	=	34	gedung
2)	Drop Out	=	1.667	Orang
3)	Alim Ulama	=	165	Orang
4)	Pendeta	=	30	Orang
5)	Biksu	=	5	Orang
6)	Tempat Peribadatan			
a)	Mesjid dan Mushola	=	442	gedung
b)	G e r e j a	=	24	gedung
c)	Wihara / Kelenteng	=	7	gedung
d)	Pura	=	1	gedung
7)	Hotel / Wisma	=	25	gedung
8)	Grup Kesenian			
a)	Orkes Melayu	=	5	grup
b)	Seni Sunda Karawitan	=	1	grup
c)	Pencak Silat	=	14	grup

#### 4.2 Polres Metro Jakarta Selatan

Mengacu pada kebijakan Kapolri dan karakteristik wilayah setempat, maka **visi** Polres Jakarta Selatan dapat diuraikan sebagai berikut: Mewujudkan keamanan di wilayah Jakarta Selatan sebagai bagian dari Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Raya yang merupakan barometer kehidupan nasional dengan meningkatkan pelayanan masyarakat dan perlindungan serta mewujudkan Polisi trampil, cepat dan profesional dalam penegakan hukum, dengan tetap menjunjung tinggi supremasi hukum, HAM dan Hak Demokrasi, guna menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap Polri khususnya di wilayah Polres Metropolitan Jakarta Selatan.

Sedangkan  **misi** Polres Jakarta Selatan adalah:

- Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap / responsive dan tidak diskriminatif agar masyarakat merasa mendapat perlakuan yang adil serta terhindar dari gangguan fisik maupun psikis.
- Mencegah dan menanggulangi semua bentuk tindak pidana terutama penyalahgunaan senpi, uang palsu, kejahatan kesusilaan, narkoba, premanisme, perjudian dan kejahatan jalanan (Stret Crime).
- Menertibkan perilaku anggota Polri dilapangan dan ditempat – tempat pelayanan agar tidak merugikan masyarakat baik secara materiil, fisik maupun psikis.
- Memerangi terhadap kejahatan dengan kekerasan, kejahatan dengan pemberatan, curanmor dan penganiayaan berat.
- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang waktu diseluruh wilayah, serta memfasilitasi keikut sertaan masyarakat dalam memelihara Kamtibmas di lingkungan masing – masing.
- Mengembangkan Perpolisian masyarakat (Community Policing) yang berbasis masyarakat patuh hukum (*Law Abiding Citizen*).
- Mewujudkan kota Jakarta Selatan yang aman dan tertib melalui kegiatan pengelolaan Pengembangan Sistem Keamanan dan ketertiban yang mengakomodir kepentingan pemerintah dan masyarakat pada umumnya dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Jakarta Selatan dan sekitarnya dengan tetap memperhatikan norma – norma dan nilai - nilai yang berlaku dalam bingkai masyarakat yang demokratis.
- Menindak lanjuti validasi organisasi tingkat kewilayahan melalui pengembangan struktur organisasi tingkat Polres sampai dengan Polsek dan Polpos Jajaran.
- Menegakkan hukum secara profesional, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.

- Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung tugas operasional Polri.
- Menegakkan hukum secara cepat, profesional dan proporsional dengan tetap menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia.

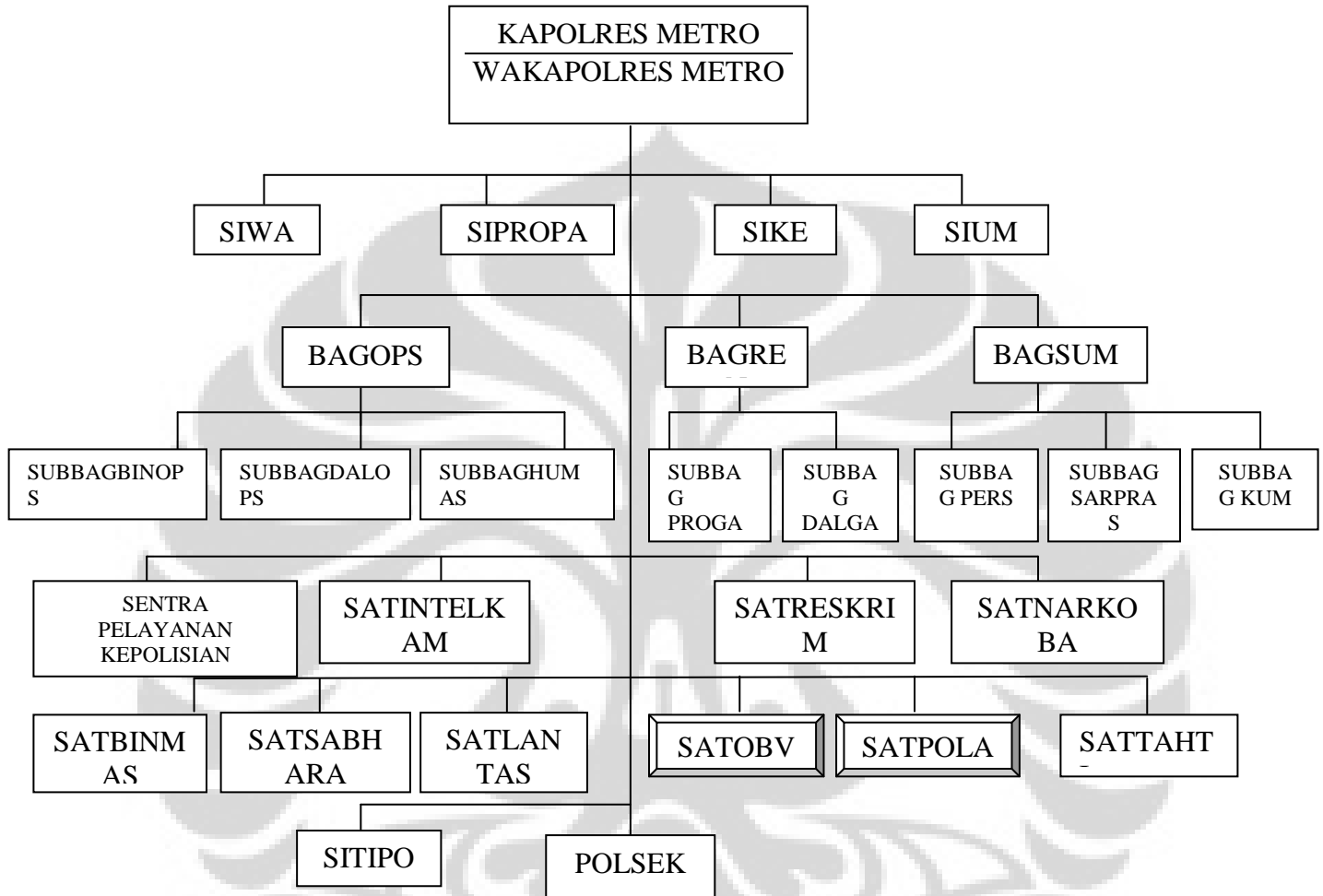
Tugas Pokok Restro Jaksel adalah terselenggaranya tugas pokok Polri dalam harkamtibmas, penegakan hukum dan memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas Polri lain dalam daerah hukum Restro Jaksel sesuai ketentuan hukum dan peraturan / kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.

Polres Metro Jakarta Selatan berada dibawah Polda Metro Jaya. Nama Polda Mtero Jaya ini sebelumnya telah beberapa kali mengalami penggantian nama. Di masa pendudukan Belanda, kantor besar kepolisian Jakarta disebut *Hoofdbureau Van Politie*. Setelah Jepang mengambil alih pemerintahan, *Hoofdbureau Van Politie Batavia* berubah nama menjadi *Jakarta Tokubetsu Shi Kaisatsu Sho* diambil alih oleh Polisi Republik dan namanya diubah menjadi *Kantor Besar Polisi Jakarta*. Menjelang belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia dibentuk kepolisian di Jakarta dengan nama *Kantor Polisi Komisariat Jaya (Kapekomjaya)*. Kemudian tahun 1965 pada saat Kepala Kantor Polisi Komisariat Jaya dijabat Brigjen Raden Mas Sawarno Tjokrodiningrat namanya diganti lagi menjadi *Komandan Daerah Kepolisian VII Jaya (Komdak VII Jaya)*. Pada tahun 1967 terjadi penggantian pangdak dari Irjen Polisi Drs Soebroto Brotodirdjo SH kepada Mayjen Polisi Drs. Soekahar. Saat itu kembali terjadi penggantian nama menjadi *Komando Daerah Kepolisian Metro Jaya (Komdak Metro Jaya)*, Ini dilakukan setelah Gubernur Ali Sadikin menyatakan Kota Jakarta sebagai kota metropolitan. Selanjutnya nama komdak Metro Jaya berubah lagi menjadi *Kodak Metro Jaya*. Pada saat itu Mayjen Pol Drs Widodo Budidarmo menjadi Kadapol Metro Jaya tahun 1970 nama Komdak Metro Jaya berubah menjadi *Daerah Kepolisian Metro Jaya* sampai tahun 1979. Tahun 1980 sampai sekarang Daerah Kepolisian Metro Jaya berubah kembali menjadi *Kepolisian Daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya)* dan sekitarnya.

### 4.2.1 Struktur Organisasi Polres Metro Jakarta Selatan

Tabel 4.4

Struktur Organisasi Polres Metro Jakarta Selatan



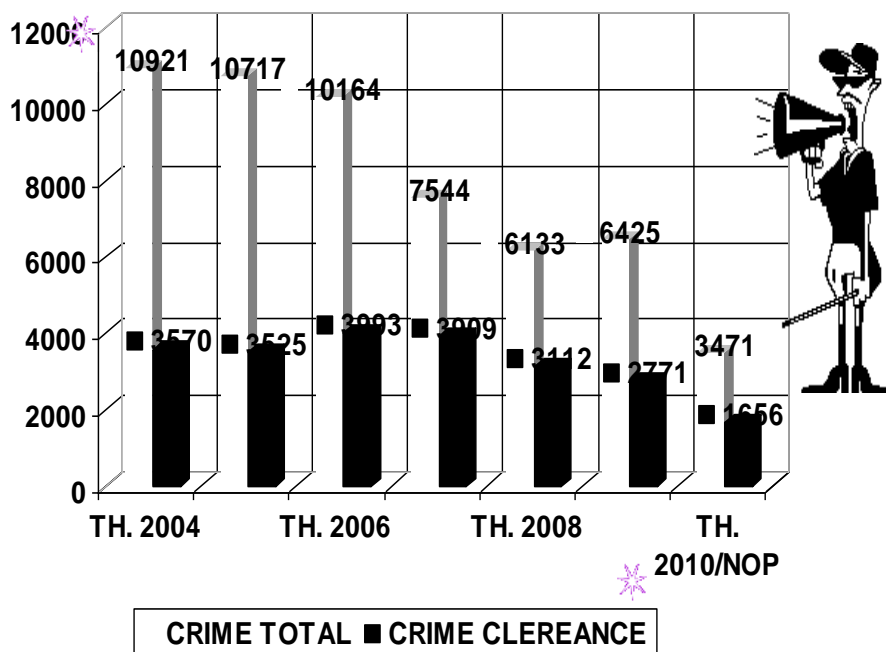
#### 4.2.2 Data Gangguan Kamtibmas Polres Metro Jakarta Selatan

Table 4.5

Grafik Gangguan Kamtibmas 5 (lima) tahun terakhir



## GRAFIK GANGGUAN KAMTIBMAS 5 ( LIMA ) TAHUN TERAKHIR



Sumber: Polres Metro Jakarta Selatan

Gangguan lalu lintas di Polres Jakarta Selatan selama 5 tahun (2004 – November 2010) cenderung menurun baik total kejahatan maupun total penyelesaiannya kecuali antara tahun 2006 dan 2008.



Table 4.6

Perbandingan Data Gangguan Kamtibmas 11 Jenis Kasus  
Januari s/d Desember 2009



**PERBANDINGAN DATA GANGGUAN KAMTIBMAS 11 JENIS KASUS  
BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2008 DENGAN 2009**



NO.	JENIS KASUS	KASUS		TREND	KET
		TH. 2008	TH. 2009		
1	CURAS	118	92	- 88.1 %	Turun
2	CURAT	690	691	0.14 %	Naik
3	ANIRAT	232	267	15,1 %	Naik
4	PEMBUNUHAN	10	9	- 10 %	Turun
5	CURANMOR	1052	1351	3,99 %	Naik
6	KEBAKARAN	45	50	6,7 %	Naik
7	JUDI	166	72	- 56 %	Turun
8	PERAS / ANCAM	52	39	- 26.9 %	Turun
9	PERKOSAAN	5	4	- 20 %	Naik
10	NARKOTIKA	941	783	- 18.1 %	Turun
11	KENAKALAN REMAJA	26	24	- 7,69 %	Turun

Sumber: Polres Metro Jaksel

Gambar ini menjelaskan pada tahun 2008 dan 2009 kasus terbesar di wilayah Polres Jakarta Selatan adalah curanmor yang cenderung meningkat, berbeda bila dibandingkan dengan grafik lima tahunan sebelumnya. Selain itu juga ada kenaikan kasus anirat dan kebakaran.

#### 4.2.3 Karakteristik Geografis dan Masyarakat Jaksel

Jakarta Selatan terletak pada 106022'42' Bujur Timur (BT)-106058'18' BT dan 5019'12' Lintang Selatan (LS). Luas wilayah sesuai keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1815 tahun 1989 adalah 145,73 Km<sup>2</sup> atau 22,41% dari luas DKI Jakarta. Terbagi 10 Kecamatan dan 65 Kelurahan, berada dibelahan selatan banjir kanal dengan batas-batas wilayah: sebelah utara: Banjir Kanal Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Tanah Abang, Jl. Kebayoran Lama & Kebun

Jeruk, sebelah timur: Kali Ciliwung, sebelah Selatan: berbatasan dengan Kotamadya Depok, sebelah barat : berbatasan dengan Kecamatan Ciledug Kotamadya Tangerang.

Wilayah Jakarta Selatan pada umumnya dapat dikategorikan sebagai daerah perbukitan rendah dengan tingkat kemiringan 0,25%. Ketinggian tanah rata-rata mencapai 5-50% M diatas permukaan laut.

Pada wilayah bagian selatan banjir kanal relatif merupakan daerah perbukitan jika dibanding dengan wilayah bagian utara. Jakrta Selatan beriklim panas dengan suhu rata-rata per tahun 27 derajat celcius dengan tingkat kelembaban berkisar antara 80-90%. Arah angin dipengaruhi angin muson barat terutama pada bulan Mei-Oktober. Berbeda dengan sebagian kota yang berada pada daerah tepi pantai, keadaan suhu di wilayah Jakarta Selatan relatif lebih nyaman, tingkat curah hujan per tahun rata-rata mencapai ketinggian 2.036 dengan maksimum pada bulan Januari.

Jumlah penduduk pada akhir tahun 2000 adalah sebesar 1.665.407 jiwa dengan kepadatan rata-rata 11.421 jiwa per km<sup>2</sup> dengan pertumbuhan rata-rata 1,13% yang terdiri dari 1,09% pertumbuhan alami dan 0,04% pertumbuhan migrasi. Sebagian besar mata pencaharian penduduk bergerak dibidang pemerintahan dan jasa-jasa kemudian perdagangan, industri, pertanian dan angkutan jalan.

Secara administratif wilayah Jakarta Selatan terbagi menjadi 10 kecamatan dan 65 kelurahan dengan luas keseluruhan mencapai, 145,73 Km<sup>2</sup>. Pada tahun 1961, jumlah penduduk DKI Jakarta baru mencapai 2,91 juta jiwa, kemudian tahun 1971 menjadi 4,55 juta jiwa, tahun 1980 menjadi 6,48 juta jiwa, tahun 1990 bertambah lagi menjadi 8,23 juta jiwa dan akhir tahun 2000 diperkirakan mencapai 9,72 juta jiwa.

Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan mempunyai obyek wisata cukup terkenal yaitu Taman Margasatwa Ragunan yang ramai dikunjungi pada saat musim liburan. Selain Kebun Binatang Ragunan, ada juga Situ Babakan yang sampai saat ini baru berfungsi sebagai badan air irigasi, pemancingan, berenang dan tempat berperahu. Pada waktu mendatang Situ Babakan direncanakan akan dikembangkan dan dikelola sebagai obyek wisata. Angkutan darat memegang

peranan penting bagi arus transportasi di Jakarta Selatan seperti angkutan bus, mikrolet, taksi dan kereta api.

Wilayah hukum Polres Metro Jaksel memiliki beberapa tempat obyek vital yang sering dijadikan sasaran aksi unjuk rasa yaitu diantaranya: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pedayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Kesehatan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mabes Polri, Kejaksaan Agung, Wisma Bakrie, Gedung Free Port, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kedutaan Besar Malaysia, Kedutaan Besar Australia, Kediaman Dubes Malaysia, Jamsostek, Polda Metro Jaya, Gedung Film Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum, Kantor PLN Pusat, Pengadilan Tipikor, Polres Metro Jakarta Selatan dan Kejaksaan Tinggi DKI.

Gambar 4.2.

Denah Geografis Jakarta Selatan



Sumber: Data Polres Jaksel, 2010

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik wilayah antara Kota Bogor dan Jakarta Selatan sangat berbeda, baik dilihat dari letak geografis, jumlah penduduk, mata pencaharian, sentra-sentra ekonomi dan perkantoran dan obyek vital serta budaya dan adat istiadat.

### NAMA PARPOL

NO	NAMA PARPOL	ALAMAT & NO. TELP	KETERANGAN
1	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	Jl. TB Simatupang No. 6 Kav. 11 Rt. 005/04 Jatipadang pasar Minggu	
2	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)	Jl. H. Muhi Pondok Pindang Keb Lama	
3	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)	Jl. Roos Timur III No. 9 Rt. 014/05 Bukit Duri Tebet	
4	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)	Jl. Poltangan III No. 3 Rt. 003/10 Pejaten Timur Pasar Minggu	
5	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	Jl. Cipaku II/14 Blok Q14 Rt. 011/04 Keb Baru	
6	Partai Barisan Nasional (Barnas)	Jl. Timah No. 8 Komp. Timah / Gatot Subroto Setiabudi	
7	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	Belum terbentuk	
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Jl Raya Cilandak KKO No. 17 Cilandak	
9	Partai Amanat Nasional (PAN)	Jl. Puri Sakti I / 26 Cipete Selatan Cilandak	
10	Partai Indonesia Baru	Belum terbentuk	
11	Partai Kedaulatan	Jl. Bukit Duri Tanjakan Dalam 15 No. 11 A Bukit Duri Tebet	
12	Partai Persatuan	Jl. Swadaya Raya NO. 1 Rt 001/11 Tanah	

	Daerah (PPD)	Kusir II Keb Lama Selatan	
13	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Jl. P. Antasari No. 12 Keb Baru	
14	Partai Pemuda Indonesia (PPI)	Jl. Anggrek gg. Karya Bakti No. 12 Rt. 008/05 Petukangan Utara Pesanggrahan	
15	Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenis	Jl. Gudang Peluru Blok I No. 7 B Kebon Baru Tebet	
16	Partai Demokrasi Pembaharuan	Jl. KH. Abdullah Syafei No. 26 B Rt. 001/01 Kebon Baru Tebet	
17	Partai Karya Perjuangan	Jl. Buncit 14 Mp. Prapatan	
18	Partai Matahari Bangsa (PMB)	Jl. Sabar No. 18 A Rt. 002/03 Petukangan Selatan Pesanggrahan	
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)	Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 No. 8 Rt. 015/06 Pejaten Timur Pasar Minggu	
20	Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)	Jl. Gaharu II No. I A Cilandak	
21	Partai Republik Nusantara (Republikan)	Jl. EE No. 43 Rt 08/01 Menteng Dalem	
22	Partai Pelopor	Jl. Swadaya I Pejaten Timur No. 43 A Pasar Minggu	
23	Partai Golongan Karya (Golkar)	Jl. Moch Kahfi II Setu Babakan No. 40 A Jagakarsa	
24	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Jl. Jagakarsa Raya No. 37 A Rt. 013/01 Jagakarsa	
25	Partai Damai Sejahtera (PDS)	(kantor belum ada, masih gabung di DPP)	
26	Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia (PNBK)	Jl. Kalibata Utara I No. 36 Rt. 001/02 Kalibata Pancoran	
27	Partai Bulan Bintang (PBB)	Jl. Cikoko Timur II No. 29 Pengadegan Pancoran	
28	Partai Demokrasi	Jl. Moh. Kahfi I Gang Pasari No. 3 Kel. Ciganjur	

	Indoensia Perjuangan (PDI P)		
29	Partai Bintang Reformasi (PBR)	Jl. RF Fatmawati No. 6 Pondok Labu Cilandak	
30	Partai Patriot	Jl. Bangau II No. 22 Rt. 006/03 Pondok Labu Cilandak	
31	Partai Demokrat	Jl. Kebayoran Baru (Velbak) No. 73 C Keb. Baru	
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI)	Jl. Purwa Raya I No. 70 Rt. 006/03 Cipadak Jagakarsa	
33	Partai Indonesia Sejahtera (PIS)	Jl. Sawo III No. 6 Rt. 003/10 Manggarai Selatan Tebet	
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)	Jl. Kemang Raya Rt. 001/12 Cilandak Timur Pasar Minggu	

## BIDANG EKONOMI

### 1. PERDAGANGAN INDUSTRI

#### a. Pasar Tradisional

NO	NAMA PASAR	ALAMAT/ NO. TELP	KETERANGAN
	<b>KEBAYORAN LAMA</b>		<i>Nama Pengelola</i>
1	PASAR BATA BATA PUTIH	Jl. Kramat I Grogol Selatan / Telp 727-9230	Kepala / Ibu Umi Kalsum
2	PD.PASAR JAYA KEB. LAMA	Jl. Keb. Lama Utara	Kepala / Ibu Kartini
3	PASAR CIDODOL	Jl. Panjang Cidodol Cipulir / 72788460	Kepala / S Toga
4	PASAR INPRES PONDOK PINANG	Jl. Ciputat Raya RT 001/01 / 08129972164	Dayat
5	PD.PASAR CIPULIR	Jl. Ciledug Raya /	Kepala Royani
6	PASAR KEDIP	Kp.Dukuh Rt.06/12 Keb.Lama Selatan	
	<b>TEBET</b>		

1.	PS.TEBET BARAT	Jl.Tebet Barat ,Tebet Jaksel	
2.	PSR.PEDOK	Jl. Prof.Dr.Supomo,SH Jaksel	
3.	JEMBATAN MERAH	Jl.Dr. Saharjo Tebet Jaksel	
4.	PSR. BUKIT DURI	Jl.Bukit Duri Puteran jaksel	
5.	PSPT	Jl.Tebet Timur ,Tebet Jaksel	
	<b>SETIABUDI</b>		
1.	PASAR RUMPUT	Jl. Sultan Agung Kel. Pasar Manggis Setiabudi Jakarta Selatan.	
2.	PASAR MENCOS	Jl. Karbela Kel. Karet Setiabudi Jakarta Selatan.	
3.	PASAR JEMB MERAH	Jl. Dr. Saharjo Menteng atas	
4.	PASAR KARET SAWAH	Jl. Karet Sawah Kel. Karet Semanggi Setiabudi Jakarta Selatan	
5.	PD. PASAR MANGGIS	Jl. Guntur Pasar Manggis Setiabudi Jaksel	
6.	PASAR CIPLAK	Rt 16/04 Karet Kuningan	
7.	PASAR MURIA DALAM	Jl. Menteng Pulo Menteng atas Setiabudi Jakarta Selatan.	
	<b>MP. PRAPATAN</b>		
1.	PD. PASAR JAYA PASAR MAMPANG	Jl. Mampang Prapatan Raya Kel. Mampang Prapatan	
2.	PD. PASAR JAYA DARMA JAYA	Jl. Darma Jaya Kel. Bangka	
3.	PASAR TRADISIONAL (PASAR KECIL)	Jl. Bangka Raya Kel. Pela Mampang	
4.	PASAR RENGAS	Jl. Poncol Raya Kel. Kuningan Barat	
	<b>PASAR MINGGU</b>		
01	PD. PASAR JAYA PASAR MINGGU	Jl. Raya Pasarminggu Kel. Pasarminggu Kec. Pasarminggu Jak-Sel. Telp : 021-7803242	<b>KLANA JAYA</b>
	<b>CILANDAK</b>		
1.	PD. PASAR JAYA	Jl. RS. Fatmawati Pondok Labu	Ps.Tradisional

	<b>PONDOK LABU</b>		
2.	<b>PD. PASAR JAYA PASAR MEDE</b>	<b>Jl. RS. Fatmawati Cilandak Barat</b>	<b>Ps. Tradisional</b>
3.	<b>PASAR INPRES CIPETE</b>	<b>JL. Pangeran Antasari, Cilandak Barat.</b>	<b>Ps. Tradisional</b>
	<b>KEBAYORAN BARU</b>		
1	<b>PASAR PD JAYA MAYESTIK</b>	Jl. Kiai Maja	H. Omam.s
2	<b>PASAR PD JAY BLOK A</b>	Jl. RS. Fatmawati	Tatang
3	<b>PASAR PD JAYA CIPETE</b>	Jl. RS. Fatmawati	
4	<b>PASAR PD JAYA SANTA</b>	Jl. Cipaku	
5	<b>PASAR INPRES</b>	Jl. BRI Radio Dalam	
6	<b>PASAR TULODONG</b>	Jl. Tulogong Atas	
	<b>CIPUTAT</b>		
1	Pasar Ciputat	Jl. Ir H Djuanda	Pemda Tangerang
2	Pasar Jombang	Jl. Jombang Raya	Pemda Tangerang
3	Pasar Cimanggis	JL RE Martadinata	Pemda Tangerang
	<b>PANCORAN</b>		
1	<b>KAGET RAWAJATI</b>	Jl. Rawajati Timur II	
2	<b>KAGET</b>	Jl. Pengadegan Selatan II	
3	<b>PENGADEGAN KAGET KALIBATA</b>	Jl. Kalibata Utara II	
	<b>JAGAKARSA</b>		
1	<b>PASAR INPRES</b>	Jl. Jagakarsa Rt. 002/01 Kel. Jagakarsa (Telp : 021- 7272355)	Ngadiman
	<b>PAMULANG</b>		
1.	<b>PASAR KAGET BENDA BARU</b>	Pamulang permai II Kel Benda baru Kec. Pamulang.Tlp.021- 74701704	



2.	PASAR KAGET RENI JAYA	Reni Jaya Blok Q. Kel. Pondok Benda Kec. Pamulang Tlp.-	
3.	PASAR KAGET PAMULANG PERMAI I	Ruko Pamulang Permai I Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang.	
<b>PESANGGRAHAN</b>			
1.	PD PASAR JAYA	Jl.Pasanggrahan Jaksel	
2.	PASAR INPRES	Jl.Ciledug Raya Pet-Selatan	
3.	PS.MICRO LOKBIN BINTARO	Jl.Bintaro Permai Pasanggrahan	
4.	PASAR ALFA	Jl.Palem V Pet-Utara	

b. Pasar Modern (Mall)

NO	NAMA MALL	ALAMAT/ NO. TELP	KETERANGAN
	<b>KEBAYORAN LAMA</b>		
1	ITC PERMATA HIJAU	Jl. Soepeno Grogol Utara /	
2	MALL PONDOK INDAH 1	Jl. Metro Pondok Indah / tlp 7506750 Pondok Pinang	Metro Kencana
3	MALL PONDOK INDAH 2	Jl. Metro Raya Pondok Indah Pondok Pinang	Metro Kencana
4	CAREFOUR LB BULUS	Jl.Raya Ps Jum'at/l.Tb.Simatupang Rw 07 Pondok Pinang tlp 7591 1908	Rudy Wirawan
5	CARREFOUR PERMATA HIJAU	Jl.Kapten Supeno PermataHijau Grogol Utara	Agus
6	HERO	Permata Hijau Blok D A 14 Grogol Utara	Ipung Kurnua
7	CARREFEUR EKSPRES	Jl.Ciledug Raya Cipulir	
	<b>TEBET</b>		
1.	RAMAYANA	Jl.Tebet Barat ,Tebet Jaksel	
2.	GELAEI SWALAYAN	Jl.MT. Haryono ,Tebet Jaksel	
3.	SUPERINDO	Jl.Tebet Barat ,Tebet Jaksel	

4.	HERO SWALAYAN	Jl.Gatot Subroto ,Tebet Jaksel	
5	ULFAH SUK MART	Jl.Asem Baris Kebon Baru /8302212	
6	INDOMART	Jl.Asem Baris Raya No.1/ 8313912	
7	INDOMART	Jl.Asem Baris Raya No.1 / 83705405	
8	ALFA MART	Jl.Kh.Abdullah Syafei Selmis / 8309966	
9	INDO MART	Jl.Tebet Raya No.30-A / 8311337	
10	INDO MART	Jl.Tebet Barat IX/30 / 8300790	
11	ALFA MART	Depan Ps.PSPT Tebet Timur / 8295687	
12	INDO MART	Jl.Tebet Timur Dalam XI / 8350926	
13	INDO MART	Jl.Bukit Duri Tanjakan No.82 / 8294710	
14	INDO MART	Jl.Bukit Duri Selatan No.62 / 8353155	
15	ALFA MART	Jl.Bukit Duri Selatan No.9 / 8280922	
16	INDO MART	Jl.Dr.Saharjo No.114 Manggarai/ 8297514	
	<b>SETIABUDI</b>		
1.	AMBASADOR	Jl. Prof. Dr. Satrio Kel. Karet Kuningan	Bpk. Hendrawisnubrata SH, 021-5766688, Fex. 021- 5762828.

2.	ITC. KUNINGAN	Jl. Prof. Dr. Satrio Kel. Karet Kuningan	Bpk. Ir. Wawan Setiawan 021. 57933888, HP 08129959678
3.	PS. FESTIVAL	Jl. HR. Rasuna Said Kel. Karet Kuningan	Bpk. Remon 021- 5263212
4.	PLAZA SEMANGGI	Jl. Jend. Sudirman Kel. Karet Semanggi	Bpk. Agung HP. 0811172510

5.	PS. MANGGARAI	Jl. Sultan Agung No. 1 Kel. Pasar Manggis	
	<b>MP. PRAPATAN</b>		
1.	GIANT MAMPANG	Jl. Mampang Prapatan Raya Kel. Mampang Prapatan	
2.	TENDEAN PLAZA	Jl. Kapten P. Tendean Kel. Kuningan Barat	
3.	HERO KEMANG	Jl. Kemang Dalam Kel. Bangka	
	<b>PASAR MINGGU</b>		
1	MALL CILANDAK KKO	Jl. Raya Cilandak KKO Rt. 003 / 005 Kel. Cilandak Timur Kec. Pasarminggu Jak-sel. Telp :	<b>WILI</b>
2	RAMAYANA	Jl. Raya Ragunan Kel. Pasarminggu Kec. Pasarminggu Jak-Sel. Telp : 021-7806321	<b>TRI SUSILO</b>
3	BOROBUDUR	Jl. Raya Ragunan Kel. Pasarminggu Kec. Pasarminggu Jak-Sel. Telp : 021-7803413	<b>EDI TUMEWU</b>
	<b>CILANDAK</b>		
1.	<b>D'BEST</b>	<b>JL. RS. Fatmawati, Gandaria Selatan.</b>	
2.	<b>CILANDAK TOWN SQUARE.</b>	<b>JL. TB Simatupang Kav 17 Cilandak Barat.</b>	
3.	<b>POINS SQUARE</b>	<b>JL. Lingkar Selatan Lebak Bulus.</b>	
	<b>KEB BARU</b>		
1	BLOK M PLAZA	Jl. Bulungan No. 76	
2	PASARAYA GARANDE	Jl. Iskandarsyah II No.2	
3	PASARAYA BLOK M	Jl. Sultan Hasanudin	
4	BLOK M MALL	Jl. Hasanudin	
5	DARMAWANGSA SQUARE	Jl. Wijaya	

<b>6</b>	<b>BLOK M SQUARE</b>	<i>Melawai Keb Baru Jaksel</i>	
	<b>CIPUTAT</b>		
1	Giant Swalayan	Jl. Ciputat Raya No. 88 Pisangan Ciputat. Telp. 021-7430962	
	<b>PANCORAN</b>		
1	PLAZA KALIBATA	Jl. Raya TMPN Kalibata, Kec. Rawajati	
2	CAREFOURE	Jl. Raya MT. Haryono, Kel. Cikoko	
3	SUPERINDO	Jl. Raya Buncit, Kel. Kalibata	
	<b>JAGAKARSA</b>		
	<b>PAMULANG</b>		
1.	PAMULANG SQUARE	Jl. Siliwangi Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang.	
2.	CARREFOUR	Jl. Siliwangi kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang.	
	<b>PESANGGRAHAN</b>		
1.	SUPERINDO	Jl.Bintaro Utama Bintaro	
2.	GIANT	Jl.RC.Veteran Bintaro	

a. Restoran

<b>NO</b>	<b>NAMA RESTORAN</b>	<b>ALAMAT/ NO. TELP</b>	<b>KETERANGAN</b>
	<b>KEBAYORAN LAMA</b>		
1	KFC ITC CIPULIR	Jl. Ciledug Raya No.18 Cipulir	
2	KFC ITC PM HIJAU	Lantai 2 ITC PM Hijau Jl. Kapten Soepeno Grogol Utara	
3	A & W ITC PM HIJAU	Lantai Dasar ITC Jl. Kapten Soepeno Grogol Utara	
4	MC DONALD PLAZA I PONDOK INDAH	Jl. Raya Metro Pondok Indah Pondok pinang	
5	PIZZA HUT PLAZA	JL. Raya Metro Pondok Indah	

	II PONDOK INDAH	pondok pinang	
6	A & W MAL I PONDOK INDAH	Jl. Raya Metro Pondok Indah Pondok Pinnang	
7	GRILL AMERIKA LT 1 PONDOK INDAH MALL	Jl. Raya Metro Pondok Indah Pondok pinang	
8	PAREGU	Jl.Sultan Iskandar Muda Keb. Lama Selatan	Sunyamin
	<b>TEBET</b>		
1.	RM. PADANG	Jl.Tebet BaratDalam,Tebet Jaksel	
2.	RESTORAN	Jl. Tebet Barat ,Tebet Jaksel	
3.	CAVE TEBET	Jl. Tebet Barat,Tebet Jaksel	
4.	MC DONAL	Jl. Prof.Dr.Supomo,Tebet Jaksel	
	<b>SETIABUDI</b>		
1	AYAM GORENG GEMES	Jl. Setiabudi Timur Rt 02/01	
2	PONDOK SALERO	Jl. Setiabudi II Rt 01/01	
3	PONDOK MIE 25	Jl. Setiabudi II Rt 01/02	
4	DUO SALERO	Jl. Taman Setiabudi Rt 01/02	
5	SOTO GEBRAK	Jl. Taman Setiabudi Rt 01/02	
6	BAKMI 99	Jl. Setiabudi Raya	
7.	ES TELER 77	Plaza Semanggi Lt. 3 Jl. Jend Sudirman Kav. 50 Karet Semanggi Setiabudi Jakarta Selatan	PT. Cita Selera Nusantara <b><i>Lin Mawuhut</i></b>
8.	BAKMI MENTENG	Plaza Semanggi Lt. 3 Jl. Jend Sudirman Kav. 50 Karet Semanggi Setiabudi Jakarta Selatan	PT. Cita Selera Nusantara <b><i>Lin Mawuhut</i></b>
9.	CHIKEN STORY	Plaza Semanggi Lt. 3 Jl. Jend Sudirman Kav. 50 Karet Semanggi Setiabudi Jakarta Selatan	PT. Cita Selera Nusantara <b><i>Lin Mawuhut</i></b>
10.	KEMBANG GULA	GD. Plaza Central Jl. Jend Sudirman Karet Semanggi Setiabudi Jaksel.	<b><i>021- 5205631</i></b>
11.	AMARIN	GD. Plaza Central Jl. Jend Sudirman Karet Semanggi	<b><i>021- 5205624</i></b>

		Setiabudi Jaksel.	
12.	MC. DONALD	GD. Plaza Central Jl. Jend Sudirman Karet Semanggi Setiabudi Jaksel.	<i>021- 5702148</i>
13.	SUSHI	Gd. Belagio Beutique Jl. Lingkar Mega Kuningan Kuningan Timur Setiabudi Jakarta Selatan.	<i>PT. RA. Sushi Andreas Setiadi</i>
14.		Gd. Belagio Residence Jl. Lingkar Mega Kuningan Barat IX Kuningan Timur Setiabudi Jakarta Selatan.	<i>PT. Trinex Agro Product Fahmi A. Assegaf</i>
15.	DRAGON	Plaza DM Lt dasar Jl. Jend Sudirman Kel. Karet	
16.	MARCENTILE	WTC Lt. 18 Jl. Jend Sudirman Kel. Karet	
17.	ANGUS	Gd. Chise Plaza Lt. 20 Jl. Jend Sudirman Kel. Karet	
18.	SAMIBIAN	Gd. Chise Plaza Lt. 25 Jl. Jend Sudirman Kel. Karet	
19.	MIING	Gd. Setiabudi One Jl. HR. Rasuna Said Kel. Karet	
20.	RM SEDERHANA	Jl. Sultan Agung Pasar Manggis Setiabudi Jakarta Selatan	
21.	SURYA	Jl. DR. Satrio Karet Kuningan	
	<b>MP. PRAPATAN</b>		
1	HYDEN PARK	Jl. Kemang Rava 45 Kel. Bangka	
2	PIZZA HUT	Jl. Kemang Rava 61 Kel. Bangka	
3	SUMO SUSHI	Jl. Kemang Raya 17 Kel. Bangka	
4	IZZI PIZZA	Jl. Kemang Raya 93 Kel. Bangka	
5	FRANKFUTTER	Jl. Kemang Raya No. 120 Kel. Bangka	
6	RM SAIGON	Jl. Kemang Raya No. 15 Kel. Bangka	
7	MC. DONALDS	Jl. Kemang Raya NO.1 0 Kel. Bangka	
8	HOKA-HOKA BENTO	Jl. Kernang Raya NO.3 Kel. Bangka	
9	KFC KEMANG	Jl. Kernang Raya No. 14 Kel. Bangka	

10	TAMANI CAFE	Jl. Kernanq Raya NO.5 Kel. Bangka	
11	STARBUCK CAFE	Jl. Kernanq Raya NO.5 Kel. Bangka	
12	DELLA ROSSA	Jl. Kernanq selatan 111 Kel. Bangka	
13	SERVINO RESTO	Jl. Kernanq Raya Kel. Bangka	
14	GANG-GANG SULAY	Jl. Kernang Raya No. 33 Kel. Bangka	
15	DIJAN,S	Jl. Kernang Selatan 102A Kel. Bangka	
16	NAPOLINA	Jl. Kernang Raya NO.5 Kel. Bangka	
17	ISTAMBUL KITCHEN	Jl. Kernang Raya No. Kel. Bangka	
18	DAPUR GEULIS	Jl. Kernang Raya No. 17A Kel. Bangka	
19	FJ RESTO	Jl. Kernang Raya No. 25 Kel. Bangka	
20	HUIZE VAN WEL Y	Jl. Kernang Raya No. 81 Kel. Bangka	
21	DE PLUM BISTRO	Jl. Kernanq Raya No. 14B Kel. Bangka	
22	WANGKEE	Jl. Kernanq Raya No. 27 Kel. Bangka	
23	DIM SUM FESTIVAL	Jl. Kernanq Raya No. 27 Kel. Bangka	
24	PAVON CAFE	Jl. Kernang Raya NO.9 Kel. Bangka	
25	WENDYS	Jl. Kernang Raya NO.3 Kel. Bangka	
26	NANDOS	Jl. Kernang Raya NO.5 Kel. Bangka	
27	OKTROI CAFE	Jl. Kernang Raya NO.1 Kel. Bangka	
28	OISHI	Jl. Kernang Raya NO.2 Kel. Bangka	
29	MIRASARI	Jl. Kernang Utara No. 33 Kel. Bangka	
30	CLEO'S	Jl. Kernanq Raya No. 2-H Kel. Bangka	
31	DOUNKINS DONAT	Jl. KemanQ Raya No.2 Kel. Bangka	
32	WWW.WOK	Jl. KemanQ Raya No.8	

		Kel. Bangka	
33	COTTERI SPOON	Jl. KemanQ Raya No. 14B Kel. Bangka	
34	PJ'S BROASTER	Jl. KemanQ Raya No. 15 Kel. Bangka	
35	ANATOLIA	Jl. KemanQ Raya No. 11 OA Kel. Bangka	
36	CASWELL COFFE	Jl. KemanQ Raya No. 1 Kel. Bangka 15B	
37	MOM' CASWELL	Jl. Kemang Raya Kel. Bangka	
38	WAROENG BABA	Jl. KemanQ Raya No. 78 Kel. Bangka	
39	KOI	Jl. KemanQ Raya No.1 0 Kel. Bangka	
40	ARABIAN RESTO	Jl. Kemang Raya No. 82A Kel. Bangka	
41	CHOPSTIK REST	Jl. KemanQ Raya 17 Kel. Bangka	
42	RM. AYAM GORENG SUHARTI	Jl. Kapt. Pierre Tendean Kel. Kuningan Barat	
43.	BLOWFISH	Gd. Wisma Mulya Jl. Jend. Gatot Soebroto Kel. Kuningan Barat	
	<b>PASAR MINGGU</b>		
01.	SIMPANG RAYA	Jl. Raya Pasarminggu KM.18 Kel. Pejaten Timur Kec. Pasarminggu Jak – Sel. Telp : 021 - 7940320	<b>JONI SUHANA</b>
02.	SEDERHANA	Jl. Raya Pasarminggu KM.18 Kel. Pejaten Timur Kec. Pasarminggu Jak – Sel. Telp ; 021 - 7982430	<b>ROHADI</b>
03.	CIPPES	Jl. Raya Pasarminggu VOLVO Kel. — Pejaten Timur Kec. Pasarminggu Jak – Sel. Telp : 021 - 7989070	<b>ROHAYATI</b>
04.	DE BLUES RESTO	Jl. Raya Pasarminggu No. 57 Kel. Pejaten Timur Kec. Pasarminggu Jak – Sel. Telp : 021 - 7970772	<b>JAENAL ABIDIN</b>
05.	PONDOK ULAM	Jl. Ampera Raya Kel. Cilandak Timur Kec. Pasarminggu Jak-Sel.	-



		Telp : 021-7805835.	
06.	BAWAKARAENG	Jl. Ampera Raya Kel. Cilandak Timur Kec. Pasarminggu Jak-Sel. Telp : -	-
07.	PONDOK MAWAR		-
08.	WARUNG TANALOT	Jl. Ampera Raya Kel. Ragunan Kec. Pasarminggu Jak-Sel. Telp : 021-78841000.	-
09.	PAWON JAWA	Jl. Ampera Raya Kel. Cilandak Timur Kec. Pasarminggu Jak-Sel. Telp : 021-7805773	-
	<b>CILANDAK</b>		
	<b>KEBAYORAN BARU</b>		
1	SWALAYAN PAPAYA	Jl. Melawai Raya	
2	INDA URUWASHI	Jl. Melawai VI / 15 A	
3	MARUKUKU	Jl. Melawai VI / 11	
4	SUSHI KAWANA	Jl. Melawai IX / 18	
5	SARI KURING	Jl. Melawai Raya No. 5	
6	PESANGGRAHAN	Jl. Wijaya IX	
7	MIDORI	Jl. Tanggamus IV / I Kel Gunung	
8	TO BAK	Jl. W. Monginsidi No. 30	
9	PIZZA HUT BLOK M PLAZA	Jl. Bulungan No. 76	
10	PIZZA HUT FAMILY	Jl. W. Monginsidi No. 77	
11	PIZZA HUT PASARAYA 12BLOK M	Jl. Iskandarsyah II / 2	
12	IZZI PIZZA	Gd. BEJ Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53	
13	DAPUR KURING	Jl. Ahmad dahlan	
14	SARI MELAYU RESTORAN	Jl. Ahmad Dahlan	
15	YURAKU BUFFET	Jl. Ahmad Dahlan	
16	WARUNG BANDUNG	Jl. Ahmad Dahlan	
17	RUMAH MAKAN NUSA INDAH	Jl. Ahmad Dahlan	
18	AUSSY BUNGER	Jl. Ahmad Dahlan	
19	RAME – RAME	Jl. Ahmad Dahlan	
20	RESTORAN BELANDA	Jl. Ahmad Dahlan	

21	GURGER & GRILL	JL. Ahmad dahlan	
22	PONDOK SEEFOD	Jl. Radio Dalam No. 11 Tlp.7205744	
	<b>CIPUTAT</b>		
1	Pizza Hut Ayam	Jl. Ir.H.Juanda No. Kel. Cempaka Putih	
2	Kfc (Spbu Petronas)	Jl.Ir.H.Juanda Kel. Cirendeudeu	
3	Kfc Cirendeudeu	Jl. Cirendeudeu raya No. 22 Kel. Pisangan	
4	Ayam Panggang Situ Gintung	Jl. Ir.H.Juanda Kel. Cirendeudeu	
5	Ayam Bakar Cirendeudeu	Jl. Cirendeudeu Raya kel. Cirendeudeu	
6	Steak Obong	Jl. Rempoa Raya Kel. Rempoa	
7	Serba Nikmat	Jl. Ir.H. Juanda (samping Kampus UIN Jakarta) Kel. Cempaka Putih	
8	Baso Atom	Jl. Ir.H. Juanda Kel. Cirendeudeu	
9	Ciken	Jl. Ciputat Raya No. 88 Pisangan Ciputat	
10	Korea Food	Jl. Ir.H.Juanda Kel. Cempaka Putih	
	<b>PANCORAN</b>		
1	RATU KURING	Jl. Buncit Raya, Duren Tiga	
2	SOTO GADING	Jl. Raya Kalibata	
3	DAPUR SUNDA	Jl. Gatot Subroto	
4	BAKMI NAGA	Plaza Kalibata	
	<b>JAGAKARSA</b>		
1.	H.NASUN	JL.M.KAFI II RT,11/08 SRENGSENG SAWAH	H.NASUN
2.	RM.MANG ENGKING	PERBATASAN DANAU SETU UI	H.ENGKING
3.	RM.SUHARIASIH	JL.RAYA LT.AGUNG TIMUR TLP.788884572	IBU SUHARIASIH
4.	PASAR IKAN	JL.RAYA LT.AGUNG TIMUR	BPK.JOKO
	<b>PAMULANG</b>		
1.	KFC	Pamulang Square Jl Pajajaran Kel. Pamulang Barat Kec.Pamulang	

2.	CFC	Pamulang Square Jl Pajajaran Kel. Pamulang Barat Kec.Pamulang	
3.	A & W	Pamulang Square Jl Pajajaran Kel. Pamulang Barat Kec.Pamulang	
4.	HOKA-HOKA BENTO	Jl. Siliwangi Superindo Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang	
5.	POPEYE	Jl. Siliwangi Superindo Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang	
6.	PIZZA HUT	Jl. Siliwangi Carefour Expres Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang	
7.	MC. DONALD	Jl. Siliwangi Kel. Benda Baru Kec. Pamulang	
8.	MBOK BEREK	Jl. Siliwangi Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang	
9.	RESTORAN PAMULANG	Jl. Pamulang permai Blok SH.8/3 Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang	
10.	RESTORAN BU		

11.	TJONDRO STEAK OBONG	Jl. Terbang Layang Kel. Pondok Cabe Ilir Kec. Pamulang.Tlp.021- 7490578	
12.	RESTORAN SARI GUCCI	Jl. Setia Budi Kel. Pamulang barat Kec. pamulang	
13.	RESTORAN SEDERHANA	Ruko Pamulang Permai Kel. Pamulang barat Kec. Pamulang	
14.	RESTORAN PAMULANG PERMAI	Jl. Raya Pondok Cabe Udik Kel. Pondok Cabe Udik Kec. Pamulang Pamulang Permai Blok SH.8/4 Kel. Pamulang Barat Kec.	
15.	RESTORAN RUKO PAMULANG PERMAI	Pamulang.Tlp.021-7405226 Ruko pamulang Permai Blok SH. 10/13 Kel. Pamulang Barat Kec.	
16.	RESTORAN H. REAN	Pamulang.Tlp.021-7400651 Jl. H. Rean Kel. Benda Baru Kec. Pamulang.Tlp.021-7440301	

## BAB 5

### PELAKSANAAN PARAMILITARY POLICING DI POLRES KOTA BOGOR

Dalam bab ini dibahas fungsi dan peranan Satfung Sabhara, implementasi tugas sabhara dalam hal ini tata cara penanganan aksi unjuk rasa dimulai dari pemberian APP penggunaan alat kelengkapan Dalmas, formasi Dalmas serta beberapa ilustrasi kasus penanganan aksi unjuk rasa di wilayah Polres Kota Bogor (pengamanan aksi unjuk rasa di Istana Bogor dan sidang kasus Ahmadiyah).

#### 5.1 Satfung Sabhara

Satuan sabhara adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Satuan samapta bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi kesamaptaan kepolisian/tugas polisi umum dan pengamanan obyek khusus termasuk pengambilan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa dan pemberdayaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk di Polres Kota Bogor, Sat Sabhara dipimpin oleh seorang AKP (perwira pertama) dan bertanggung jawab langsung kepada Kapolres Kota Bogor.

#### 5.2 Implementasi Tugas: Tata Cara Penanganan Unjuk Rasa

Sebelum menangani aksi unjuk rasa untuk satuan fungsi samapta sebelumnya dilakukan **APP atau acara pimpinan pasukan** oleh Kasat Samapta, sebagaimana uraian berikut :

*“APP adalah kegiatan yang sering dilakukan Kasat Sabhara apabila kita akan melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa.”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Briptu EK anggota Sabhara Polresta Bogor.

APP merupakan arahan dari pimpinan tentang tindakan yang harus dilakukan oleh anggota untuk melakukan aksi pengamanan unjuk rasa. Selain itu kegiatan tersebut dilakukan sebagai konsolidasi mengenai jumlah kekuatan, pengecekan peralatan, sikap tampang dan atribut, yang harus digunakan selama kegiatan pengamanan. Tidak lupa saat kegiatan konsolidasi juga dilakukan acara mengecek perlengkapan yang harus dibawa seperti tameng, helm alat pemadam dan gas air mata yang nantinya semua perlengkapan tersebut digunakan secara normal dan lancar.

*“Penunjukkan untuk memegang dan menggunakan alat pemadam kebakaran dan gas air mata dilakukan Danton Dalmas dengan diberikan kepada anggota yang sudah senir dari segi kepangkatan”<sup>2</sup>*

Penggunaan tameng dan helm adalah sarana untuk melindungi petugas/anggota Polri apabila telah terjadi pelemparan yang dilakukan massa aksi sebagai reaksi dari kekecewaan massa aksi yang tuntutananya tidak diakomodir oleh pihak-pihak yang dituju. Pada kegiatan pemberian APP, Danton (komandan pleton) dalmas selain mengecek kekuatan anggota juga melakukan penunjukan siapa saja anggota yang diberi kepercayaan memegang dan menggunakan alat pemadam kebakaran dan gas air mata. Penggunaan gas air mata dilakukan apabila massa sudah mulai anarkis dan telah mengganggu ketertiban umum seperti memblokir jalan atau melakukan sandera terhadap kendaraan-kendaraan tertentu, sedangkan penggunaan alat pemadam (Apar) yang berisi gas CO<sub>2</sub> dilakukan apabila massa aksi telah melakukan aksi pembakaran. Perintah penggunaan senjata gas air mata dan alat pemadam kebakaran dilakukan berdasarkan perintah Danton atau Dankie Dalmas.

Selain itu dalam APP diberikan pengarahan kepada anggota tentang tindakan dan sikap yang harus dilakukan pada massa aksi seperti harus memberikan senyuman, ramah, humanis, namun tetap tegas serta tidak emosi dan tidak mudah terprovokasi. Biasanya aksi provokasi sering dilakukan massa aksi agar personil kepolisian terpancing emosi sehingga menjadikan situasi yang tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu sikap dan tindakan

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Kasat Sabhara Polresta Bogor.

yang dilakukan oleh anggota Dalmas adalah **ikatan kesatuan dan bukan ikatan perorangan**, jadi tindakan yang harus dilakukan yaitu berdasarkan perintah Dantom atau Danki Dalmas.

*“Massa yang melakukan aksi unjuk rasa adalah saudara kita oleh karena itu kita harus memberikan pelayanan yang terbaik karena polisi adalah pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat, apalagi kegiatan tersebut yaitu dalam rangka mengemukakan pendapat di muka umum di jamin oleh UU”<sup>3</sup>*

Di Polres Bogor Kota apabila anggota Dalmas tidak ada kegiatan dalam penanganan aksi unjuk rasa, maka selain latihan Dalmas juga dilatihkan bagaimana memberikan sikap senyum terhadap masyarakat. Sikap senyum yang diberikan oleh anggota Dalmas terhadap terhadap massa yang melakukan aksi unjuk rasa diharapkan membuat suasana tidak panas, mencair dan yang lebih penting berjalan aman dan lancar, satu sama lainnya saling menghargai.

Setelah pemberian APP anggota Dalmas langsung menuju lokasi dimana aksi unjuk rasa dilakukan oleh kelompok massa tertentu. Kendaraan yang digunakan adalah angkutan truk dinas Polri. Kendaraan dinas yang digunakan yaitu sebanyak 2 (buah) truk untuk mengangkut 2 (dua) pleton Dalmas beserta perlengkapannya. Kendaraan dinas tersebut di bagian kiri dan kanan kendaraan terlihat dan terpampang tulisan “POLISI” sedangkan bagian depannya tepatnya dibagian kepala kendaraan di pasang rotator yang dilengkapi dengan sirene. Penggunaan rotator warna biru yang dilengkapi dengan sirene polisi dikandung maksud yaitu untuk memudahkan anggota Polri menuju lokasi aksi unjuk rasa dengan cepat, tepat dan aman, sehingga kondisi cukup kondusif untuk memberikan pelayanan pengamanan terhadap massa yang melakukan aksi.

Kondisi-kondisi lapangan memerlukan kecepatan dan ketetapan serta keamanan dalam menangani aksi unjuk rasa, selain menunjukkan sikap profesionalisme Polri, secara psikologis memberikan dampak positif terhadap warga masyarakat lain yang diperkirakan akan terganggu oleh adanya aksi unjuk rasa tersebut.

Setelah di TKP, biasanya anggota Dalmas langsung membentuk barisan satu banjar tepat dibelakang obyek yang akan di demo. Kalau terjadi di perkantoran atau gedung

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Kasat Sabhara Polresta Bogor

swasta/pemerintah, pengamanan dilakukan di depan pintu masuk atau di depan pintu keluar. Pengamanan aksi unjuk rasa dilakukan oleh anggota Polri tanpa menggunakan tameng dan helm, tetapi hanya atribut normal kepolisian saja yang digunakan seperti atribut atau seragam kepolisian beserta baretnya.

*”Ketika massa masih damai maka pengamanan aksi dilakukan dengan atribut kepolisian secara normal saja dan tidak menggunakan tameng dan helm”<sup>4</sup>*

Dalmas awal dan Dalmas lanjut dilakukan untuk mengantisipasi terhadap situasi yang kurang menguntungkan bagi anggota Polri dalam mengamankan aksi tersebut, sehingga untuk mengamankan dan memroteksinya maka diberlakukan Dalmas lanjut.

*”Pada saat Dalmas awal maka digambarkan massa aksi masih damai jadi tidak menggunakan tameng dan helm, namun apabila eskalasi sudah meningkat yang mana massa sudah mulai rusuh dan anarkis maka berlaku Dalmas lanjut yang mana berdasarkan Kep Kapolri tahun 2006, anggota Dalmas menggunakan helm dan tameng”<sup>5</sup>*

Untuk 1 (satu) kompi Dalmas dibutuhkan 3 (tiga) pleton. Di Polres Bogor Kota untuk menutupi satu pleton diambil dari tiap-tiap polsek yang melibatkan anggota patroli polisi dari tiap-tiap polsek. Jajaran Polsek yang terdapat di wilayah Kota Bogor terdiri dari 6 (enam) buah Polsek.

*”Kekurangan anggota Dalmas dari Polresta Bogor untuk pengamanan aksi unjuk rasa biasanya di back up oleh regu patroli Polsek yang sedang piket pada saat itu.”<sup>6</sup>*

Secara teknis, setelah Bag Ops Polresta Bogor membutuhkan *back-up* personil untuk membantu pengamanan aksi unjuk rasa maka regu patroli dari masing-masing Polsek yang sedang piket langsung meluncur ke TKP. Sedangkan untuk perlengkapan sudah disiapkan satu

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Briptu DN anggota Sabhara Polresta Bogor.

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Kasat Sabhara Polresta Bogor.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Kasat Sabhara Polresta Bogor.



buah truk polisi yang membawa perlengkapan Dalmas. Kemudian setelah tiba di TKP anggota dari Polsek tersebut langsung berada dibawah kendali Danki Dalmas/Kasat Sabhara.

Selain itu di Polresta Bogor mengenal istilah *Dalmas Kerangka* yaitu anggota Dalmas yang disiapkan di Polresta, terdiri dari staf dari fungsi-fungsi di luar fungsi Samapta seperti fungsi Intelkam, Reskrim, Binamitra, Narkoba, dan Obvit. Hal ini untuk mengantisipasi apabila dibutuhkan jumlah personil Polri dalam jumlah yang besar.

*"Dalmas Kerangka dibentuk berdasarkan Surat Perintah dari Kapolresta Bogor, sehingga biasanya anggota staf yang sudah di sprin kan dan biasa menggunakan pakaian preman (Intelkam, Reskrim dan Narkoba) diruangannya sudah tersedia pakaian dinas dan siap untuk turun ke lapangan"*<sup>7</sup>

Penanganan aksi unjuk rasa di wilayah hukum Polres Bogor Kota biasanya terlebih dahulu mengedepankan **tim negosiator** yaitu pasukan setingkat pleton yang anggotanya terdiri dari Polwan dari tiap-tiap satuan fungsi. Tim negosiator ini merupakan pasukan yang memberikan ajakan-ajakan kepada massa agar tertib, aman dan lancar selama kegiatan berlangsung. Satu pleton tim negosiator tersebut dipimpin oleh seorang Danton Polwan yang berpangkat Ipda/Iptu. Berikut uraiannya:

*"Tim negosiator biasanya berperan untuk mencairkan situasi yang ada agar tercipta komunikasi yang baik dan lebih mengedepankan tindakan-tindakan persuasif dan preventif."*<sup>8</sup>

Penanganan aksi unjuk rasa yang melibatkan perempuan dengan jumlah besar maupun kecil, maka keberadaan tim negosiator yang terdiri anggota Polwan dirasakan sangat efektif, mengingat alasan gender dan merupakan salah bentuk profesionalisme anggota Polri dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat. Meskipun melibatkan dari berbagai satuan fungsi kerja pada pelaksanaan tugasnya, tim negosiator

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara Kapolresta Bogor.

<sup>8</sup> Hasil wawancara Kapolresta Bogor.

menggunakan pakaian dinas lapangan Polri (PDL) lengkap dengan atribut, namun mereka tidak dilengkapi helm dan tameng. Untuk menuju ke TKP setelah diberikan APP oleh Dantonnya mereka menggunakan sebuah kendaraan dinas milik Polri.

Kemudian untuk mengilustrasikan kegiatan tersebut diatas terutama dalam hal pengamanan dan penanganan aksi unjuk rasa maka peneliti akan membandingkan 2 (dua) buah peristiwa yang terjadi di wilayah Kota Bogor , diantaranya yaitu :

### **5.2.1 Massa HMI Bentrok dengan Polisi di Depan Istana Bogor**

*Senin, 21 Februari 2011 12:54 wib*



Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)



Gambar tersebut diatas terjadi pada hari Senin tanggal 21 Februari 2011, yang mana sejumlah komponen mahasiswa yang tergabung dalam massa HMI Kota Bogor terlibat berok dan saling dorong mendorong dengan petugas Kepolisian Kota Bogor di depan Istana Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat. Massa terlibat bentrokan dengan aparat saat mencoba mendekati Istana Bogor. Bentrokan bermula dari aksi petugas keamanan yang dari awal melarang aksi di depan Istana dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap para mahasiswa.

Personil untuk mengamankan aksi unjuk rasa ini yaitu dikerahkan sebanyak 600 lebih personel gabungan Polres Bogor Kota, Polda Jabar, dan Brimob Polda Jabar dikerahkan. Dalam aksinya para mahasiswa menuntut SBY mundur karena telah mengingkari janjinya. Menurut para mahasiswa, SBY dianggap gagal dalam bidang pemberantasan mafia hukum, peningkatan kesejahteraan rakyat, penanganan teroris dan lainnya.

## 5.2.2 Masjid Ahmadiyah di Bogor di Segel.

### Masjid Ahmadiyah di Bogor Disegel



Gambar tersebut diatas terjadi pada hari Senin tanggal 4 april 2011, yang mana sejumlah sejumlah aparat kepolisian yang cukup banyak sedang berjaga-jaga di depan sebuah mesjid milik Ahmadiyah yang telah di segel warga yang terletak di Sindang Barang Kec. Bogor Barat Kota Bogor.

Selain itu sekitar 500 aparat Polres Bogor Kota dan Polsek Bogor Barat berjaga-jaga di Kantor Lurah setempat (Sindang Barat) yang mana sekitar seratus warga menggelar unjuk rasa menuntut pembubaran jemaah ahmadiyah.

## BAB 6

### PELAKSANAAN PARAMILITARY POLICING DI POLRES METRO JAKSEL

Dalam bab ini dibahas fungsi dan peranan Satfung Sabhara, implementasi tugas sabhara dalam hal ini tata cara penanganan aksi unjuk rasa dimulai dari pemberian APP penggunaan alat kelengkapan Dalmas, formasi Dalmas serta beberapa ilustrasi kasus penanganan aksi unjuk rasa di wilayah Polres Metro Jaksel (pengamanan sidang ABB dan kasus bentrok Ampera).

#### 6.1 Satfung Sabhara

Satuan samapta adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada di bawah Kapolres. Satuan samapta bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi kesamaptaan kepolisian/tugas polisi umum dan pengamanan obyek khusus termasuk pengambilan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa dan pemberdayaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Satfung samapta terdiri dari urusan administrasi dan ketatausahaan, satuan setingkat kompi atau peleton pengendalian massa, serta sejumlah unit antara lain unit turjawali, unit obvit, dan unit dalmas. Di Polres Metro Jaksel fungsi Sabhara dipimpin oleh seorang Kasat Sabhara berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi.

#### 6.2 Implementasi Tugas: Tata Cara Penanganan Unjuk Rasa

Secara khusus fungsi Samapta dalam penanganan aksi unjuk rasa dilakukan melalui pendekatan preventif. Secara normatif pengamanan kegiatan aksi unjuk rasa dilakukan dengan cara aman dan damai demi teraspirasikannya suara atau tuntutan massa aksi. Tidak jauh berbeda penanganan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Polresta Bogor, maka di Polres Metro Jaksel dimulai juga dari pemberian APP, mobilitas menuju TKP serta kendaraan transport yang

digunakan hampir sama. Namun mengingat kompleksitas permasalahan, situasi kota serta karakteristik wilayah Jakarta Selatan, ada beberapa perbedaan dalam pelaksanaan teknis di lapangan.

Dalam penanganan aksi unjuk rasa yang dilakukan Polres Metro Jaksel memiliki Satuan Dalmas satu kompi yang langsung di pimpin oleh seorang Danki berpangkat Ajun Komisaris Polisi dan bertanggung jawab langsung kepada Kasat Sabhara yang berpangkat Kompol. Kekuatan satu kompi untuk wilayah hukum Restro Jaksel lengkap dengan semua perlengkapan Dalmas yang dimiliki. Dalmas Restro Jaksel terdiri dari 3 (tiga) pleton yang mana masing-masing pleton dipimpin oleh seorang Danton. Jumlah anggota terdiri dari 30 (tiga puluh) orang per pleton. Masing-masing pleton memiliki satu unit kendaraan truk untuk mobilitas dalam melakukan aksi unjuk rasa. Biasanya di dalam satu truk tersebut telah tersedia alat pemadam, gas air mata dan cadangan serta tameng dan helm serta tongkat kecil dari rotan yang biasa digunakan sebagai alat pemukul.

Kegiatan pengamanan aksi unjuk rasa biasanya diawali dari adanya ren-giat (rencana kegiatan) harian dari fungsi Intelkam tentang akan berlangsungnya aksi unjuk rasa. Penyampaian pemberitahuan pelaksanaan kegiatan pada hari itu biasanya disampaikan oleh Ka SPK (Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian) kepada seluruh anggota kepolisian Restro Selatan yang disampaikan sebelum pelaksanaan apel pagi.

*“Pemberitahuan akan adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh komponen masyarakat secara garis besar biasanya di sampaikan oleh Ka SPK atau perwira yang mewakili sebelum sesaat pelaksanaan apel pagi dimulai, namun khusus Kasat biasanya sudah diberitahukan oleh Kasat Intelkam melalui telepon pada malam harinya.”<sup>9</sup>*

Kemudian setelah pelaksanaan apel pagi selesai, Kasat Samapta langsung memberikan APP tersendiri kepada anggota Samapta yang terdiri anggota Dalmas dan anggota Patroli, APP yang diberikan yaitu menyangkut pelaksanaan tugas yang harus dilakukan oleh anggota selama

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir AD anggota Sabhara Restro Jaksel.

aksi unjuk rasa berlangsung, seperti jangan mudah terpancing emosi, harus sabar, sikap profesionalisme, serta prosedur tetap yang harus dijalankan selama pengamanan kegiatan aksi tersebut.

*”Sikap profesionalisme Polri yang harus dilakukan oleh setiap anggota yaitu disiplin, tegas namun humanis dan mengetahui serta memahami prosedur tetap dalam penanganan aksi unjuk rasa seperti tidak melakukan tindakan sendiri-sendiri, jangan melaksanakan perintah selain atas perintah Kasat Sabhara, Danki Dalmas atau Danton Dalmas. Selain itu dalam melakukan setiap tindakan harus ikatan pleton atau kompi”*

Dalam pemberian APP tersebut juga dijelaskan lokasi yang akan dijadikan obyek pengamanan, jumlah massa dan kelompok yang akan mengikuti kegiatan aksi, Korlap serta tuntutan yang akan disampaikan. Setelah Kasat Samapta memberikan APP dilanjutkan oleh Dankie Dalmas memberikan APP kepada anggotanya. Biasanya APP yang diberikan seputar pengecekan kelengkapan atribut kepolisian, pengecekan kehadiran anggota, serta kelengkapan peralatan yang harus dibawa.

*“Kelengkapan peralatan yang harus dibawa biasanya yaitu tameng, tongkat, alat pemadam dan gas air mata , apakah masih berfungsi dengan baik , apabila tidak berfungsi seperti helm dan tameng maka akan ditukar dan minta ke bagian logistik , sedangkan untuk gas air mata di cek apakah senjata masih layak digunakan serta pengecekan gas air matanya apakah masih ada atau sudah kosong, sedangkan untuk alat pemadam kebakaran dipastikan apakah segel dan pin penguncinya masih berfungsi dengan baik atau tidak serta di cek apakah masih gas nya masih tersedia atau sudah habis, kalau seandainya sudah habis maka akan segera diisi gas CO2 nya”<sup>10</sup>*

Setelah Dankie Dalmas memberikan APP kepada anggota kemudian APP selanjutnya dilakukan Danton Dalmas. Danton Dalmas memberikan APP lebih spesifik terhadap pengecekan kehadiran jumlah anggota, melakukan tindakan disiplin terhadap anggota yang tidak masuk tanpa alasan karena tidak mengikuti kegiatan, penunjukkan anggota yang memegang gas air mata serta yang membawa alat pemadam kebakaran.

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Kasat Sabhara Restro Jaksel.

*"Tindakan disiplin terhadap anggota biasanya langsung diberikan langsung pada anggota yang bersangkutan pada saat APP agar menimbulkan efek jera kepada anggota yang lainnya. Biasanya tindakan disiplin yang diberikan yaitu lari memutari komando, sikap push up dan berguling"<sup>11</sup>*

Penunjukkan anggota yang menggunakan dan membawa gas air mata biasanya ditunjuk yang paling senior dari segi pangkat dan biasanya memiliki level kelas 1 pada saat memegang senjata api. Sedangkan untuk yang membawa alat pemadam kebakaran biasanya bergantian diantara anggota pleton tersebut. Sedangkan untuk tameng dan helm serta perlengkapan penunjang lain seperti body protektor sudah tersedia dalam bus/truck dinas yang mana pada teknis pelaksanaan tiap-tiap individu tinggal membawanya. Penggunaan kelengkapan alat Dalmas tersebut menunggu perintah secara berjenjang dari Kasat Sabhara, Danki Dalmas dan terakhir Danton Dalmas yang tentunya sambil memperhatikan eskalasi situasi pada saat terjadinya aksi unjuk rasa tersebut.

Perbedaan lain dengan Polres Bogor Kota, pada saat kompi Dalmas di Restro Jaksel di BKO kepada Polsek yang meminta bantuan pengamanan aksi unjuk rasa, maka kendali anggota atau perintah pada saat pengamanan aksi unjuk rasa langsung berada di bawah perintah Ka Pam Obyek yang dalam hal ini Kapolsek. Sehingga, meskipun dari segi kepangkatan Kapolsek lebih junior dari pada Kasat Sabhara, karena sudah dibawah kendali Kapolsek, maka Kapolsek sebagai Ka Pam Obyek yang memiliki kewenangan penuh memberdayakan anggota Dalmas dari Restro Jaksel tersebut. Adapun Kasat Sabhara, Danki dan Danton Dalmas hanya sebagai kepanjangan tangan Ka Pam Obyek.

*"Ka Pam Obyek dalam hal ini memiliki kewenangan penuh untuk mengendalikan anggota Dalmas, karena beliaulah yang langsung terjun kelapangan dalam melakukan pengamanan aksi unjuk rasa dan bertanggungjawab penuh terhadap situasi Kamtibmas diwilayahnya"<sup>12</sup>*

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir EK anggota Sabhara Restro Jaksel.

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Kasat Sabhara Restro Jaksel.



Perlu ditegaskan, bila terjadi aksi unjuk rasa maka Danki Dalmas dan para Danton hanya menunggu perintah dari Ka Pam Obyek sebagai pengendali di lapangan, yang mana komando/perintah harus datang dari Ka Pam Obyek tersebut, sehingga komando atau perintah terpusat pada Ka Pam Obyek. Pada saat aksi unjuk rasa berlangsung kendaraan truk dinas (Polri) yang membawa anggota Dalmas *stand by* tidak jauh dari lokasi aksi unjuk rasa, hal ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas / pergerakan apabila aksi unjuk rasa meningkat eskalasinya.

Wilayah hukum Polres Metro Jaksel memiliki beberapa tempat yang sering dijadikan sasaran aksi unjuk rasa yaitu diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kedubes Malaysia, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, Wisma Bakrie, Gedung Free Port, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kediamanan Dubes Malaysia, Jamsostek dan Polda Metro Jaya

Banyaknya tempat yang dijadikan sasaran aksi unjuk rasa dengan jumlah massa cukup besar dan bahkan dengan waktu yang bersamaan mengakibatkan pelayanan dalam memberikan pengamanan aksi unjuk rasa tidak dapat dicover secara keseluruhan oleh satuan setingkat kompi yang terdapat di Restro Jaksel, oleh karena itu Kapolres sebagai penanggung jawab Kamtibmas di wilayah hukum Polres Jakarta Selatan melakukan koordinasi dengan Kapolda Metro Jaya Up. Karo Ops Polda Metro Jaya dengan tembusan Dir Samapta Polda Metro Jaya untuk memberikan bantuan atau back up pasukan khususnya Sat Dalmas Polda Metro Jaya untuk penebalan pasukan dalam rangka mengamankan aksi unjuk rasa diwilayahnya.

*“Permintaan bantuan pasukan dari Sat Dalmas Polda Metro Jaya apabila informasi dari intelijen sudah AI mengenai jumlah massa yang banyak dan aksi unjuk rasa berlangsung dibeberapa tempat”<sup>13</sup>*

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Kasat Sabhara Restro Jaksel.

Permintaan bantuan pasukan dari Dalmas Polda Metro Jaya biasanya diberikan kepada wilayah yang sudah meminta, namun terkadang permintaan bantuan tersebut juga tidak terpenuhi apabila kegiatan di Polda cukup padat dan memerlukan penggelaran kekuatan pasukan yang cukup besar atau wilayah lain yang sudah meminta terlebih dahulu untuk di back up pasukan Dalmas.

Sat Dalmas Polda Metro Jaya memiliki 8 (delapan) satuan setingkat kompi yang mana setiap kompi terdiri dari 3 (tiga) pleton dan masing-masing pleton terdiri antara 35-30 anggota sabhara. Banyaknya anggota yang bernaung di Sat Dalmas Polda Metro Jaya adalah sebagai jawaban profesionalisme Polri yang berperan sebagai pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat terutama dalam mengamankan aksi unjuk rasa yang intensitasnya sangat tinggi seperti di Jakarta sebagai ibu kota negara.

*”Sat Dalmas PMJ di pimpin oleh seorang yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) sedangkan Danki dipimpin oleh seorang Ajun Komisaris Polisi (AKP) sedangkan Danton dipimpin oleh seorang Inspektur Tingkat Dua (IPDA)”<sup>14</sup>*

Besarnya struktur organisasi di Sat Dalmas Polda Metro Jaya yaitu sekali lagi untuk menjawab tingginya mobilitas komponen massa aksi yang melakukan aksi unjuk rasa di Ibu Kota Negara yang mana setiap detik gejolak dan perkembangan situasi sangat cepat berubah.

Tehnis di lapangan keberadaan Sat Dalmas Polda Metro Jaya tetap berada dibawah kendali Ka Pam Obyek atau Kapolsek setempat dimana massa aksi berlangsung, karena status Sat Dalmas Polda Metro Jaya adalah bawah kendali operasi (BKO) Ka Pam Obyek. Sehingga terkadang selalu terjadi antara Dalmas Restro Jaksel dan Dalmas Polda Metro Jaya bertemu pada satu tempat dalam pengamanan aksi unjuk rasa. Biasanya Ka Pam Obyek mempertimbangkan jumlah massa cukup besar dan tidak dapat tercover oleh Dalmas Restro Jaksel sehingga jalan keluarnya meminta back up / penebalan pasukan dari Sat Dalmas Polda Metro Jaya.

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Kaur Bin Ops Sabhara Restro Jaksel.

Pada saat pengamanan aksi unjuk rasa berlangsung Ka Pam Obyek bertanggung jawab penuh terhadap pasukan yang berada di bawah kendali operasinya, baik dari Restro Jaksel maupun dari Sat Dalmas Polda Metro Jaya. Ka pam Obyek juga menentukan siapa yang akan dijadikan Dalmas Awal maupun Dalmas Lanjut apabila eskalasi massa aksi semakin meningkat. Terkadang pada saat situasi landai, Dalmas Restro Jaksel dan Dalmas Polda Metro Jaya saling bergantian untuk mengamankan aksi unjuk rasa, dilaksanakan perjam dan bergantian setiap pleton.

*"Ka Pam Obyek merupakan pimpinan yang paling berhak untuk mengendalikan dan menentukan CB yang harus dilakukan oleh pasukan Dalmas dalam mengamankan aksi unjuk rasa tersebut, biasanya dengan melihat jumlah massa dan karekter serta tipikal mass aksi"<sup>15</sup>*

APP yang diberikan oleh Ka Pam Obyek seputar penanganan aksi, pengarahan agar tindakan anggota tidak terpancing emosi, serta pergerakan pasukan dibawah satu kendali yaitu dari Ka Pam Obyek dan cara bertindak yang harus dilakukan serta menjelaskan karekteristik massa aksi, termasuk pengecekan kekuatan pasukan yang di BKO .

Banyaknya massa yang melakukan aksi unjuk rasa terdiri dari ratusan elemen komponen masyarakat di tambah dengan beragamnya isu yang disuarakan dan digulirkan selama aksi massa berlangsung, menyebabkan pengamanan aksi unjuk rasa dilakukan tetap mengambil prinsip jangan menganggap enteng dan menghindari resiko sekecil apapun artinya meskipun massa aksi berjumlah sedikit dan isu yang digulirkan tidak terlalu mendapatkan perhatian dari publik. Apabila terdapat kesalahan sekecil apapun dari pihak kepolisian / kesalahan prosedur penanganan aksi unjuk rasa, maka akibatnya sangat fatal dan merusak citra institusi.

*"Biasanya aksi yang dilakukan oleh massa aksi yang sudah kenal dengan Korlapnya sedikitnya akan sangat membantu lancarnya penanganan aksi unjuk rasa, namun apabila aksi yang dilakukan oleh sekelompok massa yang belum kenal sama korlapnya , kita tidak boleh lengah dan harus*

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Kaur Bin Ops Sabhara Restro Jaksel.

*lebih berhati-hati, apalagi biasanya terdapat komponen massa aksi yang sering berbuat anarkis”<sup>16</sup>*

Selama ini eskalasi massa aksi saat menuntut dan memperjuangkan tuntutan di wilayah hukum Restro Jaksel telah mengalami *gradasi aksi, dari mulai dorong-dorongan, aksi pelemparan, pembakaran ban-ban bekas, pelemparan bom molotov dan bahkan yang terakhir yaitu penggunaan senjata api dan senjata tajam* oleh massa aksi yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Hal ini menunjukkan profesionalisme sاتفung dalam penanganan aksi unjuk rasa harus lebih ditingkatkan dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Berikut uraiannya:

*”Sebelum kejadian ampera yang menewaskan beberapa orang penanganan aksi unjuk rasa dilakukan dengan menggunakan Kep Kapolri no. 16 tahun 2006 tentang Dalmas awal dan Dalmas lanjut, namun setelah kejadian tersebut maka prosedur yang harus digunakan yaitu Protap 01/2010 tentang tembak ditempat bagi mereka yang melakukan aksi unjuk rasa dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam”<sup>17</sup>*

Pembagian tugas ini sesuai Protap 01/2010, penanganan tetap dibawah kendali Ka Pam Obyek dalam melakukan penilaian dan evaluasi apakah tembak tersebut harus dilakukan atau tidak dilakukan. Hal ini tentunya tidak terlepas dengan memperhatikan dan menjunjung tinggi HAM.

Penanganan aksi unjuk rasa di lapangan dilakukan satuan Samapta yaitu *Sat Dalmas Polres Bogor Kota dan Polres Jakarta Selatan*. Dalam hal ini fungsi Dalmas mengacu pada Peraturan Kapolri no. 16/2006 yaitu dalam penanganan aksi unjuk rasa dipergunakan Dalmas Awal dan Dalmas Lanjut. Sebelum anggota Dalmas turun ke lapangan maka para anggota sebelumnya diberikan **APP** tentang tindakan yang harus dilakukan selama aksi unjuk rasa dilakukan. Di dalam APP juga sering terdapat penekanan dari Kasat Sabhara tentang pentingnya saling menghargai, tidak terprovokasi dan menghormati HAM.

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Kaur Bin Ops Sabhara Restro Jaksel.

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Kasat Sabhara Restro Jaksel.

Dalam penanganan aksi unjuk rasa yang dilakukan satuan samapta biasanya dilakukan secara persuasif, biasanya plotting anggota dilakukan di luar objek atau sasaran yang akan di demo. Dengan membentuk pasukan bershaf, anggota Dalmas berjejer untuk menjaga ketertiban aksi unjuk rasa. Lama tidaknya anggota Dalmas berdiri dalam penanganan aksi unjuk rasa bergantung lama-tidaknya aksi unjuk rasa dilakukan oleh komponen masyarakat tersebut.

Kemudian untuk mengilustrasikan kegiatan tersebut diatas terutama dalam hal pengamanan dan penanganan aksi unjuk rasa maka peneliti akan membandingkan 2 (dua) buah peristiwa yang terjadi di wilayah Metro Jakarta Selatan , diantaranya yaitu :

#### **6.2.1. Pengamanan Pelaksanaan Sidang Kasus Abu Bakar Baasyir.**



**Jakarta-Yutisi.com:**

Gambar tersebut diatas terjadi pada pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 yang mana Abu Bakar Baasyir tengah turun dari kendaraan taktis Brimob Mabes Polri dan dengan pengawalan super ketat. Selain itu dalam pelaksanaan dan pengamanan sidang kasus Abu Bakar Baasyir ini Polri memberlakukan pola pengamanan Protap 01/2010 tentang [perintah tembak ditempat](#) selain itu terdapat sekitar 3000 personil kepolisian diterjunkan ke lokasi dalam pelaksanaan pengamanan sidang di PN Jakarta Selatan.

## 6.2.2 Pengamanan Pelaksanaan Sidang Bentrok Ampera.

Seperti dikutip dari situs [www.okezone.com](http://www.okezone.com) pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2010, bahwa untuk melakukan adanya antisipasi bentrok Ampera Kepolisian wilayah Metro Jakarta Selatan menyiagakan sekitar 900 personil siaga di PN Selatan. Adapun berita terkait sebagai berikut :

### **Antisipasi Bentrok, 900 Polisi Siaga di PN Jaksel**

*Rabu, 6 Oktober 2010 08:31 wib*



*ilustrasi*

Gambar tersebut diatas terjadi pada pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2010 yaitu sesaat setelah peristiwa bentrok di Ampera Cilandak Jakarta Selatan. Pada kegiatan pengamanan kasus sidang bentrok ampera ini Polri dalam upaya melakukan terdapatnya antisipasi bentrok kasus Ampera telah menyiagakan sekitar 900 personil siaga di PN Selatan. Selain itu juga polisi telah menyiapkan Kendaraan water canon sebagai upaya antisipasi dikhawatirkan terjadinya bentrok kembali

## **BAB 7**

### **PEMBAHASAN**

#### **7.1. Paramilitary Policing pada Fungsi Sabhara**

Polisi dimanapun keberadaannya diseluruh dunia secara universal memiliki tugas yang sama yaitu melayani dan melindungi masyarakat. Melayani dalam pengertian polisi memberikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang tentunya sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum positif dan terkait dengan tugas-tugas kepolisian seperti dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat. Melindungi dalam pengertian yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat dari segala ancaman kejahatan dan kekerasan serta ketakutan akan kejahatan. Melindungi tidak hanya terkonsentrasi kepada jasmani saja melainkan kepada benda kepunyaan ataupun harta yang dimiliki oleh warga masyarakat.

Implementasinya dalam mengemban tugas, polisi harus bertindak secara professional, proporsional dan procedural, tidak membeda-bedakan warga masyarakat berdasarkan SARA, kelompok atau golongan tertentu. Polisi harus netral, tidak berpihak dan berdiri diatas semua golongan/kelompok. Adanya suara yang terkadang sumbang muncul dan berkembang ke permukaan hendaknya ditanggapi secara positif sebagai sesuatu kritikan yang konstruktif dan demi menambah kedewasaan Polri. Sehingga ke depan Polri semakin professional, modern, bertanggungjawab dan dipercaya.

Tugas pokok Polri sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang adalah sebagai pelindung dan pelayanan masyarakat. Dalam tugas pokoknya terkadang Polri selalu dihadapkan kepada permasalahan disebabkan oleh banyak faktor pertama, resources, (sumber daya) baik sumber daya keuangan maupun sumber daya manusia, dana operasional yang minim, kemampuan penguasaan iptek, kemampuan rekrutmen, penempatan anggota Polri. Pembagian fungsi di kepolisian masih jauh dari seharusnya, Kelima fungsi kepolisian yaitu shabara, bimmas, lantas, intelejen dan reserse, masih belum optimal, padahal spesialisasi dan keahlian

polisi menjadi tolak ukur kemampuan professional polisi. Namun apapun itu tugas pokok Polri sebagai pelindung dan pelayan serta pengayom masyarakat harus tetap berlangsung.

Kemampuan atau ketidakmampuan polisi dalam menjalankan tugasnya tergantung gaya kepolisian (*policing style*) yang dijalankan. Secara umum model pemolisian (*policing style*) dibagi kedalam 2 (dua) gaya kepolisian universal yaitu model tradisional dan modern. Tradisional *policing* memiliki tekanan utama pada tindakan yang bersifat reaktif (*reactive policing*), sejenis pemolisian ala pemadam kebakaran dan pemolisian militer (*paramilitary policing*) artinya dalam hal ini Polri dituntut bagaimana menyelesaikan kasus yang ditangani secara cepat untuk ditangani dan biasanya tanpa memperhatikan faktor lainnya. Misalnya saja dalam penanganan pengamanan aksi unjuk rasa dalam hal ini Polri dengan mengedepankan fungsi sabhara yang mana dilihat dari uniformnya saja sudah kelihatan bagaimana pendekatan militer yang dipergunakan seperti penggunaan baret, seragam dan atribut yang digunakan serta penggunaan sepatu militer / sepatu laras. Disadari atau tidak penempatan anggota sabhara sudah menunjukkan bahwa Polri menggunakan *paramilitary policing*. Penempatan anggota sabhara adalah suatu tindakan alternatif yang digunakan oleh Polri untuk meredam aksi anarkis dan destruktif dari kelompok massa sehingga pada akhirnya dapat meminimalisir tindakan yang akan merugikan tersebut.

Fungsi Sabhara sebagaimana dibahas dalam bab sebelumnya teridentifikasi mengandung unsur *paramilitary policing* menonjol dibanding satuan-satuan lain baik di Polres Bogor Kota maupun Polres Metro Jakarta Selatan. Secara berurutan menempati urutan tertinggi yaitu mengandung 32 indikator dibanding Satfung Lantas (19 indikator) dan Reskrim (11-14 indikator). Unsur *paramilitary policing* yang menonjol pada tugas satfung Samapta di kedua Polres ini memunyai sisi fungsional artinya bahwa memang hal ini sangat diperlukan dan sangat berfungsi dalam melaksanakan tugas Polri khususnya dalam pengamanan aksi unjuk rasa terutama untuk mencegah adanya tindakan anarkis dari kelompok massa/elemen masyarakat lainnya.

Secara umum hasil penelusuran lapangan menjelaskan unsur pertama *paramilitary policing* yaitu atribut-simbol-uniform pada Sabhara cenderung fungsional karena berguna untuk



tugas turjawali/(pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli), membina *esprit de corps* para anggota, terutama saat pengendalian massa dan patroli. Berikutnya unsur kedua yaitu unsur sikap dan tindakan paramilitari menjadi fungsional saat turjawali dan penanganan massa. Unsur ketiga yaitu unsur struktur organisasi paramilitari, tampak fungsional bila dipergunakan menangani unjuk rasa dan peristiwa yang melibatkan massa. Unsur keempat yaitu unsur peralatan paramilitari dalam satfung Samapta mempunyai 2 sisi yaitu fungsional hanya dalam tugas tertentu dan terbatas seperti turjawali dan penanganan massa. Unsur kelima yaitu unsur gaya kepemimpinan paramilitari mempunyai nilai fungsional hanya saat dipergunakan untuk penanganan massa.

Pendekatan kemiliteran yang dilakukan oleh pihak kepolisian diantaranya mengandung 4 (empat) indikator yaitu :Kultur/budaya, Organisasi, Operasional, Material (penggunaan senjata dan tehnologi canggih). Kultur yang ada di Polri mengenai sikap hormat bawahan kepada atasan dan pemanggilan kata-kata “komandan” , organisasi yang masih menekankan satu komando dan hirarki, operasional yang mengedepankan tindakan represif dan reaktif serta penggunaan senjata yang dilegalkan merupakan wajah Polri saat ini. Meskipun Polri sudah terlepas dari bayang-bayang militer namun tetap saja ke empat hal tersebut yang lekat dengan budaya militer masih tetap dan ada di tubuh Polri.

Polri merupakan salah satu bagian dari institusi pemerintah yang dalam hal ini selaku pihak yang paling bertanggungjawab untuk keamanan di dalam negeri, oleh karena itu peranan dan keberadaan Polri sangat penting dan strategis karena di dalamnya menyangkut penegakkan hukum selain itu Polri juga memiliki kekuatan dan diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan koersif, artinya penggunaan kekerasan oleh Polri dibenarkan termasuk dalam hal kepemilikan senjata , hal itu sekali lagi cerminan polisi Indonesia saat ini , oleh karena itu wajar dan tidak dapat dipungkiri bahwa paramilitary policing masih menjadi bagian dari Polri. Penanganan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh fungsi dalmas dalam hal ini sabhara dengan aksi pemukulan dan penangkapan serta intimidasi dari petugas kepolisian terhadap sekelompok massa yang melakukan aksi unjuk rasa adalah gambaran untuk menjelaskan hal tersebut diatas.

Selain itu mereka pun dibekali senjata gas dan tidak jarang dilengkapi kendaraan taktis yaitu water canon untuk menghalau massa.

Polri memiliki struktur komando tersentralisasi, pembedaan yang ketat antar kepangkatan, kesamaan terminologi dengan militer, selalu menggunakan komando dan perintah, penerapan peraturan dan disiplin yang kuat, pengurangan kreativitas individual, hal ini dapat dilihat dari keberadaan fungsi Dalmas / Sabhara yang mana perintah penggunaan pasukan dan kegiatan yang dilakukan harus atas perintah pangkat yang paling tinggi / Ka Pam obyek, kalau tidak ada perintah atau bahkan perintahnya datang dari selain Ka Pam Obyek maka perintah tersebut sangat wajar untuk diabaikan dan tidak diindahkan, hal ini akan berimbas dan berdampak kepada pengurangan kreativitas individual.

Oleh sebab itu jelas terlihat disini bahwa adanya kontrol yang sangat superior, artinya bahwa Dalmas tidak dapat digerakkan begitu saja tanpa ada perintah dari Ka Pam Obyek, termasuk dalam hal ini mengenai pergeseran pasukan maupun pada saat perubahan posisi dalmas awal ke posisi dalmas lanjut. Pergeseran pasukan biasanya terjadi manakala adanya beberapa tempat yang dijadikan sasaran aksi unjuk rasa namun ditempat tertentu tersebut belum terdapat anggota Dalmas yang berjaga atau ditempat tersebut sudah meningkat eskalasinya, misalnya saja massa sudah mulai merangsek masuk ke tempat yang dijadikan sasaran aksi demo atau telah melakukan aksi pembakaran, seperti pembakaran spanduk atau ban bekas.

Menurut Perkap Kapolri No. Pol. 16 tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa bahwa Dalmas awal adalah satuan Dalmas yang dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus kepolisian, digerakkan dalam menghadapi kondisi massa masih tertib dan teratur/situasi hijau, sedangkan Dalmas lanjut yaitu satuan Dalmas yang dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus kepolisian, digerakkan dalam menghadapi massa yang sudah tidak tertib/situasi kuning.

Adanya penilaian mengenai pengalihan dari Dalmas awal ke Dalmas lanjut tergantung Ka Pam Obyek sebagai pemegang kendali yang tentunya memperhatikan dan mempertimbangkan saran Danton dan Danki tentang situasi terkini. Perlengkapan khusus kepolisian dalam hal ini anggota Dalmas dibekali, tameng, helm dan bahkan tongkat termasuk pengaman body (body protector) untuk tiap anggota Dalmas, sedangkan senjata gas air mata

hanya diberikan salah satu anggota saja yang layak untuk mempergunakannya. Biasanya tiap pleton terdapat satu orang yang membawa senjata gas air mata.

Dalam melaksanakan pergeseran pasukan anggota Dalmas bergerak dalam ikatan regu, ikatan pleton dan ikatan kompi yang tentunya lengkap dengan peralatan yang dibawanya. Dalam ikatan pleton paskan dipimpin oleh seorang Danton berpangkat Ajun Inspektur Tingkat Satu atau Inspektur Tingkat Dua, sedangkan ikatan kompi dipimpin oleh seorang komandan kompi berpangkat Ajun Komisaris Polisi. Ka Pam Obyek dalam melakukan pergeseran pasukan biasanya langsung berkoordinasi dengan komandan kompi, sehingga apapun kegiatan kompi di tempat yang barunya dalam kegiatannya masih berada pada kendali Ka Pam Obyek.

Penanganan aksi unjuk rasa di lapangan dilakukan satuan Samapta yaitu *Sat Dalmas Polres Bogor Kota dan Polres Jakarta Selatan*. Dalam hal ini fungsi Dalmas mengacu pada Peraturan Kapolri no. 16/2006 yaitu dalam penanganan aksi unjuk rasa dipergunakan Dalmas Awal dan Dalmas Lanjut. Sebelum anggota Dalmas turun ke lapangan maka para anggota sebelumnya diberikan *APP* tentang tindakan yang harus dilakukan selama aksi unjuk rasa dilakukan. Di dalam *APP* juga sering terdapat penekanan dari Kasat Sabhara tentang pentingnya saling menghargai, tidak terprovokasi dan menghormati HAM. Selain itu dalam *APP* juga diarahkan bagaimana anggota Dalmas bergerak baik itu dalam ikatan regu, ikatan pleton maupun ikatan kompi termasuk kapan waktunya tindakan represif seperti penggunaan tameng, helm dan gas air mata digunakan.

Dalam penanganan aksi unjuk rasa yang dilakukan satuan sabhara biasanya dilakukan secara persuasif, biasanya plotting anggota dilakukan di luar objek atau sasaran yang akan di demo. Dengan membentuk pasukan bershaf, anggota Dalmas berjejer untuk menjaga ketertiban aksi unjuk rasa. Lama tidaknya anggota Dalmas berdiri dalam penanganan aksi unjuk rasa bergantung lama-tidaknya aksi unjuk rasa dilakukan oleh komponen masyarakat tersebut. Namun apabila massa sudah mulai tidak tertib biasanya anggota Dalmas melakukan tindakan-tindakan yang dipandang perlu berdasarkan penilaian Ka Pam Obyek untuk melakukan tindakan represif.

Analisis Unsur Paramilitary Policing Dalam Penanganan Unjuk Rasa diantaranya dalam Simbol, atribut, uniform yaitu Simbol paramiliter dalam hal ini Uniform lebih kepada pakaian yang digunakan seperti bad lengan kanan dan kiri serta pada pangkat dan tanda jasa serta tanda jabatan. Pada bad lengan kiri lebih menunjukkan kepada satuan fungsi, sedang bad lengan sebelah kanan menunjukkan kesatuan kewilayahan. Untuk tanda jabatan diletakkan di bagian saku sebelah kanan, tanda kewenangan anggota Polri diletakkan di atas saku sebelah kiri. Pangkat ditempatkan di bagian bahu sebelah kanan dan kiri serta di tambah monogram yang diletakkan kerah baju bagian kanan dan kiri. Atribut untuk samapta khususnya Dalmas yaitu menggunakan Baret berwarna coklat sebagai penutup kepala dengan emblem bagian depan sebelah kiri dengan lambang sabhara serta sebuah talikur lengkap dengan pluit berwarna coklat. Kepangkatan dan tanda jabatan menunjukkan senioritas dan kemampuan managerial dalam membina dan mengendalikan anggota, sedang tanda kewenangan lebih kepada kewenangan yang dimiliki oleh seorang anggota Polri sebagaimana di atur dalam KUHAP.

Sedangkan dalam sikap tindakan lebih kepada memahami dan menjalankan perintah dari atasan serta dalam bingkai peraturan internal yang ada serta doktrin-doktrin lain. Doktrin dalam hal ini lebih diartikan kepada peraturan-peraturan yang melekat dan berlaku bagi seorang anggota Polri atau lebih dikenal dengan aturan tertulis. Sedang aturan tidak tertulis harus dilakukan anggota Polri terkait kebijakan teknis dan taktis di lapangan. Kebijakan seorang komandan/atasan dapat dijadikan sebagai peraturan tidak tertulis mengingat satu perintah dan satu komando masih ada dan tetap dipertahankan di lingkungan Polri. Hal ini sering di jumpai pada saat seorang atasan memberikan *APP* (acara pimpinan pasukan) kepada bawahannya.

Dalam struktur organisasi Polri sudah diatur sistematis melalui struktur organisasi terbaru yaitu berdasarkan Kep 366/2010 tentang Struktur Organisasi Polri. Dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai tipe-tipe Polsek, Polres serta Poltabes disertai pangkat, jabatan dan golongan serta jumlah personil Polri yang mengisi struktur organisasi tersebut. Polsek di beberapa wilayah di luar Jawa akan berbeda struktur organisasi termasuk jumlah personil dan jabatan dibanding Polsek yang terdapat di jajaran Polda Metro Jaya. Hal ini untuk menyeimbangkan mobilitas masyarakat yang tinggi sehingga Polri tampil dengan pelayanan dan

memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Kondisi ini seringkali membuat struktur Polri menjadi berjenjang, birokratis, paramiliter, sehingga pembuatan keputusan tidak spontan tapi menunggu keputusan kewenangan tertinggi dalam satu wilayah dalam keadaan tertentu.

Peralatan standar dalam penanganan unjuk rasa adalah tameng, helm, tongkat, apar, mega phone, gas gun / gas air mata, ransus, rantis, kamera dan tali. Peralatan tersebut mempunyai fungsi sangat vital bagi eksistensi anggota Dalmas di lapangan terutama dalam mengamankan aksi unjuk rasa. **Tameng** untuk melindungi. Selain tameng perlengkapan lain yaitu penggunaan **tongkat**. Tongkat digunakan untuk membela diri anggota Dalmas apabila terdesak. **Megaphone** biasanya digunakan sebagai alat untuk memberitahukan pesan-pesan atau nasihat dari pihak kepolisian agar komponen masyarakat melakukan aksi unjuk rasa tetap pada komitmen memelihara dan menjaga keamanan serta ketertiban, tidak terprovokasi selama kegiatan tersebut berlangsung. Sedang **kamera** digunakan sebagai media dokumentasi dan komunikasi sampai sejauh mana anggota Dalmas telah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ada. **Helm** adalah sarana melindungi petugas Polri apabila terjadi pelemparan yang dilakukan massa aksi sebagai reaksi kekecewaan atas tuntutan yang tidak diakomodir oleh pihak-pihak tertentu. **Tali** biasanya digunakan selain untuk menyekat dua kelompok masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa namun juga digunakan membantu anggota Dalmas memperkuat ikatan kesatuan apabila telah terjadi aksi dorong dengan massa sehingga anggota Dalmas tidak tercerai berai. Penggunaan **gas air mata** dilakukan apabila massa sudah mulai anarkis dan mengganggu ketertiban umum seperti memblokir jalan dan melakukan sandera terhadap kendaraan-kendaraan tertentu. Penggunaan **alat pemadam (Apar)** yang berisi gas CO<sub>2</sub> dilakukan apabila massa aksi telah melakukan aksi pembakaran. Untuk **Ransus**/(kendaraan khusus) dan **Rantis** (kendaraan taktis) digunakan untuk antar jemput pasukan yang menggunakan truk atau bus. Sedang untuk Rantis yaitu kendaraan Water Cannon yaitu kendaraan yang membawa banyak air berfungsi pada upaya membubarkan aksi massa apabila sudah bertindak anarkis dan destruktif. Kendaraan rantis lainnya yaitu berupa kendaraan Barracuda berfungsi melakukan escape (melarikan diri) biasanya dalam menyelamatkan pejabat

VIP atau orang yang perlu mendapatkan evakuasi. Berbagai peralatan khusus merupakan peralatan paramiliter yang dipergunakan dalam waktu yang khusus pula.

Kepemimpinan lebih kepada adanya sikap loyalitas terhadap atasan dan organisasi serta keteladanan pemimpin / komandan terhadap bawahan. Gaya kepemimpinan seorang atasan biasanya berbeda-beda. Hal ini terkait kebijakan yang akan dan telah dijalankan. Seorang atasan dalam memberikan kepemimpinan memberikan warna tersendiri bagi organisasi, tetapi tetap dalam bingkai aturan-aturan yang mengikat anggota Polri. Khususnya untuk Dalmas, kepemimpinan seorang Danton maupun Dankie akan mudah diikuti dan dilaksanakan oleh anggotanya. Hal ini terkait dengan loyalitas dan kepatuhan serta kedisiplinan yang telah ditanamkan dan di doktrinkan semenjak pembentukan menjadi anggota Polri. Gaya kepemimpinan seorang Danton atau Dankie terimplementasikan dalam pelaksanaan *apel pagi* dan *apel sore*. Kegiatan apel tersebut merupakan sarana konsolidasi pasukan dan APP terhadap kebijakan-kebijakan yang harus dan wajib dilaksanakan oleh bawahan untuk pelaksanaan tugas Polri. Dalam apel tersebut syarat dengan doktrin dan sebagai sarana penanaman nilai-nilai kepatuhan dan loyalitas seorang anggota kepada bawahannya. Gaya kepemimpinan paramiliter masih dibutuhkan dalam rangka persiapan dan penanganan unjuk rasa.

Oleh karena itu dalam beberapa pelaksanaan kegiatannya Polri masih selalu mengedepankan paramilitary policing atau lebih menonjolkan unsur militernya, padahal dengan telah berpisahya Polri dari militer seharusnya polisi lebih mengedepankan tindakan-tindakan preventif dan persuasif serta menghormati HAM, namun hal ini sekali lagi dilakukan sebagai suatu tindakan alternatif yang memang harus dilakukan oleh Polri sebagai mana payung hukum telah mengaturnya.

## **7.2. Paramilitary Policing dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa**

Beberapa ilustrasi kasus yang peneliti sampaikan di bab V dan bab VI yang mana terjadi di Kota Bogor dan Jakarta Selatan terhadap penanganan aksi unjuk rasa masih terlihat bahwa paramilitary policingnya sangat menonjol dan dominan. Peristiwa yang terjadi di Kota Bogor

yang mana terjadi pada hari Senin tanggal 21 Februari 2011, ketika sejumlah komponen mahasiswa yang tergabung dalam massa HMI Kota Bogor terlibat bentrokan dan saling dorong mendorong dengan petugas Kepolisian Kota Bogor di depan Istana Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat. Massa terlibat bentrokan dengan aparat saat mencoba mendekati Istana Bogor. Bentrokan bermula dari aksi petugas keamanan yang dari awal melarang aksi di depan Istana dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap para mahasiswa. Personil untuk mengamankan aksi unjuk rasa ini yaitu dikerahkan sebanyak 600 lebih personel gabungan Polres Bogor Kota, Polda Jabar, dan Brimob Polda Jabar dikerahkan. Dalam aksinya para mahasiswa menuntut SBY mundur karena telah mengingkari janjinya. Menurut para mahasiswa, SBY dianggap gagal dalam bidang pemberantasan mafia hukum, peningkatan kesejahteraan rakyat, penanganan teroris dan lainnya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pola pengamanan dan penanganan dilakukan secara paramilitary policing artinya disini adanya sikap dan tindakan yang terkesan militer dan over protektif. Dengan adanya penyiapan pasukan yang begitu banyak dalam penanganan kasus tersebut diatas menunjukkan bahwa sikap dan tindakan yang dilakukan kental dengan sistem paramilitary policing yang lebih mengedepankan sikap-sikap yang reaktif, dominasi kekuasaan dan kekuatan.

Adanya penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap beberapa anggota pengunjuk rasa dan adanya saling dorong dan pukul sehingga terjadi bentrokan antara polisi dan massa pengunjuk rasa menunjukkan bahwa Polri seolah-olah melegalkan tindakan represif dan tidak menghormati HAM massa pengunjuk rasa. Aksi unjuk rasa tersebut tidak akan terjadi bentrok manakala Polri lebih bersifat preventif dan persuasif dan tidak mengedepankan tindakan represif. Alangkah bijaknya manakala Polri bersedia atau memfasilitasi adanya mediasi antara massa pengunjuk rasa dengan obyek sasaran yang dijadikan objek pengunjuk rasa. Usaha-usaha yang dilakukan Polisi dalam melakukan tindakan represif kepada mahasiswa tidak akan menyelesaikan masalah, namun yang ada malah akan menimbulkan masalah baru yang akan mengakibatkan atau berdampak terhadap sesuatu yang justru akan merugikan pihak polisi.

Selain itu adanya penempatan personil dalam jumlah yang banyak dalam mengamankan aksi penolakan ajaran ahmadiyah pun terkesan reaktif dan hanya menonjolkan kekuatan polisi

justru yang lebih bijak adalah bagaimana Polri menempatkan anggotanya yang lebih adaktif dan dapat bersosialisasi sehingga situasi tetap aman dan terkendali serta tidak terganggunya aktivitas masyarakat yang lebih banyak.

Sedangkan berdasarkan ilustrasi kasus yang berada di Jakarta Selatan yang mana peristiwa terjadi pada pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 yang mana Abu Bakar Baasyir tengah turun dari kendaraan taktis Brimob Mabes Polri dan dengan pengawalan super ketat. Selain itu dalam pelaksanaan dan pengamanan sidang kasus Abu Bakar Baasyir ini Polri memberlakukan pola pengamanan Protap 01/2010 tentang [perintah tembak ditempat selain itu terdapat sekitar 3000 personil kepolisian diterjunkan ke lokasi](#) dalam pelaksanaan pengamanan sidang di PN Jakarta Selatan. Selain itu peristiwa yang terjadi pada pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2010 yaitu sesaat setelah peristiwa bentrok di Ampera Cilandak Jakarta Selatan. Pada kegiatan pengamanan kasus sidang bentrok ampera ini Polri dalam upaya melakukan terdapatnya antisipasi bentrok kasus Ampera telah menyiagakan sekitar 900 personil siaga di PN Selatan yang mana dalam hal ini polisi juga telah menyiapkan Kendaraan water canon sebagai upaya antisipasi dikhawatirkan terjadinya bentrok kembali.

Hal ini menunjukkan bahwa pola pengamanan dan penanganan dilakukan secara paramilitary policing artinya disini adanya sikap dan tindakan yang terkesan militer dan over protektif. Dengan adanya penyiapan pasukan yang begitu banyak dalam penanganan kasus tersebut diatas menunjukkan bahwa sikap dan tindakan yang dilakukan kental dengan sistem paramilitary policing yang lebih mengedepankan sikap-sikap yang reaktif, dominasi kekuasaan dan kekuatan dan pemolisian yang terkesan ala pemadam kebakaran artinya api cepat dipadamkan tampak melihat impilkasi yang terjadi dikemudian hari.

Penggunaan kekuatan anggota Polri yang cukup banyak dan penempatan beberapa kendaraan taktis menunjukkan Polri show of force dengan kekuatannya, artinya mereka menunjukkan kekuatannya sebagai sipil yang dipersenjatai dan memiliki kekuasaan serta melegalkan aksi represif. Protap 01/2010 tentang pelaksanaan tembak di tempat bagi anggota masyarakat yang melakukan tindakan anarkis adalah cerminan bahwa Polri masih menggunakan pendekatan militer.



Sekali lagi pada peristiwa tersebut diatas terkesan Polri masih bersikap reaktif didalam menangani masalah yang mana sikap reaktif ini merupakan salah satu ciri atau indikator penggunaan paramilitary policing.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas bahwa Polri dalam melaksanakan tugasnya masih menggunakan model lama atau traditional artinya polisi bersikap reaktif dan bekerja secara instan , artinya bagaimana suatu permasalahan diselesaikan tanpa adanya keinginan yang kuat untuk lebih mendalami kasus tersebut dan tidak memprediksikan akibat yang akan timbul kemudian.

Dalam hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan konsep community policing yang lebih adaptif dan menekankan kepada penuntasan masalah serta orientasi terhadap pelayanan public dan mengandalkan sumber daya manusia. Oleh sebab itu antara kedua konsep ini tidak akan compatible dan juga tidak akan saling menggantikan karena dua-duanya bertolak belakang.

Sekali lagi jelas terlihat bahwa dari beberapa kasus tersebut diatas menunjukkan bahwa polisi adalah salah satu institusi pemerintah yang power full, memiliki otoritas dan kewenangan untuk melakukan tindakan kekerasan terutama dalam hal penanganan aksi unjuk rasa seperti penanganan kasus persidangan Abu Bakar Baasyir dan bentrok ampera serta penangkapan sejumlah mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan istana bogor.

Apalagi dengan menggunakan kekuatan yang cukup banyak atau penggelaran pasukan yang cukup signifikan dalam menghadapi setiap aksi unjuk rasa serta show of force beberapa kendaraan rantis, menunjukkan bahwa Polri lebih bersifat reaktif dan mengedepankan sikap yang represif. Namun sekali lagi polisi bukan lah militer, Polri adalah lembaga yang berinteraksi dalam kesehariannya dengan masyarakat sipil, oleh karena hal yang sangat masuk akal adalah bagaimana polri dalam memberikan pelayanan dan pengamanan ke masyarakat lebih bersifat persuasive dan preventif.

Meskipun polisi dipersenjatai dan memiliki birokrasi yang serba hirarkhis yang mana lebih memperlihatkan kecenderungan adanya sikap militer tentunya hal ini tidak dijadikan sebagai acuan untuk menindas rakyat dan sama sekali tidak menghargai hak asasi manusia,

karena bagaimanapun hak asasi manusia adalah merupakan hak dasar dan hak pokok yang dimiliki oleh setiap orang semenjak lahir dan merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan YME. Oleh karena itu semua orang memiliki hak yang sama untuk dihormati dan dihargai sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME.

Oleh sebab itu adanya persamaan paramilitary policing yang terjadi di Polres Kota Bogor dan di Polres Metro Jakarta Selatan padahal di kedua wilayah tersebut memiliki karakteristik berbeda dikarenakan yaitu sikap dan tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di kedua kota tersebut dalam melakukan aksi penanganan unjuk rasa menggunakan konsep paramilitary policing yaitu seperti penggunaan dan penggelaran pasukan yang cukup banyak, show of force kekuatan berupa adanya penggunaan kendaraan taktis serta sifat represif seperti pemukulan dan penangkapan yang dilakukan terhadap massa aksi . Selain itu adanya hukum positif dan aturan tertulis berupa undang-undang khusus kepolisian ( UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kep Kapolri No. Pol. : Kep/53/X/2002 dan peraturan lainnya serta doktrin termasuk hirakri (unity of command) menjadi alasan berikutnya kenapa paramilitary di kedua kota tersebut sama.

## **BAB 8**

### **PENUTUP**

#### **8.1 KESIMPULAN**

Polri adalah salah satu aparaturnya atau alat negara di bidang hukum dan merupakan merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Berarti dalam hal ini Polri juga harus menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram. Dengan kata lain kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial dari sesuatu masyarakat yang dirasakan sebagai bahan/gangguan yang merugikan para anggota masyarakat tersebut.

Setiap negara mempunyai sejarah kepolisian yang berbeda-beda begitu pula dengan Indonesia. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa Polri tadinya merupakan bagian dari angkatan bersenjata, sehingga ada konflik nilai diantara kerja polisi dan aktivitas militer terkait dengan perang. Sebagai bagian dari militer, seorang tentara dilatih untuk membunuh mencegah agar tidak terbunuh, tetapi polisi diharuskan menggunakan kekerasan secara minimum karena penggunaan kekerasan yang berlebihan dapat mengarah pada persoalan hukum.

Masih dijalankannya *traditional policing*, seringkali dikaitkan dengan sejarah Kepolisian Indonesia yang tidak bisa begitu saja lepas dari militer, sehingga ciri *paramilitary policing* masih kuat. Sikap atau perilaku yang berorientasi pada *paramilitary policing* seperti atasan tidak pernah salah, harus selalu mengatakan siap setiap kali di beri perintah, tidak ada keberanian untuk menolak perintah, bawahan harus menjalankan segala perintah walaupun salah bahkan melanggar hukum, bawahan memenuhi perintah karena takut dianggap membangkang dan tak mampu,

akibatnya masyarakat menjadi obyek sapi perahan ditakut-takuti jika tidak membantu, Paramilitary policing merupakan tampilan gaya policing berbau militeristik.

Memang tidak menjamin sikap-sikap paramilitary yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa dapat mengurangi dan meminimalisir tindakan anarkis dan destruktif oleh massa aksi, namun hal tersebut dapat menjadi tindakan pembenaran oleh pihak kepolisian menggunakan kekuatan dalam menekan dan mengurangi tindakan anarkis yang terjadi. Upaya-upaya untuk meminimalisir *paramilitary policing* didalam tubuh kepolisian yaitu diantaranya dengan merubah paradigma polisi yang lebih humanis, profesional dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, membentuk SDM Polri lebih handal dan berkualitas, serta kapabilitas yang tidak diragukan lagi, sehingga perlindungan, pelayanan dan pengayoman terhadap masyarakat lebih terjamin dan mudah terwujud.

Tidak kalah pentingnya adanya *political will* dari pemerintah untuk mau dan sungguh-sungguh menjadikan Polri sebagai pelindung, pelayan dan pengayom serta dicintai masyarakat. Kebijakan dari pemerintah tersebut diantaranya dengan memberikan remunerasi bagi anggota Polri, peraturan-peraturan yang lebih berpihak kepada Polri dan masyarakat serta anggaran untuk kebutuhan Polri dalam rangka mobilitas agar lebih ditingkatkan.

Oleh sebab itu adanya persamaan paramilitary policing yang terjadi di Polres Kota Bogor dan di Polres Metro Jakarta Selatan padahal di kedua wilayah tersebut memiliki karakteristik berbeda dikarenakan yaitu sikap dan tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di kedua kota tersebut dalam melakukan aksi penanganan unjuk rasa menggunakan konsep paramilitary policing yaitu seperti penggunaan dan penggelaran pasukan yang cukup banyak, show of force kekuatan berupa adanya penggunaan kendaraan taktis serta sifat represif seperti pemukulan dan penangkapan yang dilakukan terhadap massa aksi . Selain itu adanya hukum positif dan aturan tertulis berupa undang-undang khusus kepolisian dan peraturan lainnya serta doktrin termasuk hirakri (unity of command) menjadi alasan paramilitary policing di kedua kota tersebut sama.

Sehingga kedepan perlu elaborasi lebih jauh kajian terhadap unsur-unsur *paramilitary policing* tidak sekedar pada lokasi penelitian kewilayahan saja tapi mencakup keseluruhan

wilayah POLRI agar diperoleh gambaran secara utuh kinerja *paramilitary policing* POLRI dalam wilayah yang beragam, majemuk dan multikultural. Terkait dengan hal diatas perlu ditindaklanjuti penelitian berikut yang lebih eksploratif menelusuri keberadaan *paramilitary policing* dalam area tugas dan wilayah operasional kepolisian yang jangkauannya lebih luas dan tersebar mencakup lokal-lokal secara lebih spesifik.

## 8.2 SARAN

Tantangan bagi institusi kepolisian adalah bagaimana menyesuaikan struktur pengelolaan kepolisian agar dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Efektifitas struktur organisasi polisi dalam melayani kebutuhan masyarakat telah bergerak dari bentuk birokrasi ke bentuk pasar (market), harga & kompetisi dan jaringan (network), diplomasi, kepercayaan dan resiprositas. Oleh karena itu pembenahan – pembenahan di tubuh kepolisian harus tetap terus berlangsung dan terus berlanjut agar lebih adaptif dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dimasyarakat.

Sumber daya manusia, anggaran yang perlu ditingkatkan, fasilitas yang semakin tersedia serta upaya-upaya pelatihan adalah kunci keberhasilan tugas pokok Polri dalam mengembangkan tugasnya sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat. Selain itu upaya-upaya untuk meminta dukungan terhadap masyarakat mengenai tugas pokok Polri harus tetap ditingkatkan , mengingat suatu institusi pelayanan publik tidak akan berhasil tanpa partisipasi dari masyarakat.

Sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan tidak hanya sebatas petugas operasional / lapangan melainkan juga yang non operasional/staf, pelatihan-pelatihan yang bersifat teknis dan taktis kepolisian terus diberdayakan dan ditingkatkan termasuk pelatihan terhadap penghargaan terhadap hak asasi manusia sebagai hak dasar atau hak pokok yang telah diberikan oleh Tuhan YME semenjak lahir.

Fungsi sabhara kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli, pengaturan, penjagaan dan pengawalan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan,

pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan obyek vital yang meliputi VIP, pariwisata dan obyek vital lain, dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan Kamtibmas harus tetap ditingkatkan. Terlebih untuk bagian pengendalian massa selain harus tetap menjaga spirit team work, menghargai dan menghormati HAM serta mempedomani semua peraturan yang ada termasuk Perkap Kapolri No. Pol. 16 tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.

Selain itu memperkuat transparansi dan akuntabilitas Polri kepada publik salah satu caranya adalah dengan mensosialisasikan kepada publik secara terbuka mengenai penyalahgunaan wewenang yang terjadi di tubuh Polri dan langkah-langkah penanganan yang sudah dilakukan termasuk pengawasan terhadap adanya unexplained wealth dari anggota kepolisian harus menjadi unsur yang melekat di lembaga pengawas internal Polri. Semua ini merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas Polri kepada publik, di mana dengan demikian kepercayaan dapat lebih mudah dibangun.

## Daftar Pustaka

- Bowling, Benyamin, et.al, 2004, *Policing and Human Rights*. United Nations Research Institute for Social Development.
- Bayley, David H. 1998. *What Works in Policing*. Oxford University Press, New York.
- Banton Michael, 2005, *The Police as Peace Officer*, dalam *Policing Key Reading* by Tim Newburn, willan Publishing Oregon USA 2005.
- Bayley, D. and Shearing, C. (1996), 'The Future of Policing', *Law and Society Review*, 30/3:
- Bull, David and Eric Stratta. 1994. "Police community consultation: An examination of its practice in selected constabularies in England and New South Wales, Australia." *ANZ Journal of Criminology* Vol. 27, No. 3.
- Edwards, CJ, 1999, *Changing Policing Theories*, The Federation Press.
- Hale, Chris, et. all. (Eds). 2005, *Criminology*, Oxford University Press.
- Irsan Koesparmono *Polisi dalam Parsudi Suparlan* (2004), Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Jakarta, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- James F. Richardson, 1974. *Urban Police in the United States*, Port Washington N.Y: National University
- Kelana Momo, 2002, *Memahami Undang-Undang Kepolisian : Undang-Undang No. 2 tahun 2002, Latar Belakang dan Komentar Pasal Demi Pasal Jakarta : PTIK Press.*
- Kunarto, 1997. *Perilaku Organisasi Polisi*, Jakarta, Cipta Manunggal
- Lau, Raymond W.K. 2004. *Community Policing in Hongkong*. Sage Publications.
- McCulloch, Jude. 1998. *Blue Army: Paramilitary Policing In Victoria*. PhD thesis, Faculty of Arts, The University of Melbourne.
- , 1999. *Keeping the Peace or Keeping People Down? Policing in Victoria*. Paper, dipresentasikan dalam Konferensi the History of Crime, Policing and Punishment, the Australian Institute of Criminology dan Charles Sturt University
- Meliala, Adrianus. 2006. *Problema Reformasi POLRI*. Jakarta: Trio Repro

Mark Finlay dan Ugljesa Zvekcic , 1993, Alternatif Gaya Kegiatan Polisi Masyarakat (diterjemahkan dan disadur oleh Kunarto), Jakarta , Cipta Manunggal.

-----, 2001, *Police as military: Indonesia's Experience*, Policing, Academy Research Library.

Peter B. Kraska and V. E. Kappeler, "Militarizing American Police: The Rise and Normalization of Paramilitary Units," *Social Problems* 13 (1997)

-----, 1999, Questioning the militarization of U.S. police : Critical versus Advocacy scholarship. *Policing and Society* 9 (2) : 141-55.

-----, 1996, Enjoying militarism: Political and personal dilemmas in studying police paramilitary unit. *Justice Quarterly* 3.

-----, ed. 2001. *Militarizing the American Criminal Justice System : The Changing Roles of The Armed Forces and The Police*, Boston : Northeastern University Press.

Rosenbaum, Dennis P (ed)., 1994, *The Challenge of Community Policing*, Sage Publications

Robert Friedmann, 1992, *Community Policing* (diterjemahkan dan di sadur oleh Kunarto), Jakarta, Cipta Manunggal.

Sarwono, Sarlito Wiryawan, *Beban Mental Polri dalam Quo Vadis Polisi*, Penyunting Adrianus Meliala, Diterbitkan Kerjasama Jurusan Kriminologi Fisip UI dan Majalah Forum Keadilan, Jakarta 1996.

Simon, Josias, dkk, *Paramilitary Policing: Suatu Kajian Stratejik*, Laporan Penelitian, Departemen Kriminologi, 2007

Simon, Josias, *Arti Penting Kajian Paramilitary Policing*, Suara Pembaruan, 19 Januari 2011

Summerfield, Morgan. 2006. *Paramilitary Police Structure and Community Policing: Neither Complimentary nor Compatible*. [www.associatedcontent.com](http://www.associatedcontent.com), diakses 24 Mei 2007.

Walker, Samuel, Cassia Spohn and Miriam DeLone. 1996. *The Colour of Justice: Race, Ethnicity and Crime in America*. Walker Books, Omaha, NE.



## JURNAL

- Bull, David and Stratta, Erica, "*Police Community Consultation: An Examination of its Practice in Selected Constabularies in England and New South Wales, Australia*", The Australian and New Zealand Journal of Criminology 27, no. 3 (1994): 237-249.
- Goldstein, Herman, "*Improving Policing: A Problem-Oriented Approach*", Crime and Delinquency 25, no 2 (1979) : 236-58.
- Johnston, B., *Developing Performance Monitoring In Public Sector*, Social Psychology Quarterly 51(2), 1992
- Johnston, M., *The Labyrinth Of Community Participation: Indonesia's Experience*, Community Development Journal, 17(3), 1982
- Jones, Trevor; Newburn, Tim and Smith, David J., "*Policing and the Idea of Democracy.*" British Journal of Criminology. 36, no. 2 (1996) : 182-198.
- Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No. III Desember 2010 : 229-241
- Kubrin, Charis E. And Ronald Weitzer. (2003). "*New Directions In Social Disorganization Theory*". Journal Of Research In Crime And Delinquency 40:374-402.
- Landau, T. , *When police investigate police: A View From Complainants*. Canadian Journal of Criminology, 38(3), pp. 291-315, 1996
- Livingston, D. (2004), *The Unfulfilled Promise of Citizen Review*, Ohio State Journal of Criminal Law, 1, 653-669, 2004
- Parsudi Suparlan, 1999. Paradigma Naturalistik dalam Penelitian : Pendekatan Kualitatif dan Penggunaannya, Jurnal Antropologi Indonesia No. 53, Jakarta Yayasan Obor.
- OECD DAC, *OECD DAC Handbook on Security System Reform; Supporting Security and Justice*, 2007, hal. 112.
- Senior Police Adviser to the OSCE Secretary General, *Guidebook on Democratic Policing*, OSCE, 2006, Vienna, hal 10.

